

KASTA DALAM POLITIK DI INDIA

SKRIPSI



Oleh:

BELINDA PUTRI NABILAH

151220064

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2026

KASTA DALAM POLITIK DI INDIA

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta**



Oleh:

BELINDA PUTRI NABILAH

151220064

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026**

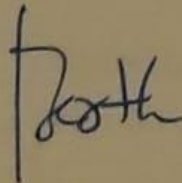
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BELINDA PUTRI NABILAH
NIM : 151220064
JUDUL SKRIPSI : KASTA DALAM POLITIK DI INDIA

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Mei 2026

Pembimbing



Dr. Bastian Yunariono, SIP, M.Si

NIP. 197101272021211003

HALAMAN PENGESAHAN

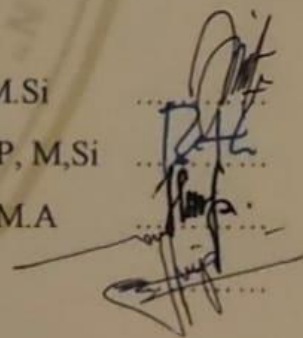
NAMA : BELINDA PUTRI NABILAH
NIM : 151220064
JUDUL SKRIPSI : KASTA DALAM POLITIK DI INDIA

Skripsi ini telah dipertahankan dalam ujian pendadaran
Pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Mei 2026
Waktu : 12.00-13.00 WIB
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

TIM PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji 1 : Dr. June Cahyaningtyas, M.Si
Pembimbing/Penguji 2 : Dr. Bastian Yunariono, SIP, M.Si
Penguji 3 : Melaty Anggraini, S.Hut, M.A
Penguji 4 : Drs. Muharjono, M.Si



Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Arvanta Nugraha, S.IP., M.Si, M.A., Ph.D

NIP. 197503282021211004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan kecurangan / penjiplakan / plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Mei 2026

Yang menyatakan



Belinda Putri Nabilah

NIM. 151220064

ABSTRAK

Sistem kasta di India merupakan struktur sosial historis yang tidak hanya bertahan dalam masyarakat modern, tetapi juga mengalami transformasi menjadi instrumen politik dalam demokrasi elektoral, khususnya pada periode 2019–2024. Meskipun diskriminasi berbasis kasta telah dilarang secara konstitusional, praktik hierarki sosial tetap memengaruhi distribusi kekuasaan dan perilaku politik. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen dengan mengacu pada teori hegemoni budaya Antonio Gramsci dan teori instrumentalisasi identitas Paul R. Brass. Hasil analisis menunjukkan bahwa politisasi sistem kasta terjadi melalui interaksi antara legitimasi ideologis yang telah terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat dan strategi rasional elite politik dalam memanfaatkan identitas kasta sebagai alat mobilisasi elektoral. Nilai-nilai sosial dan religius membentuk “*common sense*” yang membuat praktik tersebut diterima sebagai bagian yang wajar dalam demokrasi. Di sisi lain, elite politik secara aktif mengkonstruksi dan mengartikulasikan identitas kasta melalui distribusi kandidat, strategi kampanye, serta pembentukan koalisi berbasis komunitas sosial. Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi tidak secara otomatis menghapus ketimpangan sosial, melainkan dapat menjadi ruang reproduksi bagi struktur hierarki yang telah ada. Dengan demikian, politisasi sistem kasta di India merupakan hasil interaksi antara reproduksi hegemonik dan instrumentalisasi identitas dalam dinamika politik kontemporer.

Kata Kunci: Sistem Kasta, Politik Identitas, Demokrasi India, Hegemoni Budaya, Instrumentalisasi Identitas.

ABSTRACT

The caste system in India represents a historical social structure that not only persists in modern society but has also transformed into a political instrument within electoral democracy, particularly during the 2019–2024 period. Despite the constitutional prohibition of caste-based discrimination, hierarchical social practices continue to shape power distribution and political behavior. This study employs a qualitative approach through library research and document analysis, drawing on Antonio Gramsci’s theory of cultural hegemony and Paul R. Brass’s theory of instrumentalism of identity. The findings indicate that the politicization of the caste system emerges from the interaction between ideological legitimacy embedded in societal consciousness and the rational strategies of political elites who utilize caste identity as a tool for electoral mobilization. Social and religious values construct a “common sense” that normalizes such practices within democratic processes. At the same time, political elites actively construct and articulate caste identity through candidate distribution, campaign strategies, and coalition-building based on social groups. These findings suggest that democracy does not automatically eliminate social inequality; rather, it can function as a space for reproducing existing hierarchical structures. Therefore, the politicization of the caste system in India reflects the interaction between hegemonic reproduction and identity instrumentalization in contemporary political dynamics.

Keywords: *Caste System, Identity Politics, Indian Democracy, Cultural Hegemony, Instrumentalism of Identity.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kasta dalam Politik di India”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terealisasikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membersamai proses penulis dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan berbagai macam kontribusi, sehingga skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Aryanta Nugraha, S.IP, M.Si, M.A, Ph.D. Selaku kepala program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Yogyakarta.
2. Bapak Bastian Yunariono, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar telah membimbing penulis melewati setiap keraguan, serta menghadirkan ilmu yang tidak hanya menjadi bekal akademik, tetapi juga pelajaran hidup yang bermakna. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, tenaga, dan arahnya, sehingga menumbuhkan keyakinan dalam diri penulis untuk terus melangkah, maka pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. June Cahyaningtyas, M.Si, Mbak Melaty Anggraini, S.Hut, M.A dan Bapak Drs. Muharjono, M,Si selaku dosen penguji atas kritik, saran, dan arahnya yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Agussalim Ph.D, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan kesempatan dalam berbagai penelitian, serta arahan, dukungan, dan bimbingannya kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan..

5. Ayah Ari Mudin, yang menjadi sosok paling berharga dalam setiap langkah penulis, yang dalam diamnya tersimpan doa-doa panjang dan harapan besar. Dengan cinta, kasih sayang, dan ketulusannya ayah menjadi salah satu alasan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini. Dalam setiap lelah yang tak terucap dan pengorbanan serta kerja keras yang diberikan menjadi pengingat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjalanan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terima Kasih penulis ucapkan karena terus mengusahakan segala hal untuk putri kecilnya.
6. Ibu Eka Fajar Ningsih, yang kasihnya mengalir tanpa batas. Sebagai satu-satunya harapan dalam keluarga dan orang pertama yang diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis merasakan bagaimana ibu tanpa henti menanamkan keyakinan, memberikan motivasi, serta semangat yang tak pernah padam. Terima Kasih penulis ucapkan karena dengan cinta yang tulus, ibu terus mendukung setiap mimpi besar penulis, bahkan ketika jalan terasa berat dan penuh keraguan. Semua itu menjadi alasan bagi penulis untuk terus bertahan dan melangkah hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.
7. Adik-adik bulu tercinta Leo dan Una, si kucing putih lucu yang begitu berarti kehadirannya, bukan hanya sebagai pelengkap tetapi telah menjadi bagian dari keluarga bagi penulis. Dalam tawa kebahagiaan dan momen kecil yang tersimpan mampu menguatkan langkah penulis untuk terus melanjutkan perjalanan hidup. Penulis ucapkan terima kasih karena dengan kelembutannya telah menghadirkan warna dan kehangatan di tengah proses penyusunan skripsi ini.
8. Fifi, Nabila, dan Rony sebagai sahabat terdekat penulis yang telah menjadi tempat untuk tumbuh dan saling menguatkan. Di tengah segala dinamika tawa dan tangis serta cerita yang dibagi bersama, kalian hadir bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai ruang yang selalu meyakinkan bahwa penulis tidak pernah benar-benar sendiri. Terima kasih karena berbagai bentuk dukungan dan kehadiran dalam ketulusan kalian menjadi bagian yang tak tergantikan dalam setiap langkah yang ditempuh sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman satu bimbingan khususnya Andine dan Intan, serta seluruh rekan seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini yang bersama-sama menapaki proses panjang yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena saling menguatkan hingga mampu bertahan sampai pada titik akhir. Kepada teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2022, terutama kelas C yang telah menjadi ruang bertumbuh serta ruang di mana memori indah terukir dan akan senantiasa hidup dalam ingatan penulis.
10. Teman-teman Gamelan HI Swaramandala khususnya Beatrix, Vidia, Bintang, dan Ansa serta seluruh rekan lainnya, yang di tengah kesibukan dan latihan tetap memberikan ruang dukungan bagi penulis. Dalam setiap denting nada yang dimainkan bersama, penulis tidak hanya belajar tentang kerjasama tetapi juga tentang kesabaran, kebersamaan, dan arti saling menguatkan. Terima kasih atas setiap pengalaman berharga yang telah diberikan, yang tidak hanya memperkaya perjalanan penulis selama masa perkuliahan, tetapi juga meninggalkan makna yang akan selalu dikenang.
11. Teman-teman UPN “Veteran” Yogyakarta dalam Paduan Suara “Vocalista Paradisso” dan UKM Seni Karawitan yang dalam setiap harmonisasi tidak hanya menghadirkan keindahan tetapi juga merangkai kebersamaan yang penuh makna. Di antara proses yang terjalin penulis belajar tentang kedisiplinan dan saling menguatkan dalam satu irama. Terima kasih atas setiap pelajaran dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama proses perkuliahan.
12. Kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah menghadirkan dukungan. Kalian yang telah berperan, berjuang, bahkan berkontribusi bersama sejak awal perkuliahan hingga pada titik tulisan ini ditorehkan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa "*people come and go*", dimana setiap insan yang hadir akan membawa makna, menanamkan pelajaran, lalu meninggalkan kenangan yang tak kasat mata, namun abadi dalam ingatan dan pendewasaan. Dalam dinamika itulah, tentu penulis belajar bahwa setiap dukungan, sekecil apapun itu, adalah

bagian dari ketetapan yang telah ditakdirkan. Besar harapan penulis, semoga kebaikan yang telah ditanamkan, berbuah keberkahan, mengalir dalam hening cahaya, serta mengiringi setiap tapak langkah menuju kesuksesan yang kalian tempuh.

13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.* Sesuai dengan prinsip penulis bahwa “saya akan membawa mimpi itu kemanapun saya melangkah. Kita semua punya titik terendah kalau orang menyebutnya luka, saya menyebutnya pelajaran. Sesuatu yang saya jadikan pegangan hidup saya tanpa rasa malu, dan saya berharap mereka bisa melihat diri saya yang sesungguhnya, ada mimpi, cita-cita dan keinginan untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah digambarkan untuk saya”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional di kemudian hari.

Yogyakarta, 29 April 2026

Penulis,

Belinda Putri Nabilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	Masalah
.....1	
B. Rumusan	Masalah
.....3	
C. Artikel	Review
.....4	
D. Kerangka Teori.....	7
1. Hegemoni Budaya (Antonio Gramsci)	
.....8	
2. Instrumentalisasi Identitas (Paul R. Brass)	
.....10	
E. Argumen	Pokok
.....12	
F. Metode	Penelitian
.....13	
1. Jenis	Penelitian
.....13	
2. Teknik Pengumpulan Data	
.....13	

3. Teknik Analisis Data	14
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
H. Batasan Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	16

**BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM KASTA
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DI INDIA**

A. Sejarah Kasta di India	18
1. Asal Usul Sistem Kasta dalam Tradisi Hindu	19
2. Peran Agama serta Konsep <i>Karma</i> dan <i>Dharma</i> dalam Legitimasi Hierarki	25
3. Perkembangan Sistem Kasta pada Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan di India	31
4. Kebijakan afirmasi dan peran komisi mandal dalam mengurangi ketimpangan kasta di India	39
B. Pengaruh Kasta dalam Kehidupan Sosial Ekonomi	44
1. Keberlanjutan Kasta dalam Pendidikan, Pekerjaan, dan Mobilitas Sosial	44
2. Ketimpangan Ekonomi Berbasis Kasta serta Diskriminasi Sosial dan Kebijakan Afirmatif (Reservation System)	49
3. Adaptasi Kasta di Era Modern serta Perubahan Fungsi Kasta di Era Modernisasi dan Urbanisasi	52

BAB III ANALISIS POLITISASI SISTEM KASTA DI INDIA

A. Hegemoni Budaya dalam Agama Hindu	57
1. Agama Sebagai Sumber Legitimasi Politik	58

2. Produksi Konsensus dan Nasionalisasi Hierarki Sosial	67
3. Hindutva sebagai proyek hegemoni dalam demokrasi.....	79
B. Implementasi Kasta dalam Sistem Politik di India.....	88
1. Penggunaan Kasta dalam Partai Politik	89
2. Kasta dalam Pemilu India (2019–2024)	98

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kebijakan dan Dampak Pasca Kemerdekaan.....	35
Tabel II.2 Hubungan Kasta, Pendidikan, Pekerjaan, dan Mobilitas Sosial di India.....	47
Tabel III.1 Indikator Mobilitas Sosial dan Ketimpangan Kasta di India.....	76
Tabel III.2 Hasil Pemilu dan Konsolidasi Elektoral Bharatiya Janata Party (BJP).....	83
Tabel III.3 Strategi Penggunaan Kasta dalam Partai Politik India.....	97
Tabel III.4 Dinamika Peran Kasta dalam Pemilu India (2019–2024).....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Purusha Sukta dan Pembagian Varna Berdasarkan Tubuh Kosmis.....	21
Gambar II.2 Piramida Sistem Varna.....	24
Gambar II.3 Diagram Transformasi Sistem Kasta pada Masa Kolonial.....	32
Gambar II.4 Perbandingan Pengaruh Sistem Kasta Berdasarkan Wilayah di India.....	38
Gambar II.5 Alur Dampak Kebijakan Afirmasi terhadap Sistem Kasta di India.....	42
Gambar III.1 Proses Hegemoni Agama dalam Legitimasi Politik.....	61
Gambar III.2 Relasi Hegemoni Kultural antara RSS, BJP, dan Negara di India.....	63
Gambar III.3 Mekanisme Kerja Hegemoni dalam Perspektif Gramsci.....	68
Gambar III.4 Siklus Hierarki Reproduksi Kasta.....	72
Gambar III.5 Persepsi Publik tentang Hubungan Agama dan Identitas Nasional di India.....	86
Gambar III.6 Pemetaan Strategi Politik Berbasis Demografi Kasta di India.....	92

DAFTAR SINGKATAN

BJP	: <i>Bharatiya Janata Party</i>
RSS	: <i>Rashtriya Swayamsevak Sangh</i>
SKA	: <i>Safai Karmachari Andolan</i>
NCDHR	: <i>National Campaign on Dalit Human Rights</i>
ICERD	: <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
SC	: <i>Scheduled Castes</i>
ST	: <i>Scheduled Tributes</i>
OBC	: <i>Other Backward Classes</i>
IHDS	: <i>Indian Human Development Survey</i>
CAA	: <i>Citizenship Amandment Act</i>
BSP	: <i>Bahujan Samaj Party</i>
SP	: <i>Samajwadi Party</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem kasta di India merupakan struktur sosial historis yang telah membentuk organisasi masyarakat selama berabad-abad. Sistem ini tidak hanya mengatur pembagian kerja dan status sosial, tetapi juga menentukan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan politik. Meskipun Konstitusi India tahun 1950 melarang diskriminasi berbasis kasta, praktik hierarki sosial tersebut tetap memengaruhi distribusi sumber daya dalam masyarakat modern. Akar sistem ini berasal dari tradisi Hindu yang membagi masyarakat ke dalam *varna* dan *jati*, yang berfungsi mengatur pembagian kerja serta menentukan status sosial, akses pendidikan, dan sumber daya ekonomi (Deshpande, 2020). Meskipun dalam Pasal 15 dan 17 Konstitusi India secara tegas melarang diskriminasi berbasis kasta, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik tersebut tetap mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan kenyataan sosial yang berlangsung hingga kini, sehingga pelarangan hukum belum cukup untuk menghapus hierarki sosial yang dilembagakan selama ribuan tahun (Thorat, 2022).

Dalam kehidupan masyarakat India modern, sistem kasta masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pilihan pasangan hidup, pekerjaan, hingga akses terhadap fasilitas publik masih sangat dipengaruhi oleh latar belakang kasta. Misalnya, pernikahan lintas kasta hanya mencakup sekitar 5% dari total pernikahan di India dan sering menimbulkan resistensi sosial yang kuat (Banerjee, 2023). Ketimpangan ekonomi pun tampak signifikan pendapatan rata-rata rumah tangga dari kelompok Dalit dan Adivasi tercatat sekitar 30% lebih rendah dibandingkan kasta dominan (Singh, 2021). Dampak negatif diskriminasi kasta mencakup marginalisasi sosial, penurunan kualitas hidup, keterbatasan mobilitas ekonomi, serta gangguan kesehatan mental akibat stigma sosial (Sharma & Das, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif seperti *reservation system* belum sepenuhnya efektif dalam menghapus ketimpangan struktural yang diwariskan antar generasi.

Periode 2019–2024 memperlihatkan bagaimana sistem kasta bukan hanya bertahan, tetapi juga dimanfaatkan dalam politik elektoral. Pemerintahan Bharatiya Janata Party (BJP) memanfaatkan politik identitas berbasis agama dan kasta untuk memperkuat dukungan elektoral, khususnya di daerah pedesaan (Jaffrelot, 2021). Fenomena ini menciptakan paradoks dalam demokrasi India melalui prinsip kesetaraan yang menjadi dasar konstitusi justru digunakan untuk memperkuat eksklusivitas sosial dan mempertahankan kekuasaan politik (Gupta, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem kasta tidak lagi sekadar fenomena sosial, melainkan telah menjadi instrumen politik yang efektif dalam menjaga hierarki sosial di era demokrasi modern.

Dampak negatif diskriminasi kasta sangat luas, mencakup hambatan terhadap pembangunan manusia dan kohesi sosial. Ketidaksetaraan kesempatan menyebabkan rendahnya partisipasi ekonomi kelompok marginal, meningkatnya kemiskinan ekstrem, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara (Kumar & Shastri, 2020). Secara hukum, diskriminasi kasta dilarang karena bertentangan dengan prinsip *fundamental rights* dalam Konstitusi India dan melanggar berbagai perjanjian internasional seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) (United Nations, 2021). Namun, keberlanjutan praktik diskriminatif menunjukkan bahwa hukum saja tidak mampu menghapus ideologi hierarkis yang sudah melembaga secara kultural.

Faktor yang membuat sistem kasta dapat bertahan dan bahkan berkembang hingga saat ini adalah kombinasi antara warisan ideologi, kepentingan politik, dan struktur ekonomi. Melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, dapat dipahami bahwa dominasi sosial dalam sistem kasta dipertahankan bukan hanya melalui paksaan (*coercion*), tetapi juga melalui persetujuan sosial (*consent*) yang dilembagakan dalam budaya dan pendidikan (Still, 2021). Banyak masyarakat dari kasta bawah telah menginternalisasi ketidaksetaraan tersebut sebagai sesuatu yang alami (*common sense*), sehingga menurunkan kesadaran kritis terhadap hak-hak sosial mereka (Sato, 2024).

Selain tokoh klasik seperti Mahatma Gandhi dan B. R. Ambedkar,

perjuangan melawan diskriminasi kasta juga diteruskan oleh tokoh dan organisasi kontemporer. Tokoh seperti Bezwada Wilson melalui organisasi *Safai Karmachari Andolan* (SKA) sejak tahun 2000-an aktif menghapus praktik pembersihan manual yang menimpa kasta rendah (Rao, 2020). Organisasi lain seperti *National Campaign on Dalit Human Rights* (NCDHR) terus berjuang mengadvokasi kebijakan anti-diskriminasi dan memperjuangkan akses pendidikan serta ekonomi bagi masyarakat Dalit (NCDHR, 2022). Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan di India masih berlangsung dan bersifat lintas generasi.

Sejarah perjuangan sosial di India menunjukkan bahwa perubahan hukum dan kebijakan belum secara otomatis menghapus struktur hierarkis yang telah mengakar dalam masyarakat. Reformasi konstitusional dan kebijakan afirmatif memang berupaya menciptakan kesetaraan formal, namun dalam prakteknya, struktur sosial berbasis kasta tidak hanya bertahan, melainkan mengalami transformasi dalam konteks politik demokratis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan semata-mata pada keberlangsungan sistem kasta sebagai struktur sosial, tetapi pada bagaimana struktur tersebut diartikulasikan dan dimanfaatkan dalam arena kekuasaan.

Dalam demokrasi elektoral yang kompetitif, identitas sosial seperti kasta dapat berubah fungsi dari kategori sosial menjadi instrumen mobilisasi politik. Artinya, kasta tidak lagi hanya menjadi simbol hirarki tradisional, tetapi menjadi sumber legitimasi, basis konsolidasi suara, dan strategi distribusi kekuasaan. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi sosial yang bersifat kultural menuju instrumentalisasi politik yang bersifat strategis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji lebih dalam melalui penelitian ini, yaitu **“Mengapa terjadi politisasi sistem kasta di India?”**

C. Artikel Review

Artikel review ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana sistem kasta di India tidak hanya bertahan sebagai struktur sosial tradisional, tetapi juga mengalami transformasi menjadi instrumen politik dalam demokrasi kontemporer. Berbeda dari pendekatan yang melihat kasta semata-mata sebagai warisan historis, kajian ini menempatkan literatur terdahulu sebagai landasan untuk memahami proses reproduksi ideologis dan mobilisasi strategis yang menjadikan kasta relevan dalam praktik kekuasaan modern. Secara umum, studi-studi yang ditinjau menunjukkan bahwa kasta beroperasi dalam dua dimensi sekaligus yaitu sebagai struktur sosial yang dilegitimasi secara kultural dan sebagai sumber daya politik yang dapat dimanfaatkan dalam konteks elektoral.

Dari sisi teoritis, melalui artikelnya *Gramsci and South Asia: Common Sense, Religion and Political Society* menjelaskan bahwa konsep “*common sense*” dalam pemikiran Antonio Gramsci membantu memahami bagaimana nilai agama dan tradisi membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Dalam konteks India, ajaran seperti karma dan dharma tidak hanya berfungsi sebagai prinsip spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi moral atas hierarki sosial. Ketika stratifikasi sosial diterima sebagai bagian dari tatanan alamiah atau kehendak moral, maka sistem kasta memperoleh persetujuan sosial (*consent*) yang memperkuat keberlangsungannya (Patnaik, 2024). Dalam konteks politisasi, temuan ini penting karena menunjukkan bahwa mobilisasi kasta menjadi efektif justru karena beroperasi dalam kerangka kesadaran sosial yang telah menginternalisasi ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar.

Dimensi reproduksi ideologis tersebut diperluas oleh J. M. Paraskeva dalam artikelnya di *Educational Philosophy and Theory*, yang menekankan peran institusi pendidikan dalam reproduksi struktur sosial. Paraskeva menunjukkan bahwa kurikulum, praktik pedagogis, dan diskursus akademik dapat menormalisasi hierarki sosial secara tidak langsung. Dalam konteks India, pendidikan tidak bersifat netral, melainkan menjadi medium transmisi nilai dominan yang memperkuat legitimasi sosial atas struktur yang sudah ada. Dengan demikian, reproduksi nilai kasta tidak hanya terjadi dalam ranah agama dan tradisi, tetapi juga melalui institusi modern seperti sekolah dan universitas (Paraskeva, 2023). Proses

ini menciptakan fondasi ideologis yang stabil, yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam arena politik tanpa harus selalu menggunakan retorika hierarkis secara eksplisit.

Selanjutnya, dalam dimensi politik makro Christophe Jaffrelot melalui karyanya *Modi's India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy* menunjukkan bahwa nasionalisme Hindu di bawah pemerintahan Narendra Modi telah mengintegrasikan identitas agama dan sosial ke dalam strategi kekuasaan negara. Jaffrelot menjelaskan bahwa India menunjukkan kecenderungan menuju bentuk “*ethnic democracy*” di mana identitas mayoritas menjadi sumber utama legitimasi politik. Dalam kerangka ini, identitas sosial seperti kasta tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari arsitektur mobilisasi yang lebih luas berbasis komunitas mayoritas. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi legitimasi politik semakin terikat pada identitas kolektif tertentu (Jaffrelot, 2021).

Argumen mengenai demokrasi etnis dan penyempitan makna kesetaraan diperdalam oleh Ashutosh Varshney dalam *Journal of Democracy*. Varshney menjelaskan bahwa demokrasi dapat tetap mempertahankan mekanisme elektoral dan institusional, namun secara substantif mengalami erosi ketika identitas mayoritas dijadikan dasar legitimasi kekuasaan. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana mobilisasi identitas termasuk kasta dapat dilakukan secara sah dalam kerangka demokrasi tanpa secara formal melanggar konstitusi. Dengan kata lain, politisasi kasta tidak selalu tampil sebagai praktik diskriminatif terbuka, melainkan sebagai strategi representasi politik yang dibingkai dalam bahasa demokrasi dan partisipasi (Varshney, 2019).

Lebih lanjut pada tingkat praktik elektoral, dalam artikel Supriya Roy di *Studies in Indian Politics* menunjukkan bahwa elite politik secara aktif membangun koalisi berbasis identitas sosial melalui distribusi kandidat, representasi simbolik, dan strategi kampanye yang disesuaikan dengan komposisi sosial daerah pemilihan. Roy menegaskan bahwa identitas tidak bersifat statis, melainkan dinegosiasikan dan diaktifkan sesuai kebutuhan politik. Temuan ini memperjelas bahwa politisasi kasta merupakan hasil interaksi antara struktur sosial yang telah dilegitimasi secara hegemonik dan kalkulasi strategis elite dalam kompetisi

demokratis.

Secara keseluruhan, kelima sumber tersebut membentuk kerangka analisis yang saling melengkapi. Patnaik dan Paraskeva menjelaskan bagaimana legitimasi kasta direproduksi melalui agama dan pendidikan sedangkan Jaffrelot dan Varshney menunjukkan bagaimana identitas mayoritas memperoleh posisi sentral dalam demokrasi kontemporer, sementara Roy memperlihatkan bagaimana elite secara konkret memobilisasi identitas tersebut dalam praktik politik. Dengan demikian, sistem kasta di India dapat dipahami bukan hanya sebagai struktur sosial tradisional, tetapi sebagai identitas yang terus direproduksi secara ideologis dan sekaligus di instrumentalisasi dalam arena kekuasaan modern.

Secara konseptual, literatur yang telah ditinjau menunjukkan bahwa sistem kasta di India tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tradisi sosial yang bertahan secara pasif, melainkan sebagai struktur yang terus direproduksi melalui mekanisme ideologis dan institusional. Hegemoni budaya berperan dalam membentuk "*common sense*" yang menormalisasi hierarki sosial, sementara nasionalisme Hindu dan dinamika demokrasi elektoral menyediakan ruang baru bagi artikulasi identitas sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berhenti pada penjelasan mengenai reproduksi struktur dan legitimasi normatifnya, tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana struktur tersebut dioperasionalkan dalam praktik politik sehari-hari. Dengan kata lain, kasta sering diposisikan sebagai latar sosial, bukan sebagai variabel strategis dalam kompetisi kekuasaan.

Dari sisi metodologis, kecenderungan pendekatan makro dan historis dalam berbagai studi terdahulu juga membatasi analisis terhadap dinamika aktor dan strategi konkret yang dijalankan elite politik. Analisis berbasis hegemoni sering kali menekankan dominasi ideologis dan reproduksi nilai, tetapi kurang memberi ruang pada pembacaan mengenai kalkulasi politik, distribusi kandidat, pembentukan koalisi berbasis komunitas, serta penggunaan simbol dan narasi dalam kampanye elektoral. Padahal, dalam demokrasi yang kompetitif seperti India, identitas sosial termasuk kasta tidak hanya dilegitimasi secara kultural, tetapi juga dinegosiasikan dan dimobilisasi secara strategis untuk memperoleh dukungan

politik. Kekosongan inilah yang menunjukkan perlunya pendekatan yang mengintegrasikan dimensi struktural dengan analisis agensi elite secara lebih sistematis.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memposisikan diri pada persimpangan antara reproduksi hegemonik dan instrumentalisasi identitas dalam menjelaskan politisasi sistem kasta pasca-2019. Dengan menggabungkan kerangka hegemoni budaya dan pendekatan instrumentalis, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana elite politik tidak hanya memanfaatkan struktur sosial yang telah ada, tetapi juga secara aktif membentuk, mengemas, dan memobilisasi identitas kasta sebagai sumber legitimasi dan konsolidasi kekuasaan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan politisasi kasta sebagai hasil interaksi antara struktur ideologis yang mengendap dalam masyarakat dan strategi aktor politik dalam arena demokrasi kontemporer. Dengan demikian, artikel review ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap sistem kasta di India tidak lagi cukup berhenti pada pertanyaan mengenai keberlanjutan, melainkan harus bergeser pada analisis mengenai bagaimana dan untuk tujuan apa struktur tersebut dipolitisasi.

A. Kerangka Teori

Sistem kasta di India merupakan bentuk stratifikasi sosial historis yang tetap bertahan bukan semata-mata karena tradisi, tetapi karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi modern. Kasta tidak hanya mengatur status sosial, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi peluang ekonomi yang menghasilkan diskriminasi struktural dalam masyarakat kontemporer (Deshpande, 2011). Secara formal sistem ini berakar pada pembagian empat warna utama yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra serta kelompok di luar struktur tersebut yang kini dikenal sebagai Dalit. Namun dalam praktik sosial kasta beroperasi melalui ribuan jati yang secara konkret mengatur relasi perkawinan, jaringan sosial, dan akses terhadap pekerjaan. Struktur berbasis jaringan ini menjelaskan mengapa kasta tetap relevan bahkan di ruang urban modern, karena relasi sosial berbasis komunitas masih mempengaruhi peluang kerja dan mobilitas sosial (Vaid, 2020).

Lebih lanjut lagi penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi tidak secara otomatis menghapus pengaruh kasta dalam kehidupan ekonomi. Diskriminasi berbasis kasta tetap terjadi dalam pasar tenaga kerja modern melalui praktik eksklusi yang bersifat implisit maupun eksplisit. Bahkan ketika hukum telah melarang diskriminasi, mekanisme sosial berbasis jaringan dan stereotip tetap membatasi mobilitas kelompok Dalit dan kasta bawah lainnya (Thorat & Newman, 2010). Dalam konteks ini, kasta tidak dapat dipahami sebagai sisa sistem tradisional yang statis, melainkan sebagai struktur sosial yang bertransformasi dan beroperasi melalui institusi modern. Kasta di India abad ke-21 mengalami redefinisi dalam ruang demokrasi dan ekonomi pasar, tetapi tetap mempertahankan peran signifikan dalam menentukan distribusi kekuasaan dan sumber daya (Desai & Dubey, 2012). Oleh karena itu, untuk memahami eksistensi sistem kasta di India

masa kini, penting melihatnya sebagai struktur sosial yang dinamis yang terus bernegosiasi dengan institusi modern dan mempertahankan ketimpangan melalui adaptasi, bukan sekadar melalui warisan tradisi.

1. Hegemoni Budaya (Antonio Gramsci)

Konsep hegemoni budaya yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci merupakan salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam teori sosial dan politik modern. Penjelasan mendalam mengenai konsep ini dapat ditemukan dalam karya monumentalnya, *Prison Notebooks (Quaderni del Carcere)*. Gramsci menemukan bahwa dominasi kelas penguasa tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan koersif seperti militer, hukum, atau aparat negara, tetapi lebih halus dan efektif melalui mekanisme persetujuan sosial yang dibentuk oleh ideologi dan kebudayaan. Inilah yang disebut Gramsci sebagai hegemoni budaya kekuasaan yang diperoleh melalui kepemimpinan moral dan intelektual, bukan hanya melalui paksaan.

Menurut Gramsci, setiap masyarakat terdiri dari dua arena kekuasaan utama yaitu masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*).

Masyarakat politik meliputi lembaga-lembaga yang menggunakan paksaan, seperti negara, polisi, dan militer. Sementara masyarakat sipil mencakup lembaga-lembaga yang membentuk kesadaran, seperti sekolah, agama, media, dan keluarga. Bagi Gramsci, kekuasaan sejati justru bertumpu pada masyarakat sipil, karena di sanalah ideologi dominan ditanamkan, disebarkan, dan diterima sebagai "*common sense*" sehingga kelas penguasa mempertahankan dominasinya dengan menciptakan kondisi di mana nilai-nilai dan keyakinan mereka diterima oleh kelas bawah sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Misalnya, sistem nilai seperti "*Hard work is perceived as the inherently just and natural route to individual advancement*" atau "*The prevailing social hierarchy is understood as a naturalized or divinely sanctioned order*" merupakan bentuk internalisasi ideologi yang memperkuat stabilitas kekuasaan tanpa perlu menggunakan kekerasan langsung.

Dalam *Prison Notebooks*, Gramsci juga memperkenalkan konsep "*common sense*" (akal sehat) dan "*good sense*" (akal sehat kritis). *Common sense* adalah pandangan dunia sehari-hari yang terbentuk dari pengalaman sosial dan pengaruh ideologi dominan. Ia tampak alami dan rasional, padahal sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang mendukung kepentingan kelas penguasa. Sebaliknya, *good sense* adalah bentuk kesadaran kritis yang muncul ketika individu mulai menyadari bahwa "*accepted truth*" yang diterima umum sebenarnya mengandung kepentingan tertentu. Bagi Gramsci, membangun *good sense* melalui pendidikan politik dan kesadaran kelas adalah langkah penting dalam menciptakan hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) yang mampu menantang tatanan yang ada.

Dalam konteks ini, peran intelektual organik menjadi sangat penting. Gramsci membedakan antara intelektual tradisional mereka yang berfungsi mempertahankan ideologi dominan, seperti akademisi, pemuka agama, dan pejabat budaya dan intelektual organik, yaitu individu yang muncul dari kelas tertindas dan berjuang untuk membangun kesadaran kritis di antara rakyat. Intelektual organik tidak hanya berpikir, tetapi juga bertindak dalam kehidupan sosial untuk menyatukan teori dan praktik (*praxis*). Mereka membantu membentuk "*historic*

bloc” aliansi politik dan sosial yang mampu menghasilkan tatanan baru yang lebih adil. Dengan demikian bagi Gramsci, perjuangan revolusioner tidak hanya berupa perebutan kekuasaan negara, tetapi juga perebutan kesadaran masyarakat.

2. Instrumentalisasi Identitas (Paul R. Brass)

Teori instrumentalisasi identitas yang dikembangkan oleh Paul R. Brass menjelaskan

“ethnicity and nationalism are not ‘givens’ but are social and political constructions. They are creations of elites, who draw upon, distort, and sometimes fabricate materials from the cultures of the groups they wish to represent in order to protect their well-being or existence or to gain political and economic advantage for their groups as well as for themselves” (Brass, 1991).

yang berarti bahwa identitas sosial baik etnis, agama, maupun kasta tidak bersifat tetap atau alamiah, melainkan dapat dikonstruksi dan dimobilisasi secara strategis oleh elite politik untuk kepentingan kekuasaan (Brass, 1991). Dalam perspektif ini, identitas bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan sumber daya politik yang dapat diaktifkan ketika situasi politik memberikan insentif untuk melakukannya. Brass menekankan bahwa politisasi identitas terjadi melalui kompetisi elite yang menggunakan simbol, narasi historis, dan sentimen kolektif guna membangun solidaritas kelompok yang dapat dikonversi menjadi dukungan politik.

Pendekatan instrumentalis ini relevan dalam konteks demokrasi elektoral yang kompetitif seperti India. Dalam sistem multipartai, elite politik cenderung mencari basis dukungan yang stabil dan terorganisir sehingga identitas sosial yang memiliki jaringan solidaritas kuat seperti kasta yang menjadi instrumen mobilisasi efektif (Ahuja & Varshney, 2020). Identitas kasta menyediakan struktur sosial yang telah mengakar dalam masyarakat, sehingga dapat dengan mudah diartikulasikan sebagai dasar representasi politik dan distribusi kekuasaan.

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa dalam era pemerintahan Narendra Modi, mobilisasi identitas tidak hanya berbasis agama, tetapi juga melibatkan segmentasi sosial berbasis kasta sebagai strategi konsolidasi kekuasaan (Jaffrelot, 2021). Strategi tersebut mencerminkan praktik instrumentalisme sebagaimana dijelaskan oleh Brass, dimana elite memilih dan mengaktifkan kategori identitas tertentu yang dinilai paling menguntungkan dalam konteks elektoral. Identitas kasta tidak selalu dimobilisasi secara eksplisit sebagai sistem hirarki tradisional, tetapi direartikulasi sebagai bagian dari strategi representasi dan integrasi politik. Hal ini terlihat dari strategi Bharatiya Janata Party yang menonjolkan identitas Modi sebagai bagian dari kelompok OBC untuk membangun kedekatan politik dengan pemilih kasta menengah dan bawah, sekaligus meningkatkan distribusi kandidat dari kelompok OBC dan Dalit dalam Pemilu Lok Sabha 2014 dan 2019 di berbagai negara bagian strategis seperti Uttar Pradesh dan Bihar. Dengan demikian, kasta tidak lagi diposisikan semata sebagai struktur sosial tradisional, melainkan diubah menjadi instrumen representasi politik dan mobilisasi elektoral untuk memperluas basis dukungan partai dalam sistem demokrasi India (Heath & Tillin, 2022).

Dalam situasi tersebut, identitas kasta menjadi kategori yang rasional untuk dimanfaatkan karena memiliki legitimasi sosial yang telah terinternalisasi dalam masyarakat. Hal ini memperkuat argumen bahwa politisasi kasta bukan sekadar kelanjutan budaya tradisional, melainkan hasil kalkulasi strategis dalam arena kompetisi politik. Dalam penelitian ini, teori instrumentalisasi identitas digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem kasta di India diaktifkan sebagai instrumen politik oleh elite dalam konteks demokrasi pasca-2019. Perspektif Brass membantu mengidentifikasi siapa aktor yang memobilisasi identitas, bagaimana mekanisme mobilisasi dilakukan, serta untuk tujuan apa identitas tersebut digunakan. Dengan demikian, politisasi sistem kasta dipahami sebagai proses strategis yang melibatkan kompetisi elite dan kalkulasi kekuasaan, bukan sekadar reproduksi struktur sosial yang bersifat statis.

Teori ini melengkapi teori hegemoni budaya Antonio Gramsci yang digunakan sebagai kerangka utama dalam penelitian ini. Jika Gramsci menjelaskan

bagaimana dominasi legitimasi melalui pembentukan konsensus sosial dan internalisasi nilai dalam kesadaran kolektif, maka Brass menjelaskan bagaimana identitas tersebut secara aktif di instrumentalisasi dalam praktik kekuasaan (Brass, 1991). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai politisasi sistem kasta di India, baik dari dimensi mobilisasi elite maupun legitimasi ideologisnya.

A. Argumen Pokok

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, penelitian ini berpendapat bahwa politisasi sistem kasta di India terjadi karena identitas kasta digunakan secara sengaja oleh elite politik sebagai strategi untuk memenangkan dukungan dalam sistem demokrasi yang kompetitif, yang pada proses tersebut memperoleh legitimasi melalui mekanisme hegemoni budaya. Melalui teori hegemoni budaya Antonio Gramsci, dominasi politik dipahami tidak hanya dipertahankan melalui kekuasaan koersif, tetapi juga melalui pembentukan konsensus sosial yang membuat praktik tertentu tampak wajar dan sah secara moral. Dalam konteks India kontemporer, nilai religius dan nasionalisme Hindu direartikulasi dalam wacana politik melalui ideologi Hindutva yang dipromosikan oleh Bharatiya Janata Party (BJP) dan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sehingga mobilisasi identitas kasta dipersepsikan sebagai bentuk representasi sosial yang sah, bukan reproduksi ketimpangan struktural. Hal ini terlihat dari strategi politik Narendra Modi yang merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok *Other Backward Classes* (OBC) untuk memperoleh dukungan kasta menengah dan bawah dalam kerangka nasionalisme Hindu.

Argumen ini diperkuat oleh teori instrumentalisasi identitas Paul Brass yang menekankan bahwa identitas sosial dapat digunakan secara strategis untuk kepentingan politik. Dalam sistem demokrasi India yang kompetitif, elite memanfaatkan identitas kasta sebagai alat mobilisasi elektoral melalui distribusi kandidat dan penggunaan simbol religius. Hal ini terlihat pada strategi BJP yang membangun dukungan OBC dan Dalit dengan menempatkan kandidat dari kasta tertentu serta menggunakan narasi nasionalisme Hindu dalam kampanye politik.

Contohnya, Narendra Modi merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok OBC untuk memperoleh dukungan kasta menengah dan bawah. Dengan demikian, politisasi kasta merupakan hasil interaksi antara strategi elite dan proses hegemonik yang melegitimasi mobilisasi identitas kasta dalam demokrasi India modern.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam dinamika sosial, praktik politik, serta konstruksi wacana ideologis yang melatarbelakangi politisasi sistem kasta di India. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, interpretasi, dan perspektif aktor politik serta konteks sosial yang membentuk suatu fenomena secara komprehensif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap makna yang dikonstruksi individu atau kelompok terhadap persoalan sosial tertentu, sehingga sangat relevan untuk menganalisis interaksi antara struktur sosial, strategi elite, dan legitimasi ideologis dalam demokrasi (Creswell & Poth, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, termasuk kebijakan pemerintah, pidato politik, serta publikasi media yang berkaitan dengan isu kasta pada periode penelitian. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap dimensi diskursif dan ideologis yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memberikan kerangka analitis yang memadai untuk menjelaskan politisasi sistem kasta sebagai proses sosial dan politik yang kompleks.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi pemerintah India, laporan lembaga

swadaya masyarakat (LSM), laporan lembaga internasional, serta publikasi yang membahas dinamika politik identitas, nasionalisme Hindu, dan mobilisasi berbasis kasta pada periode 2019–2024. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pidato politik, manifesto partai, serta pemberitaan media sebagai bahan untuk menelusuri konstruksi wacana dan strategi politisasi identitas kasta dalam arena demokrasi India.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sistematis dalam kerangka kualitatif. Awalnya Data yang telah dikumpulkan melalui dokumen, pidato politik, laporan resmi, dan sumber media dibaca secara menyeluruh untuk memahami konteks dan substansinya. Selanjutnya peneliti melakukan proses klasifikasi dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, seperti mobilisasi identitas kasta, strategi elite politik, nasionalisme Hindu, dan legitimasi hegemonik. Setelah itu data yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul, sehingga dapat menjelaskan bagaimana politisasi kasta berlangsung dalam periode penelitian. Kemudian peneliti melakukan interpretasi dengan mengaitkan temuan empiris tersebut dengan kerangka teori yang digunakan, yaitu teori hegemoni budaya dan instrumentalisasi identitas, untuk melihat kesesuaian antara data dan argumentasi teoritis. Terakhir, hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan fenomena yang diamati secara sistematis dan menarik kesimpulan yang logis serta sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam alasan terjadinya politisasi sistem kasta di India pada periode 2019–2024 dalam konteks demokrasi elektoral kontemporer. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana identitas kasta tidak hanya bertahan sebagai struktur sosial historis, tetapi di instrumentalisasi secara strategis oleh elite politik sebagai alat mobilisasi dan konsolidasi kekuasaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara

mobilisasi identitas, pembentukan konsensus sosial, serta strategi politik yang menjadikan kasta sebagai sumber daya elektoral. Dengan demikian, fokus penelitian ini terletak pada bagaimana demokrasi modern di India justru menyediakan ruang kompetisi yang memungkinkan identitas kasta direproduksi dan dipolitisasi dalam praktik kekuasaan.

Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian politik identitas dan demokrasi di India dengan menawarkan analisis yang mengintegrasikan dimensi mobilisasi elite dan legitimasi ideologis dalam memahami politisasi kasta. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur Hubungan Internasional dan studi politik domestik dengan menunjukkan bagaimana struktur sosial tradisional dapat bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan dalam sistem demokrasi modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat sipil dalam memahami dinamika politik identitas dan dampaknya terhadap kohesi sosial serta kesetaraan dalam kehidupan politik India kontemporer.

D. Batasan Penelitian

Periode penelitian 2019–2024 dipilih karena dalam rentang waktu ini terjadi penguatan politik identitas yang semakin jelas dalam demokrasi India. Tahun 2019 menjadi titik awal yang penting karena kemenangan besar Bharatiya Janata Party (BJP) di bawah kepemimpinan Narendra Modi tidak hanya memperpanjang masa kekuasaan, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya penggunaan identitas kolektif baik agama maupun struktur sosial sebagai dasar legitimasi politik. Pada fase ini, identitas tidak lagi berada sebatas ranah sosial, melainkan secara aktif dimanfaatkan dalam strategi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi yang kompetitif, identitas dengan jaringan solidaritas yang kuat, seperti kasta, menjadi instrumen yang efektif untuk membangun dan mempertahankan dukungan elektoral. Oleh karena itu, tahun 2019 dipahami sebagai awal dari fase intensifikasi politisasi identitas yang semakin terintegrasi dalam praktik pemerintahan.

Sementara itu, tahun 2024 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena menandai berakhirnya satu siklus pemerintahan penuh setelah kemenangan 2019. Rentang waktu lima tahun ini memberikan ruang yang cukup untuk mengamati bagaimana strategi mobilisasi identitas dijalankan secara berkelanjutan, tidak hanya dalam kampanye pemilu, tetapi juga dalam distribusi kandidat, pembentukan koalisi politik, serta arah kebijakan publik. Pembatasan hingga 2024 juga menjaga fokus penelitian tetap pada dinamika politik kontemporer tanpa melebar ke periode historis yang terlalu luas. Dengan demikian, periode 2019–2024 memungkinkan analisis yang lebih terarah mengenai bagaimana sistem kasta mengalami pergeseran fungsi dari struktur sosial tradisional menjadi instrumen politik yang aktif dimobilisasi dalam demokrasi modern India.

E. Sistematika Penelitian

Berdasarkan poin-poin sebelumnya, penelitian ini akan diteliti dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Sejarah dan Pengaruh Kasta dalam kehidupan Sosial Ekonomi di India

Bab ini membahas secara komprehensif sejarah terbentuknya sistem kasta di India serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat hingga masa kontemporer. Pembahasan diawali dengan penelusuran asal-usul sistem kasta dalam struktur sosial India kuno, termasuk konsep *varna* sebagai pembagian hierarkis utama dan perkembangan *jati* sebagai unit sosial yang lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari, yang mengatur pola perkawinan, pembagian kerja, interaksi sosial, serta status sosial. Selanjutnya, bab ini menjelaskan bagaimana sistem kasta mengalami transformasi dari struktur religius-tradisional menjadi mekanisme sosial yang terus bertahan dan beradaptasi di tengah modernisasi, urbanisasi, serta perkembangan institusi negara modern. Analisis kemudian

difokuskan pada pengaruh kasta dalam menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemilikan sumber daya, dan mobilitas sosial, serta bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi masih dialami oleh kelompok-kelompok tertentu seperti Dalit, Adivasi, dan kasta marginal lainnya. Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa kasta tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai struktur yang secara nyata membentuk distribusi kesempatan, kesejahteraan, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat India modern.

BAB III : Analisis Politisasi Sistem Kasta di India

Bab ini membahas bagaimana sistem kasta di India dipolitisasi dalam dinamika demokrasi periode 2019–2024. Pada bab ini dijelaskan bagaimana elite politik menggunakan identitas kasta sebagai strategi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, misalnya melalui strategi kampanye, pembagian kandidat, dan penggunaan narasi serta simbol yang berkaitan dengan identitas sosial. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan bagaimana praktik tersebut dapat diterima oleh masyarakat melalui proses pembentukan opini, wacana, dan nilai-nilai yang dianggap wajar dalam kehidupan politik. Dengan demikian, Bab III menunjukkan bahwa politisasi sistem kasta terjadi karena adanya strategi elite yang memanfaatkan identitas sosial sekaligus adanya penerimaan masyarakat yang membuat praktik tersebut terus berlangsung dalam sistem demokrasi India.

BAB IV : Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian mengenai kasta dalam politik di India pada tahun 2019-2024.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM KASTA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DI INDIA

Sistem kasta di India merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan berpengaruh dalam membentuk struktur masyarakat, baik secara historis maupun kontemporer. Sistem ini tidak hanya mencerminkan pembagian sosial yang bersifat hierarkis, tetapi juga menunjukkan interaksi antara nilai budaya, agama, dan praktik sosial dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat India. Dalam perkembangannya, sistem kasta tidak dapat dipahami sebagai struktur yang statis, melainkan sebagai institusi sosial yang terus mengalami perubahan seiring dinamika sejarah, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap sejarah dan perkembangan sistem kasta diperlukan untuk menelusuri proses transformasi dari konsep awal yang bersifat normatif hingga menjadi struktur sosial yang kompleks dan terinstitusionalisasi.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti ajaran agama dan praktik sosial, serta faktor eksternal seperti kolonialisme, modernisasi, dan kebijakan negara. Pemahaman terhadap aspek historis ini penting untuk menjelaskan bagaimana sistem kasta mengalami rekonstruksi dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat India, baik pada masa tradisional maupun modern. Selain itu, sistem kasta juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam akses pendidikan, peluang kerja, distribusi sumber daya, dan mobilitas sosial antar kelompok. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan, sistem kasta masih berperan dalam membentuk struktur sosial ekonomi yang belum sepenuhnya setara. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif sejarah perkembangan sistem kasta serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi di India.

A. Sejarah Kasta di India

Sistem kasta merupakan salah satu struktur sosial yang paling berpengaruh dalam pembentukan tatanan masyarakat di India. Sejak periode awal

perkembangan peradaban India, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengaturan hubungan sosial yang membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok hierarki berdasarkan fungsi sosial, religius, dan ekonomi. Pembagian tersebut tidak hanya menentukan posisi sosial individu dalam masyarakat, tetapi juga mempengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, ekonomi serta relasi kekuasaan dalam kehidupan sosial.

Dalam tradisi Hindu, sistem kasta disebut sebagai konsep *varna*, yaitu klasifikasi sosial yang secara normatif dijelaskan dalam teks-teks keagamaan kuno seperti Rig Veda. Konsep ini kemudian berkembang dalam praktik sosial yang lebih kompleks melalui pembentukan berbagai kelompok *jati* yang menjadi dasar identitas sosial masyarakat India. Seiring perkembangan sejarah, sistem kasta tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial tradisional, tetapi juga mengalami transformasi dalam dinamika politik dan ekonomi modern. Untuk memahami bagaimana sistem kasta kemudian dapat dipolitisasi dalam konteks politik kontemporer, diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai dasar-dasar historis dan konseptual dari sistem tersebut.

1. Asal Usul Sistem Kasta dalam Tradisi Hindu

Sejarah sistem kasta dalam tradisi Hindu tidak dapat dipahami sebagai institusi tunggal yang statis, melainkan sebagai suatu proses evolusi sosial yang berkembang secara bertahap dalam perjalanan panjang masyarakat India. Pada masa awal peradaban Veda, struktur sosial belum sepenuhnya bersifat kaku, melainkan lebih menunjukkan pembagian berdasarkan fungsi dan peran sosial yang berkaitan dengan aktivitas religius, kekuasaan politik, kegiatan ekonomi, serta pelayanan dalam masyarakat. Sistem *varna* pada tahap ini cenderung bersifat fleksibel dan fungsional, di mana status sosial tidak sepenuhnya ditentukan oleh kelahiran, tetapi juga oleh pelaksanaan *dharma* dan kontribusi individu dalam kehidupan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat menuju fase Veda akhir dan periode pasca-Veda, pembagian ini mengalami institusionalisasi yang semakin kuat, terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, diferensiasi pekerjaan, serta konsolidasi kekuasaan politik, sehingga membentuk struktur

stratifikasi sosial yang lebih kompleks dan hierarkis. Dalam proses tersebut, sistem *varna* secara bertahap berkembang menjadi sistem kasta (*jati*) yang lebih rigid, di mana mobilitas sosial menjadi terbatas dan status individu semakin ditentukan oleh faktor keturunan (Jha, 1991).

Secara fundamental, sistem kasta ini berkembang secara bertahap melalui konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai *dharma* (kewajiban moral), pembagian kerja, dan legitimasi keagamaan yang tercatat dalam teks-teks kuno Hindu dan berbagai praktik masyarakat sepanjang sejarah (Goghari & Kusi, 2023). Konsep pembagian sosial dalam sistem *varna* juga memperoleh legitimasi religius melalui teks-teks suci Hindu, salah satunya dalam sloka *Purusha Sukta* yang terdapat dalam Rig Veda. Dalam sloka tersebut digambarkan bahwa struktur sosial masyarakat muncul secara simbolik dari tubuh kosmis *Purusha* sebagai representasi penciptaan dunia. Narasi ini memberikan dasar teologis bagi pembagian fungsi sosial dalam masyarakat Hindu dengan menempatkan setiap kelompok *varna* sebagai bagian dari tatanan kosmis yang saling melengkapi. Salah satu bagian yang paling sering dikutip dalam kajian akademik mengenai asal-usul sistem *varna* menyatakan:

*“When they divided the Purusha, into how many parts did they
arrange him? What was his mouth? What were his arms? What were
his thighs and feet called? The Brahmin was his mouth, the Kshatriya
made from his arms,
the Vaishya from his thighs, and the Shudra from his feet.”*

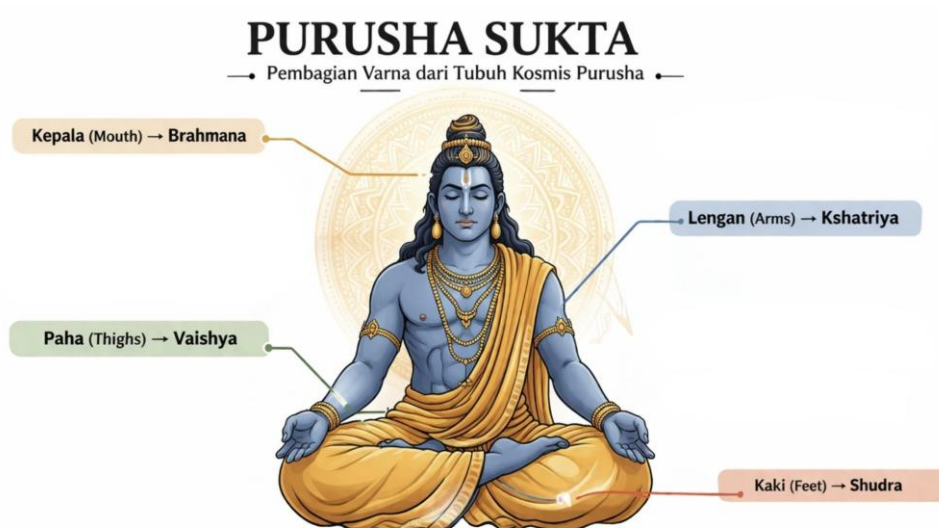
(Jamison & Brereton, 2014)

Konsep awal dari sistem ini dikenal sebagai *varna*, yaitu sebuah kerangka teori yang mengklasifikasikan masyarakat ke dalam empat tatanan utama yaitu Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Shudra. Kerangka ini pertama kali disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks Weda yang tertua, di mana setiap *varna* diposisikan sebagai bagian dari tubuh kosmik makhluk *Purusha* (*Purusha Sukta*). Brahmana dianggap lahir dari kepala *Purusha*, Kshatriya dari lengan, Vaishya dari paha, dan

Shudra dari kaki. Pemahaman ini memberikan legitimasi religius terhadap perbedaan tugas dan peran sosial dalam masyarakat (Goghari & Kusi, 2023). Brahmana yang berperan sebagai pendeta dan penjaga ritual keagamaan, Kshatriya sebagai prajurit dan pemimpin politik, Vaishya sebagai pedagang dan pengelola aktivitas ekonomi, serta Shudra sebagai pekerja manual atau pelayan sosial.

Dalam teks-teks Veda, Purusha Sukta menggambarkan asal muasal empat *varna* tersebut melalui metafora kosmik, sehingga pembagian itu mendapatkan legitimasi religius. Meski demikian, studi menyatakan bahwa dalam masa Veda awal, klasifikasi ini lebih bersifat fungsional dan tidak secara langsung menentukan status lahir secara rigid, tetapi lebih berdasarkan peranan *dharma* dan *karma* individu dalam masyarakat (Sharma, 2025). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep kosmologis dalam *Purusha Sukta* yang menjadi dasar pembagian *varna*, berikut disajikan ilustrasi yang merepresentasikan posisi masing-masing *varna* dalam tubuh kosmik Purusha. Ilustrasi ini membantu memahami bagaimana legitimasi religius terhadap stratifikasi sosial dikonstruksikan dalam tradisi Veda.

Gambar II.1 Purusha Sukta dan Pembagian Varna Berdasarkan Tubuh Kosmis



Sumber: Diolah berdasarkan Rig Veda 10.90 (*Purusha Sukta*)
(<https://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv10190.htm>)

Seiring perjalanan sejarah perkembangan masyarakat di India, terutama melalui proses kodifikasi norma dalam teks-teks hukum Hindu yang tercermin dalam literatur *Dharma-śāstra* seperti *Manusmriti*, konsep *varna* mengalami perubahan fungsi yang signifikan dari sekadar klasifikasi ideal yang bersifat normatif menjadi struktur sosial yang semakin terikat pada faktor keturunan. Pada tahap ini, pembagian masyarakat tidak lagi semata-mata didasarkan pada fungsi sosial atau peran yang dijalankan dalam tatanan masyarakat, melainkan mulai dipahami sebagai identitas sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Proses kodifikasi norma dalam teks hukum tersebut memberikan legitimasi terhadap pembentukan hierarki sosial yang lebih tegas, di mana kelompok yang berada pada lapisan atas memiliki akses yang lebih besar terhadap status ritual, pendidikan, serta kekuasaan politik dibandingkan dengan kelompok yang berada pada lapisan bawah (Sharma, 2025).

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem ini turut diperkuat oleh meningkatnya spesialisasi pekerjaan yang secara bertahap mengaitkan profesi tertentu dengan kelompok sosial tertentu, sehingga mobilitas sosial menjadi semakin terbatas. Selain itu, penerapan aturan mengenai kemurnian dan pencemaran sosial juga berperan dalam memperkuat pemisahan antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial, praktik keagamaan, maupun hubungan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi sosial yang pada awalnya berbasis pada fungsi pengabdian dalam masyarakat secara perlahan berubah menjadi stratifikasi sosial yang bersifat hereditas dan semakin terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat India (Sharma, 2025).

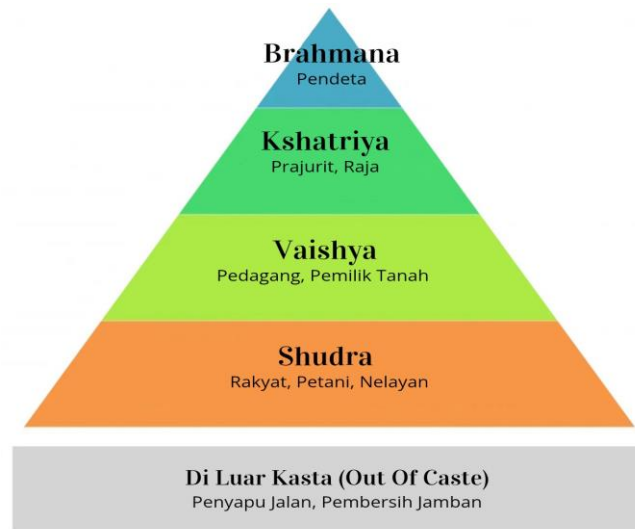
Dalam fase perkembangan berikutnya, konsep *varna* tidak berdiri sendiri sebagai klasifikasi sosial yang bersifat ideal, tetapi berinteraksi secara dinamis dengan *jati*, yaitu unit sosial yang lebih spesifik dan nyata dalam kehidupan masyarakat di India. Jika *varna* dipahami sebagai kerangka normatif yang membagi masyarakat ke dalam empat kategori besar berdasarkan fungsi sosial, maka *jati* merupakan kelompok sosial yang lebih kecil, konkret, dan beroperasi langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. *Jati* biasanya terbentuk

berdasarkan profesi yang diwariskan secara turun-temurun serta praktik endogami, yaitu pernikahan yang dilakukan di dalam kelompok sosial yang sama. Dalam praktiknya, *jati* berkembang menjadi ribuan kelompok sosial yang tersebar di berbagai wilayah India dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi pekerjaan, tradisi komunitas, adat lokal, maupun latar belakang geografis. Kondisi ini menyebabkan stratifikasi sosial di India tidak hanya bersifat vertikal sebagaimana tergambar dalam konsep *varna*, tetapi juga membentuk struktur sosial yang sangat kompleks dan berlapis. Dengan demikian, meskipun *varna* tetap menjadi konsep ideologis yang memberikan kerangka dasar pembagian sosial, *jati* berfungsi sebagai realitas sosial yang lebih konkret yang menentukan pola interaksi sosial, hubungan ekonomi, serta praktik kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (Goghari & Kusi, 2023).

Hubungan antara *varna* dan *jati* pada akhirnya membentuk sistem kasta yang dikenal dalam masyarakat India sebagai suatu struktur sosial yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem kasta dapat dipahami sebagai hasil perpaduan antara *varna* sebagai kerangka konseptual yang bersumber dari tradisi keagamaan dan *jati* sebagai mekanisme sosial yang berkembang melalui praktik masyarakat sepanjang sejarah. Dalam *Historical Origins of a Caste Society*, menegaskan bahwa gagasan tentang sistem kasta yang tetap sebenarnya merupakan hasil konstruksi yang telah “*created and recreated*” sepanjang perjalanan sejarah, yang mencerminkan dinamika geografis, budaya, dan politik yang berkembang di berbagai wilayah India (Bayly, 2008).

Seiring dengan berkembangnya persaingan antara kelompok-kelompok politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat, norma-norma yang berkaitan dengan kelahiran serta pekerjaan semakin diperkuat sebagai dasar penentuan status sosial. Proses ini secara bertahap membentuk sistem stratifikasi sosial yang semakin tertutup, di mana mobilitas sosial menjadi terbatas dan akses terhadap berbagai sumber daya penting seperti pendidikan, pekerjaan, serta posisi sosial sangat dipengaruhi oleh status sosial yang diwariskan dalam struktur kasta tersebut (Goghari & Kusi, 2023).

Gambar II.2 Piramida Sistem Varna



*Sumber: International Journal of Research and Analytical Reviews (2019).
(<https://www.ijrar.org/papers/IJRAR19J1693.pdf>)*

Aspek penting lainnya dalam sejarah perkembangan sistem kasta adalah keberadaan kelompok yang dikenal sebagai Dalit atau *untouchables*, yaitu komunitas yang secara historis diposisikan di luar struktur empat *varna* utama dalam masyarakat di India. Kelompok ini umumnya diasosiasikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dalam konstruksi sosial tradisional dianggap memiliki tingkat kemurnian ritual yang rendah atau bahkan “*polluting*”, seperti membersihkan limbah, membuang bangkai hewan, mengolah kulit, serta berbagai pekerjaan sanitasi yang secara sosial ditempatkan pada posisi paling bawah dalam struktur pekerjaan masyarakat. Posisi sosial tersebut tidak hanya mencerminkan pembagian kerja semata, tetapi juga berkaitan erat dengan konstruksi hierarki sosial yang telah berkembang lama dalam budaya kasta, di mana norma mengenai kemurnian dan pencemaran ritual memainkan peran penting dalam menentukan hubungan antar kelompok sosial.

Dalam kerangka ini, kelompok Dalit secara sistematis ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga mengalami pembatasan dalam interaksi sosial, akses terhadap ruang publik, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan Dalit sering dipandang sebagai representasi paling nyata

dari stratifikasi sosial yang terbentuk dalam sistem kasta, karena posisi mereka mencerminkan bagaimana struktur sosial yang hierarkis dapat memengaruhi distribusi status sosial, kesempatan hidup, serta partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat secara lebih luas (Goghari & Kusi, 2023).

Perkembangan sistem kasta juga dipengaruhi oleh kolonialisme Inggris. Ketika pemerintah kolonial melakukan sensus dan mendokumentasikan kategori sosial di India, struktur kasta yang sebelumnya lebih fleksibel menjadi dipetakan secara formal dan administratif. Upaya kolonial ini memodifikasi cara sistem kasta dipahami serta dipraktekkan oleh masyarakat India, sehingga hierarki sosial yang terkait dengan kasta semakin menguat secara sosial dan politis. Kategori sosial yang terlihat dalam sensus kolonial turut memperkuat gagasan stratifikasi kaku berdasarkan kelahiran (*birth*) yang kemudian menjadi warisan dalam studi dan kebijakan poskolonial (Bayly, 2008).

Secara keseluruhan, sejarah sistem kasta dalam tradisi Hindu mencerminkan sebuah evolusi panjang dari pembagian fungsi sosial yang normatif dalam Veda hingga menjadi suatu ikon stratifikasi sosial yang kompleks. Interaksi antara konsep *varna*, realitas *jati*, serta keterlibatan dinamika politik dan norma kolonial menunjukkan bahwa sistem kasta bukan semata struktur religius sempit, tetapi juga sebuah institusi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan, ideologi, dan praktik historis yang terus berubah. Pemahaman terhadap asal usul dan perkembangan sistem kasta penting dilakukan tidak hanya untuk pengetahuan historis akademik, tetapi juga untuk menganalisis dampak terus berlangsungnya stratifikasi sosial dalam masyarakat kontemporer India dan komunitas diaspora di seluruh dunia.

2. Peran Agama serta Konsep *Karma* dan *Dharma* dalam Legitimasi Hierarki

Ajaran agama tidak hanya menjadi landasan moral dan spiritual bagi pemeluknya, tetapi juga berfungsi sebagai legitimasi ideologis yang memperkuat *status quo* stratifikasi sosial. Dalam konteks ini, dua konsep utama yang memiliki posisi sentral dalam konstruksi religius tersebut adalah *karma* dan *dharma*. Konsep *karma* pada dasarnya merupakan doktrin sebab-akibat moral yang menyatakan bahwa setiap tindakan manusia akan menghasilkan konsekuensi tertentu yang

dapat dialami baik dalam kehidupan saat ini maupun dalam siklus kelahiran kembali berikutnya. Sementara itu, konsep *dharma* merujuk pada kewajiban moral dan sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu sesuai dengan posisi sosial, peran, serta tahapan kehidupan yang dimilikinya dalam masyarakat. Kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam membentuk kerangka religius yang memberikan makna terhadap tindakan manusia sekaligus mengatur perilaku individu agar tetap selaras dengan norma dan nilai yang diyakini dalam ajaran Hindu (Śruti, 2024).

Secara teoritis, konsep *karma* memberikan penjelasan religius yang memungkinkan individu memahami kondisi kehidupannya, termasuk posisi sosialnya dalam struktur kasta, sebagai konsekuensi dari tindakan moral yang dilakukan pada masa lalu. Pemahaman ini kemudian membentuk cara pandang bahwa kondisi sosial seseorang bukan semata hasil dari ketimpangan struktural, melainkan bagian dari proses moral dan spiritual yang memiliki keterkaitan dengan akumulasi tindakan sebelumnya. Dalam kerangka tersebut, struktur hierarki sosial yang pada awalnya dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial justru dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang “*cosmically just*”, karena diyakini sebagai hasil dari hukum moral universal yang mengatur kehidupan manusia. Perspektif ini turut memperkuat penerimaan terhadap sistem kasta dalam masyarakat, karena individu cenderung memandang posisi sosialnya sebagai bagian dari konsekuensi spiritual yang harus diterima. Dalam kajian psikologi sosial, konsep *karma* bahkan dianalisis sebagai salah satu bentuk legitimasi ideologis yang dapat mempengaruhi dukungan individu terhadap sistem kasta, karena interpretasi moral yang terkandung dalam konsep tersebut menjadikan stratifikasi sosial dipahami sebagai konsekuensi spiritual dari tindakan manusia pada masa sebelumnya (Cotterill et al., 2014).

श्रेयान्स्वधर्मं विगुणः परधर्मात्
स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मं निधनं
श्रेयः परधर्म भयावहः ॥ ३.३५ ॥

śreyān sva-dharmo viguṇaḥ para-dharmāt svanuṣṭhitāt |

sva-dharme nidhanam śreyah para-dharmo bhayāvahah ||

“Lebih baik menjalankan dharma (kewajiban) sendiri meskipun tidak sempurna, daripada menjalankan dharma orang lain dengan sempurna. Lebih baik mati dalam menjalankan dharma sendiri, karena menjalankan dharma orang lain membawa bahaya”.

(Bhagavad Gita, 3.35)

Sloka ini menekankan bahwa menjalankan *svadharma* (kewajiban pribadi atau peran sosial seseorang) lebih baik daripada menjalankan tugas orang lain, meskipun dilakukan dengan sempurna. Dalam konteks sosial dan religius, ajaran ini sering ditafsirkan sebagai dorongan untuk menjalankan peran sesuai posisi dan kewajiban yang dimiliki dalam masyarakat. *Dharma* memberikan justifikasi normatif terhadap peran sosial tertentu dalam struktur kasta. Dalam tradisi Hindu, setiap *varna* memiliki *dharma* kewajiban moral yang terkait dengan tugas khusus sosial dan religius (Śruti, 2024).

Brahmana dibebani dengan tugas ritual, pendidikan, dan penjagaan ajaran suci sementara, Kshatriya bertanggung jawab atas keamanan dan pemerintahan sedangkan, Vaishya menjalankan fungsi ekonomi dan Shudra berkewajiban dalam pelayanan sosial. Idealnya, *dharma* menjadi prinsip pemersatu yang menjamin keteraturan sosial bila masing-masing kelompok menunaikan kewajibannya. Pandangan ini tertuang dalam literatur Hinduisme klasik, dimana memenuhi *svadharma* (*dharma* pribadi sesuai *varna*) dianggap sebagai langkah spiritual utama dan kunci keseimbangan moral dalam tatanan masyarakat. Kedua konsep ini yaitu *karma* dan *dharma* dipandang tidak hanya sebagai ajaran metafisik, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mendukung legitimasi sosial hierarki (Śruti, 2024).

Artinya, ajaran agama berfungsi untuk “*inculcate*” nilai norma spiritual ke dalam struktur sosial sehingga perbedaan status dan akses sosial tidak dipandang sekadar sebagai hasil penindasan luar, tetapi sebagai bagian dari tatanan moral universal yang ditentukan oleh hukum moral kosmik (*karma*) dan kewajiban memenuhi tugas sosial (*dharma*). Hal ini menciptakan kondisi di mana baik

individu maupun komunitas cenderung menerima perbedaan posisi sosial sebagai sesuatu yang wajar dalam lintasan spiritual mereka (Śruti, 2024).

Peran agama dalam sistem kasta tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif yang bersifat statis, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas struktur sosial melalui proses internalisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di India. Dalam kerangka ajaran Hindu, keyakinan terhadap konsep *karma* membentuk cara pandang bahwa kondisi sosial seseorang, termasuk ketimpangan atau posisi dalam hierarki kasta, merupakan konsekuensi moral dari tindakan yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya.

Pandangan ini memiliki implikasi sosial yang signifikan karena individu cenderung menerima kondisi sosialnya sebagai bagian dari hukum moral kosmis yang tidak dapat dihindari. Dalam perspektif sosiologis, mekanisme ini sering dipahami melalui konsep “*theodicy of privilege*”, yaitu pembenaran religius terhadap ketimpangan sosial yang membuat struktur hierarki tampak sah secara moral serta dipersepsikan sebagai bagian dari keteraturan kosmis yang harus dipertahankan. Dengan demikian, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi ideologis yang membantu menjelaskan dan menstabilkan struktur sosial yang hierarkis dalam masyarakat (Fuller, 2019).

चातुव य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः ।

तस्य कर्ता रमण्यं मां विद्ध्यकर्ता रमय्यम् ॥ ४.१३ ॥

cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma

vibhāgaśaḥ | tasya kartāram api mām

viddhy akartāram avyayam ||

“Aku menciptakan empat *varna* berdasarkan pembagian sifat (guna) dan pekerjaan (karma). Meskipun Aku adalah penciptanya, ketahuilah bahwa Aku tidak terikat pada tindakan dan bersifat abadi”.

(Bhagavad Gita, 4.13)

Sloka ini menjelaskan bahwa pembagian empat *varna* dalam masyarakat

(Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra) dipahami dalam teks Hindu klasik sebagai pembagian berdasarkan *dharma* (kualitas sifat) dan *karma* (tindakan atau pekerjaan). Selain konsep *karma*, konsep *dharma* juga memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas sistem kasta dengan memastikan bahwa setiap kelompok sosial memiliki kewajiban moral yang dianggap selaras dengan tatanan kosmis. *Dharma* dipahami sebagai kewajiban etis dan sosial yang melekat pada posisi seseorang dalam struktur masyarakat, sehingga setiap individu diharapkan menjalankan peran sosialnya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dalam tradisi religius.

Dalam kerangka ini, pelaksanaan *dharma* seringkali dikaitkan dengan terciptanya harmoni sosial serta keseimbangan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini kemudian diperkuat melalui berbagai praktik ritual dan upacara keagamaan dalam tradisi Hindu, seperti *yajna* (ritual persembahan) dan *samskara* (upacara siklus hidup), yang secara simbolis menegaskan peran sosial masing-masing kelompok dalam struktur masyarakat. Dalam praktik ritual tersebut, kelompok tertentu terutama Brahmana memiliki peran yang lebih dominan dalam memimpin upacara dan menjaga kesinambungan tradisi keagamaan, sehingga secara tidak langsung memperkuat posisi simbolik mereka dalam struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi religius terhadap sistem kasta tidak hanya hadir sebagai gagasan normatif dalam ajaran agama, tetapi juga direproduksi secara terus-menerus melalui praktik sosial dan ritual keagamaan yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai keteraturan hierarki sosial (Jaffrelot, 2021).

Kedua konsep tersebut juga berinteraksi secara langsung dalam pembentukan identitas moral dan sosial individu dalam masyarakat Hindu di India. Dalam kerangka ajaran Hindu, individu tidak hanya memahami kehidupan sebagai rangkaian pengalaman sosial yang bersifat material, tetapi juga sebagai proses spiritual yang dipengaruhi oleh konsekuensi moral dari tindakan masa lalu. Konsep *karma* memberikan kerangka bagi individu untuk menilai pengalaman hidupnya, termasuk keberhasilan, penderitaan, maupun posisi sosial yang dimiliki dalam struktur masyarakat. Ketika seseorang memahami bahwa kondisi sosialnya

merupakan manifestasi dari akumulasi tindakan moral pada kehidupan sebelumnya, maka pengalaman ketimpangan sosial tidak selalu dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural, melainkan sebagai bagian dari mekanisme moral yang harus diterima dan dijalani. Dalam konteks ini, pemenuhan *dharma* sebagai kewajiban moral yang sesuai dengan posisi sosial individu menjadi sarana untuk menjaga keteraturan spiritual sekaligus sosial. Dengan demikian, *karma* dan *dharma* berfungsi tidak hanya sebagai doktrin religius, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang membentuk cara individu memahami dirinya sendiri dalam hubungan dengan struktur sosial yang lebih luas (Śruti, 2024).

Lebih lanjut, internalisasi kedua konsep tersebut dalam kehidupan sosial memperlihatkan bagaimana ajaran agama dapat berperan dalam mempertahankan legitimasi struktur sosial yang hierarkis. Ketika masyarakat secara kolektif menerima bahwa posisi sosial merupakan hasil dari proses moral yang lebih luas, maka struktur sosial yang tidak setara dapat dipandang sebagai bagian dari tatanan kosmis yang memiliki justifikasi spiritual. Dalam banyak komunitas Hindu tradisional, pemahaman ini terintegrasi dalam praktik sosial sehari-hari, termasuk dalam pola interaksi sosial, pembagian peran komunitas, serta dalam berbagai ritual dan norma kehidupan kolektif. Proses internalisasi tersebut memperkuat keberlangsungan sistem kasta karena nilai-nilai religius yang terkait dengan *karma* dan *dharma* tidak hanya diajarkan sebagai konsep teologis, tetapi juga dipraktikkan sebagai pedoman etika dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, agama dalam konteks ini berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif yang memberikan landasan moral bagi keberlanjutan struktur kasta, baik melalui simbolisme religius maupun melalui praktik sosial yang terus mereproduksi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat (Fuller, 2019). Prinsip legitimasi religius ini juga menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan mengapa struktur kasta mampu bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena nilai-nilai yang menopangnya tidak hanya berasal dari norma sosial, tetapi juga dari keyakinan spiritual yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat (Jaffrelot, 2021).

3. Perkembangan Sistem Kasta pada Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan

Di India Perubahan penting dalam sejarah sistem kasta di India tidak hanya terjadi sejak periode kuno, tetapi mengalami transformasi yang semakin signifikan terutama pada masa kolonial Inggris dan berlanjut hingga periode pasca kemerdekaan. Dalam kajian ilmiah kontemporer, sistem kasta tidak lagi dipahami sebagai struktur sosial yang bersifat tetap sejak lahirnya agama Hindu, melainkan sebagai fenomena sosial yang dinamis dan terus mengalami perubahan dalam konteks interaksi politik, ekonomi, dan administratif yang lebih luas. Sejak kedatangan dan dominasi Inggris di India, terjadi pergeseran mendasar dalam cara struktur sosial masyarakat dipahami dan dikelola. Struktur sosial yang sebelumnya relatif fleksibel dan kontekstual dalam praktik lokal di mana identitas jati dapat dipengaruhi oleh faktor profesi, wilayah, dan relasi sosial secara bertahap mengalami proses kodifikasi melalui mekanisme pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial menerapkan sensus sosial yang sistematis serta klasifikasi kategoris terhadap kelompok masyarakat berdasarkan identitas kasta, yang kemudian dijadikan dasar dalam berbagai aspek administrasi negara, seperti rekrutmen birokrasi, pengaturan pajak, hingga sistem hukum (Sagar & Matolia, 2025). Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya kolonial dalam menciptakan keteraturan sosial yang sesuai dengan kepentingan pemerintahan mereka, sehingga menghasilkan penyederhanaan terhadap kompleksitas struktur sosial India. Akibatnya, sistem kasta yang sebelumnya bersifat lebih cair berubah menjadi struktur yang lebih kaku, terstandarisasi, dan terdokumentasi secara formal, yang pada akhirnya memperkuat hierarki sosial serta membatasi mobilitas sosial masyarakat dalam jangka panjang.

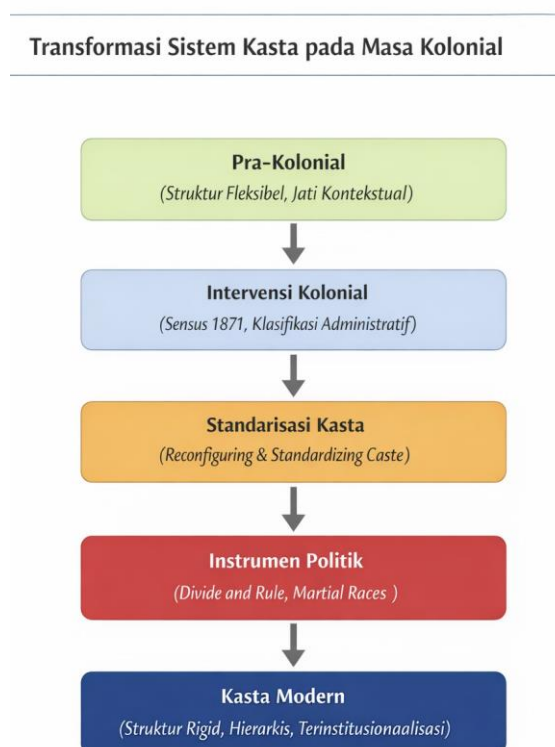
a. Perkembangan kasta pada masa kolonial

Perkembangan sistem kasta pada masa kolonial Inggris menunjukkan transformasi mendasar dari struktur sosial yang sebelumnya relatif fleksibel menjadi sistem yang lebih kaku dan terinstitusionalisasi. Pada periode pra-kolonial, identitas sosial berbasis jati cenderung bersifat kontekstual dan dapat berubah mengikuti dinamika lokal seperti profesi, wilayah, dan hubungan sosial. Namun, sejak masuknya kekuasaan kolonial Inggris, terjadi perubahan paradigma dalam memahami dan mengelola masyarakat India. Pemerintah kolonial tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif membentuk struktur sosial melalui berbagai kebijakan administratif yang sistematis, terutama melalui sensus penduduk yang dimulai sejak tahun 1871 (Sagar & Matolia, 2025). Melalui sensus ini, masyarakat dipaksa untuk mengidentifikasi diri dalam kategori

kasta tertentu, sehingga identitas sosial yang sebelumnya cair berubah menjadi identitas tetap (fixed identity) yang diakui secara resmi oleh negara.

Untuk memahami secara lebih sistematis proses transformasi sistem kasta pada masa kolonial, diperlukan suatu kerangka visual yang dapat menggambarkan tahapan perubahan tersebut secara kronologis. Sebagaimana telah dijelaskan, intervensi kolonial tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat India secara mendasar melalui proses klasifikasi, standarisasi, dan politisasi identitas kasta. Oleh karena itu, diagram berikut disajikan untuk memperjelas alur perubahan sistem kasta dari kondisi pra-kolonial yang relatif fleksibel hingga menjadi struktur sosial yang rigid dan terinstitusionalisasi pada masa kolonial.

Gambar II.3 Diagram Transformasi Sistem Kasta pada Masa Kolonial



Sumber: Diolah berdasarkan Sagar & Matolia (2025)
(<https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691088955/castes-of-mind>)

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi sistem

kasta berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pada tahap awal, struktur sosial yang bersifat fleksibel mengalami perubahan signifikan akibat intervensi kolonial melalui sensus dan klasifikasi administratif. Proses ini kemudian berkembang menjadi standarisasi identitas kasta yang memperkuat hierarki sosial. Selanjutnya, sistem kasta dimanfaatkan sebagai instrumen politik dalam strategi kolonial seperti *divide and rule*, yang semakin memperdalam fragmentasi sosial. Contoh konkretnya terlihat pada kebijakan sensus kolonial Inggris sejak tahun 1871 yang mengklasifikasikan masyarakat India ke dalam kategori kasta yang tetap dan hierarkis, serta pemberian representasi politik terpisah bagi kelompok tertentu pada masa pemerintahan kolonial. Kebijakan tersebut mendorong persaingan antar kelompok kasta dan memperkuat identitas sosial yang sebelumnya lebih cair. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut menghasilkan sistem kasta modern yang lebih kaku, hirarkis, dan terinstitusionalisasi. Dengan demikian, diagram ini menegaskan bahwa sistem kasta pada masa kolonial merupakan hasil konstruksi sosial-politik yang kompleks, bukan sekadar kelanjutan dari tradisi masa lalu.

Lebih lanjut, proses klasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak bersifat netral, melainkan didasarkan pada kebutuhan administratif dan kepentingan politik. Kasta dikonstruksi sebagai kategori sosial yang baku dan seragam di seluruh wilayah India, meskipun pada kenyataannya struktur sosial lokal sangat beragam. Proses ini menciptakan simplifikasi terhadap kompleksitas sosial masyarakat India dengan memasukkan berbagai kelompok *jati* ke dalam kerangka yang lebih sempit dan terstandarisasi (Dirks, 2001). Dengan demikian, sistem kasta tidak lagi sekadar mencerminkan realitas sosial, tetapi menjadi produk dari konstruksi kolonial yang memaksakan keteraturan administratif atas keragaman sosial.

Dalam perspektif kajian pascakolonial, fenomena ini dikenal sebagai proses *reconfiguring* dan *standardizing caste*, yaitu upaya untuk membentuk ulang dan membakukan identitas sosial agar sesuai dengan logika pemerintahan kolonial. Jaffrelot (2021) menyatakan bahwa sistem kasta modern merupakan hasil dari "*colonial modernity*", di mana identitas lokal yang sebelumnya bersifat fleksibel

diubah menjadi kategori nasional yang kaku dan hierarkis. Selain itu, pengetahuan orientalis yang digunakan oleh kolonial Inggris yang banyak merujuk pada teks-teks klasik seperti Weda dan Manusmriti turut memperkuat interpretasi yang menyederhanakan realitas sosial menjadi empat *varna*, padahal dalam praktiknya sistem *jati* jauh lebih kompleks. Hal ini menunjukkan adanya distorsi dalam memahami masyarakat India.

Selain melalui mekanisme pengetahuan dan administrasi, sistem kasta juga dimanfaatkan sebagai instrumen politik dalam strategi *divide and rule*. Pemerintah kolonial secara sadar memanfaatkan perbedaan sosial untuk mencegah terbentuknya solidaritas kolektif yang dapat mengancam kekuasaan mereka. Salah satu bentuk nyata dari strategi ini adalah penerapan teori *martial races*, di mana kelompok tertentu dianggap lebih unggul secara fisik dan lebih layak direkrut dalam militer kolonial berdasarkan stereotip kasta dan etnis (Kumar, 2019). Di sisi lain, akses terhadap posisi birokrasi dan sumber daya ekonomi juga didistribusikan secara tidak merata berdasarkan kategori sosial yang telah dikodifikasi, sehingga memperkuat ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan sistem kasta pada masa kolonial tidak dapat dipahami hanya sebagai kelanjutan dari tradisi masa lalu, tetapi sebagai hasil dari intervensi aktif kekuasaan kolonial dalam membentuk struktur sosial. Melalui sensus, klasifikasi administratif, produksi pengetahuan, serta strategi politik, sistem kasta mengalami transformasi menjadi struktur yang lebih rigid, hierarkis, dan terinstitusionalisasi dibandingkan periode sebelumnya (Bayly, 2008). Proses ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya mempengaruhi aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk ulang identitas sosial masyarakat India secara mendalam dan berkelanjutan hingga masa modern.

b. Perkembangan kasta pada masa pasca kolonial

Pasca kemerdekaan India pada tahun 1947, negara menghadapi tantangan besar dalam merombak struktur sosial yang telah lama dipengaruhi oleh sistem kasta yang hierarkis dan diskriminatif. Dalam konteks ini, para pendiri bangsa India, khususnya Dr. B.R. Ambedkar sebagai arsitek utama konstitusi, menempatkan prinsip kesetaraan sebagai fondasi utama dalam pembangunan

negara modern. Sistem kasta yang sebelumnya dilegitimasi oleh tradisi sosial dan praktik kolonial dipandang sebagai hambatan utama dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan egaliter. Oleh karena itu, negara berupaya secara sistematis mengurangi ketimpangan sosial melalui pendekatan konstitusional yang komprehensif dan terintegrasi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antara kebijakan negara dan dampaknya terhadap struktur sosial pasca kemerdekaan, diperlukan penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel berikut merangkum berbagai kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah India, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan dalam konstitusi serta kebijakan afirmatif, beserta dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keterkaitan antara intervensi negara dan perubahan yang terjadi dalam sistem kasta di India.

Tabel II.1 Kebijakan dan Dampak Pasca Kemerdekaan

Aspek	Kebijakan Negara	Dampak
Hukum	Pasal 14, 15, 16	Kesetaraan formal dijamin
Pendidikan	Kuota SC/ST/OBC	Akses meningkat
Politik	Reservasi kursi parlemen	Representasi meningkat
Sosial	Larangan diskriminasi	Diskriminasi menurun (tidak hilang)
Ekonomi	Afirmasi terbatas	Ketimpangan masih ada

Sumber: Diolah penulis berdasarkan dan Jaffreot (2024).
 (<https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691206809/modis-india>)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah India pasca kemerdekaan telah memberikan kontribusi penting dalam mengurangi ketimpangan sosial yang disebabkan oleh sistem kasta. Meskipun secara formal prinsip kesetaraan telah dijamin melalui konstitusi dan kebijakan afirmatif telah meningkatkan akses serta representasi kelompok marginal, dalam praktiknya dampak kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi yang telah mengakar. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi sistem kasta tidak hanya bergantung pada kebijakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan struktural yang lebih luas, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa upaya negara dalam mengatasi ketimpangan kasta merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan.

Konstitusi India secara eksplisit menjamin prinsip kesetaraan melalui Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 yang menjadi dasar hukum utama dalam melawan diskriminasi berbasis kasta. Pasal 14 menegaskan prinsip *equality before the law*, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 15 secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir, sekaligus membuka ruang bagi negara untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang secara historis terpinggirkan. Sementara itu, Pasal 16 menjamin kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan publik serta mengizinkan penerapan kebijakan afirmatif bagi kelompok tertentu guna menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar kesetaraan formal (Deshpande, 2019). Dengan demikian, konstitusi India tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga progresif dalam mengakomodasi ketimpangan sosial yang telah mengakar.

Implementasi dari prinsip-prinsip konstitusional tersebut diwujudkan melalui kebijakan *reservation system* atau sistem kuota yang ditujukan bagi kelompok Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), dan Other Backward Classes (OBC). Kebijakan ini mencakup alokasi kursi dalam institusi pendidikan, pekerjaan sektor publik, serta representasi politik di parlemen dan pemerintahan

daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengoreksi ketimpangan historis akibat diskriminasi berbasis kasta dan memberikan peluang mobilitas sosial bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan (Jaffrelot, 2021). Dalam praktiknya, kebijakan ini telah meningkatkan akses pendidikan dan partisipasi politik kelompok marginal, sehingga menciptakan perubahan signifikan dalam struktur sosial India.

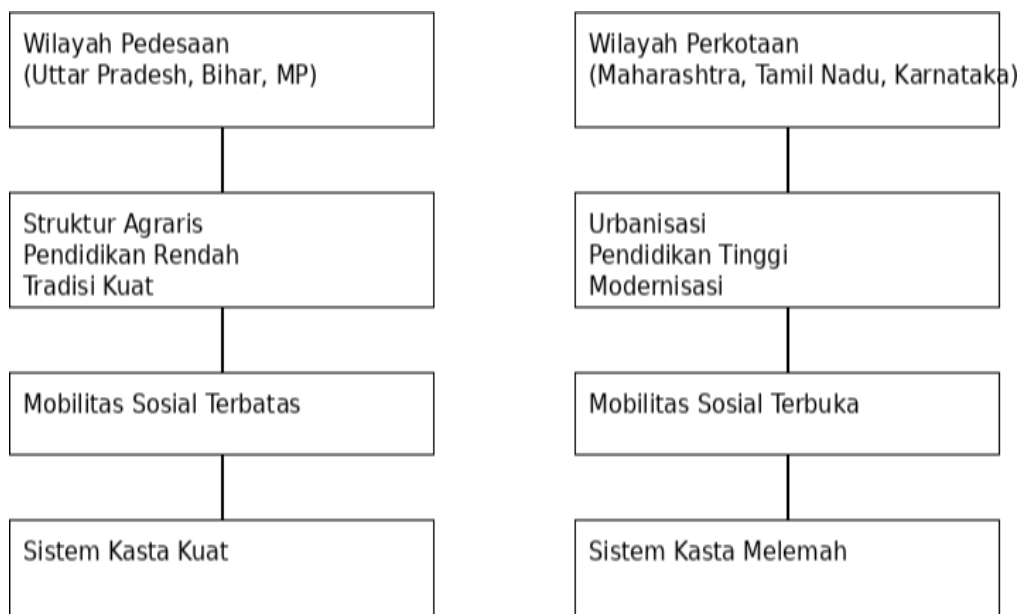
Namun demikian, efektivitas kebijakan afirmatif ini masih menjadi perdebatan dalam kajian akademik. Meskipun telah berhasil meningkatkan representasi kelompok marginal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi masih tetap bertahan, terutama dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, kualitas pendidikan, dan kesempatan kerja di sektor swasta (Deshpande, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi kasta tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga tertanam dalam praktik sosial dan budaya sehari-hari. Oleh karena itu, penghapusan sistem kasta tidak cukup hanya melalui kebijakan hukum, tetapi memerlukan perubahan struktural yang lebih luas dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan transformasi budaya.

Selain itu, periode pasca kemerdekaan juga ditandai dengan munculnya politik identitas berbasis kasta yang semakin kuat. Kelompok Dalit dan kasta bawah mulai mengorganisasi diri dalam bentuk gerakan sosial dan partai politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem demokrasi India. Fenomena ini menunjukkan bahwa kasta tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial tradisional, tetapi juga sebagai identitas politik yang strategis dalam memperoleh kekuasaan dan representasi (Deol, 2023). Dalam konteks ini, kasta mengalami transformasi dari sistem stratifikasi sosial menjadi alat mobilisasi politik yang signifikan dalam demokrasi modern India.

Lebih lanjut, pengaruh sistem kasta dalam masyarakat pasca kemerdekaan juga menunjukkan variasi geografis yang signifikan. Di wilayah pedesaan, khususnya di negara bagian seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Madhya Pradesh, sistem kasta masih sangat kuat karena didukung oleh struktur ekonomi agraris, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya norma sosial tradisional seperti endogami. Sebaliknya, di wilayah perkotaan dan daerah yang lebih maju secara

ekonomi seperti Maharashtra, Tamil Nadu, dan Karnataka, pengaruh kasta cenderung melemah akibat urbanisasi, industrialisasi, dan meningkatnya akses terhadap pendidikan (Jaffrelot, 2021). Dengan demikian, meskipun negara telah berupaya menghapus diskriminasi kasta secara formal, dalam praktiknya sistem ini masih bertahan dan beradaptasi dalam berbagai bentuk di masyarakat modern India. Untuk memperjelas perbedaan pengaruh sistem kasta di berbagai wilayah India pasca kemerdekaan, diperlukan penyajian dalam bentuk tabel komparatif. Tabel berikut menggambarkan perbedaan karakteristik antara wilayah pedesaan dan perkotaan dalam kaitannya dengan kekuatan sistem kasta, faktor penyebab, serta implikasi sosial yang ditimbulkan. Penyajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem kasta tidak bersifat homogen, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing wilayah.

Gambar II.4 Perbandingan Pengaruh Sistem Kasta Berdasarkan Wilayah di India



Sumber: Diolah penulis berdasarkan Jaffrelot (2021)
<https://global.oup.com/academic/product/caste-and-politics-in-india-9780190129146>

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pengaruh sistem kasta di India pasca kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh konteks geografis dan tingkat perkembangan wilayah. Di daerah pedesaan, sistem kasta tetap kuat karena didukung oleh struktur ekonomi agraris, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya nilai-nilai tradisional yang mengatur hubungan sosial, termasuk praktik endogami. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, proses urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan akses pendidikan telah menciptakan kondisi yang lebih mendukung mobilitas sosial dan interaksi lintas kasta. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak sepenuhnya menghapus keberadaan sistem kasta, melainkan menunjukkan bahwa sistem tersebut mengalami transformasi dan adaptasi sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang. Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem kasta di India modern bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya yang melingkupinya.

4. Kebijakan afirmasi dan peran komisi mandal dalam mengurangi ketimpangan kasta di India

Ketimpangan kasta di India pasca kemerdekaan merupakan hasil dari akumulasi historis yang panjang, terutama akibat sistem sosial tradisional dan intervensi kolonial yang membakukan stratifikasi sosial. Meskipun konstitusi India telah secara eksplisit melarang diskriminasi berbasis kasta, dalam praktiknya kelompok seperti *Scheduled Castes* (SC) dan *Scheduled Tribes* (ST) masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini bersifat struktural karena tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi tertanam dalam institusi sosial dan ekonomi yang terus mereproduksi ketidaksetaraan antar kelompok (Deshpande, 2019). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan antar kasta masih signifikan dalam indikator pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Data dari survei nasional menunjukkan bahwa kelompok SC-ST secara konsisten berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan kelompok kasta atas dalam hampir seluruh indikator kesejahteraan (Deshpande, 2024). Hal ini menegaskan bahwa negara India melihat kasta sebagai persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan publik,

bukan sekadar masalah individu atau budaya semata.

Kebijakan afirmasi di India merupakan instrumen utama negara dalam mengatasi ketimpangan sosial berbasis kasta melalui redistribusi peluang. Secara konseptual, kebijakan ini berangkat dari gagasan bahwa kesetaraan formal tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan yang telah mengakar secara historis. Oleh karena itu, diperlukan intervensi khusus berupa sistem reservasi (kuota) dalam pendidikan, pekerjaan publik, dan representasi politik untuk menciptakan kesetaraan substantif (Baig & Mangrulkar, 2024). Dalam praktiknya, kebijakan afirmasi di India menjadi salah satu program paling komprehensif di dunia, dengan sistem kuota yang mencakup berbagai kelompok sosial seperti SC, ST, dan OBC. Studi dalam jurnal *World Development* menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan representasi kelompok marginal dalam pekerjaan pemerintah dan pendidikan, meskipun tidak sepenuhnya menghapus kesenjangan sosial (Kumar & Somanathan, 2019). Dengan demikian, kebijakan afirmasi bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan mekanisme korektif untuk mengatasi ketidakadilan historis.

Pembentukan Komisi Mandal pada tahun 1979 merupakan tonggak penting dalam perluasan kebijakan afirmasi di India. Komisi ini dipimpin oleh B. P. Mandal dan bertugas mengidentifikasi kelompok *Other Backward Classes* (OBC), yaitu kelompok yang tidak termasuk dalam kategori SC dan ST tetapi tetap mengalami ketertinggalan sosial dan ekonomi. Pembentukan komisi ini didasarkan pada kesadaran bahwa ketimpangan kasta tidak hanya dialami oleh SC dan ST, tetapi juga oleh kelompok sosial lain yang belum terakomodasi dalam kebijakan afirmasi sebelumnya. Dalam proses identifikasinya, Komisi Mandal menggunakan indikator multidimensional yang mencakup aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketertinggalan tidak hanya diukur dari satu dimensi, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural. Hal ini juga menegaskan bahwa negara mulai mengadopsi pendekatan yang lebih empiris dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan sosial (Galanter, 2020).

Komisi Mandal merekomendasikan pemberian kuota sebesar 27% bagi kelompok OBC dalam sektor pekerjaan pemerintah dan institusi pendidikan.

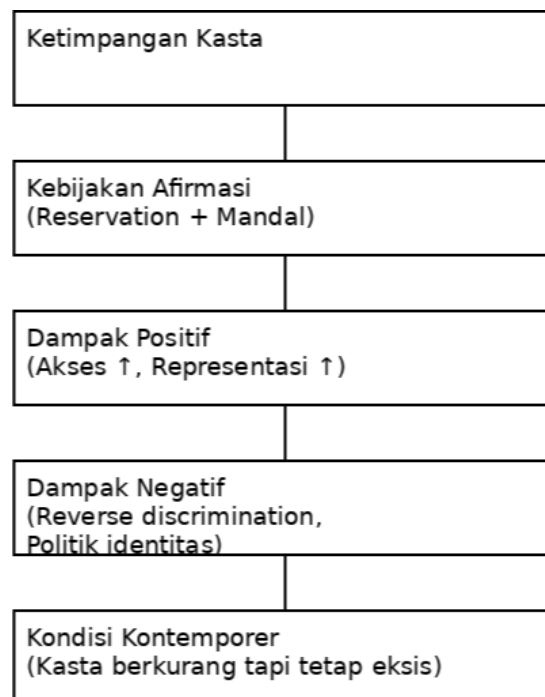
Rekomendasi ini didasarkan pada temuan bahwa kelompok OBC mengalami ketertinggalan struktural yang signifikan dan membutuhkan intervensi negara untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya strategis. Jika digabungkan dengan kuota untuk SC dan ST, total kuota dalam sistem reservasi mencapai sekitar 49,5%. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip meritokrasi dan keadilan sosial. Dalam perspektif kebijakan publik, sistem reservasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan merit, tetapi untuk menciptakan kondisi yang lebih setara sehingga individu dari kelompok marginal memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan demikian, rekomendasi Komisi Mandal menjadi pondasi penting dalam memperluas cakupan kebijakan afirmasi di India (Deshpande, 2019).

Rekomendasi Komisi Mandal mulai diimplementasikan pada awal 1990-an oleh pemerintahan V. P. Singh. Implementasi ini memicu gelombang protes besar, terutama dari kelompok kasta atas yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Demonstrasi, konflik sosial, bahkan aksi kekerasan menunjukkan bahwa isu kasta tetap menjadi persoalan yang sangat sensitif dalam masyarakat India modern. Reaksi ini mencerminkan adanya ketegangan antara upaya redistribusi sosial oleh negara dan kepentingan kelompok dominan yang merasa kehilangan privilese. Dalam perspektif sosiologis, konflik ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi tidak hanya berdampak pada distribusi sumber daya, tetapi juga pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, implementasi kebijakan afirmasi mengungkap dinamika konflik sosial yang laten dalam sistem kasta (Jaffrelot, 2021).

Kebijakan afirmasi telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan akses kelompok marginal terhadap pendidikan dan pekerjaan formal. Studi empiris menunjukkan bahwa terdapat peningkatan representasi kelompok OBC dalam sektor publik serta peningkatan peluang untuk memperoleh pendidikan tinggi (Deshpande, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi berperan penting dalam membuka peluang struktural yang sebelumnya tertutup bagi kelompok marginal. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi pada peningkatan mobilitas sosial dan inklusi dalam sistem politik.

Kelompok yang sebelumnya terpinggirkan kini memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan afirmasi tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada penguatan demokrasi melalui peningkatan representasi sosial (Kumar & Somanathan, 2019)

Gambar II.5 Alur Dampak Kebijakan Afirmasi terhadap Sistem Kasta di India



Sumber: Diolah penulis berdasarkan Deshpande (2019)
(<https://doi.org/10.1093/oxrep/grae033>)

Meskipun memiliki dampak positif, kebijakan afirmasi juga menghadapi berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah tuduhan *reverse discrimination*, di mana kelompok kasta atas merasa dirugikan oleh sistem kuota. Selain itu, kebijakan ini dianggap memperkuat identitas kasta karena kategori sosial tetap digunakan sebagai dasar dalam distribusi sumber daya. Kritik lainnya menunjukkan adanya ketimpangan internal dalam kelompok OBC, di mana manfaat kebijakan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu yang relatif lebih maju. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan afirmasi

dalam menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmasi berhasil meningkatkan akses, kesenjangan struktural belum sepenuhnya hilang (Pant & Sharma, 2026).

Kebijakan afirmasi di India melalui implementasi Komisi Mandal, menunjukkan bahwa negara memainkan peran aktif dalam merespons ketimpangan kasta yang bersifat struktural dan historis. Melalui sistem reservasi, negara berupaya menciptakan kesetaraan substantif dengan membuka akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan representasi politik bagi kelompok yang selama ini termarginalkan. Kebijakan ini mampu meningkatkan mobilitas sosial dan memperluas partisipasi kelompok marginal dalam berbagai sektor strategis, sehingga memperkuat inklusivitas dalam sistem sosial dan politik India modern.

Namun demikian, efektivitas kebijakan afirmasi tidak dapat dipahami secara linear sebagai solusi yang sepenuhnya berhasil. Di satu sisi, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang penting dalam mengurangi ketimpangan, tetapi disisi lain juga berkontribusi pada penguatan identitas kasta dalam ruang publik dan politik. Penggunaan kategori kasta sebagai dasar kebijakan justru berpotensi memproduksi batas-batas sosial yang ingin dihapus, sekaligus mendorong munculnya politik identitas yang semakin kompleks. Selain itu, adanya ketimpangan internal dalam kelompok penerima manfaat serta kritik terkait *reverse discrimination* menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Dengan demikian, kebijakan afirmasi dan peran Komisi Mandal mencerminkan dilema dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di India, di mana intervensi negara sekaligus menjadi solusi dan sumber dinamika baru dalam struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kasta tidak hanya bertahan sebagai warisan historis, tetapi juga terus direproduksi dan dinegosiasikan dalam kebijakan serta praktik politik modern. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan afirmasi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara negara, identitas sosial, dan kekuasaan dalam masyarakat India kontemporer.

B. Pengaruh Kasta dalam Kehidupan Sosial Ekonomi

Sistem kasta di India memiliki pengaruh yang mendalam dan berkelanjutan dalam membentuk struktur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai suatu sistem stratifikasi sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad, kasta tidak hanya menentukan posisi sosial individu, tetapi juga mempengaruhi pola interaksi, akses terhadap sumber daya, serta peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks sosial, kasta berperan dalam mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, termasuk dalam hal pernikahan, jaringan sosial, dan pembentukan komunitas. Sementara itu, dalam ranah ekonomi, kasta secara historis berkaitan erat dengan pembagian kerja, di mana jenis pekerjaan tertentu sering kali dikaitkan dengan kelompok kasta tertentu, sehingga menciptakan pola distribusi ekonomi yang tidak merata.

Meskipun proses modernisasi, urbanisasi, dan industrialisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial India, pengaruh kasta tidak sepenuhnya hilang, melainkan mengalami transformasi dalam bentuk yang lebih kompleks. Keterkaitan langsung antara kasta dan pekerjaan tradisional memang mulai melemah, namun dampaknya masih terlihat dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan mobilitas sosial. Selain itu, kasta juga tetap berperan sebagai sumber identitas sosial yang dapat mempengaruhi peluang individu dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, untuk memahami dinamika sosial ekonomi di India secara komprehensif, penting untuk melihat bagaimana kasta terus beradaptasi dan memengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya, serta peluang dalam masyarakat modern.

1. Keberlanjutan kasta dalam pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial

Perubahan penting dalam sejarah sistem kasta di India tidak hanya berakar pada perkembangan sosial masyarakat Hindu sejak periode kuno, tetapi juga mengalami transformasi yang sangat signifikan selama masa kolonial Inggris. Dalam kajian akademik kontemporer, sistem kasta dipahami bukan sebagai struktur sosial yang sepenuhnya tetap sejak awal kemunculannya, melainkan sebagai fenomena sosial yang mengalami rekonstruksi melalui interaksi antara kekuasaan politik, kebijakan administratif, dan dinamika ekonomi yang berkembang dalam berbagai periode sejarah. Pada masa kolonial, pemerintah

Inggris berusaha memahami dan mengelola masyarakat India melalui pendekatan klasifikasi sosial yang sistematis. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah sensus kolonial yang secara rutin mengkategorikan masyarakat berdasarkan identitas sosial, termasuk kasta. Melalui proses ini, kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya dipahami secara lebih fleksibel dalam konteks lokal mulai dikodifikasi dalam kategori administratif yang lebih baku. Klasifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam berbagai kebijakan pemerintahan kolonial, termasuk dalam pengaturan administrasi wilayah, sistem perpajakan, serta rekrutmen dalam struktur birokrasi kolonial. Proses administratif ini tidak hanya mencatat identitas sosial yang telah ada, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat keberadaan kategori-kategori tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat (Sagar & Matolia, 2025).

Transformasi tersebut memiliki implikasi sosial yang luas karena proses kodifikasi administratif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial secara bertahap menjadikan batas-batas kasta lebih tegas dan lebih terlembagakan dalam struktur negara. Identitas sosial yang sebelumnya beroperasi dalam praktik lokal dengan tingkat fleksibilitas tertentu kemudian dipaksakan ke dalam format klasifikasi yang seragam di seluruh wilayah kolonial melalui sensus dan dokumentasi resmi negara. Akibatnya, identitas kasta tidak hanya menjadi bagian dari praktik sosial tradisional, tetapi juga memperoleh pengakuan formal dalam sistem administrasi pemerintahan kolonial. Pengakuan administratif ini berkontribusi pada pembentukan identitas sosial yang lebih stabil, karena kategori kasta mulai diwariskan tidak hanya melalui tradisi sosial, tetapi juga melalui pencatatan resmi negara yang mempengaruhi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta posisi dalam struktur pemerintahan. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa intervensi administratif semacam ini berperan penting dalam memperkuat rigiditas hierarki sosial dibandingkan dengan periode pra-kolonial, karena sistem klasifikasi kolonial cenderung menstandarisasi identitas sosial yang sebelumnya bersifat lebih dinamis dalam praktik lokal masyarakat (Dirks, 2019). Proses ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya mempengaruhi struktur politik dan ekonomi India, tetapi juga berperan dalam membentuk ulang cara masyarakat memahami dan

memproduksi identitas sosial mereka dalam kerangka sistem kasta (Sagar & Matolia, 2025).

Dalam bidang pendidikan di India, berbagai penelitian empiris kontemporer menunjukkan bahwa stratifikasi sosial berbasis kasta masih mempengaruhi struktur akses dan distribusi kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Segregasi berbasis kasta dalam sistem sekolah tidak hanya terjadi dalam bentuk pemisahan sosial antar siswa, tetapi juga tercermin melalui pola pemukiman, distribusi sekolah, serta konsentrasi siswa dari latar belakang kasta tertentu pada institusi pendidikan yang berbeda kualitasnya. Studi terbaru mengenai pola segregasi sekolah di India menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tertentu memiliki proporsi siswa dari kelompok kasta yang relatif homogen, yang seringkali berkorelasi dengan kondisi sosial ekonomi komunitas di wilayah tersebut. Fenomena ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pengajar, serta lingkungan akademik yang membentuk proses pembelajaran dan peluang mobilitas sosial bagi para siswa. Sekolah yang didominasi oleh kelompok kasta yang secara sosial lebih mapan cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik, baik dari segi infrastruktur, kualitas kurikulum, maupun dukungan institusional, dibandingkan sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kelompok kasta yang secara historis termarginalkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi semata, tetapi juga terkait erat dengan struktur sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat India (*Extent, Patterns, and Geographic Scale of Caste-Based Segregation in Indian Schools*, 2025).

Tabel II.2 Hubungan Kasta, Pendidikan, Pekerjaan, dan Mobilitas Sosial di India

Dimensi	Upper Caste	OBC	SC/ST	Implikasi
Akses Pendidikan	±65–75%	±40–55%	±20–35%	Kesenjangan akses pendidikan
Sekolah Berkualitas	±60%	±35–45%	±15–25%	Ketimpangan kualitas pendidikan
Akses Social Capital	±70%	±45%	±20%	Perbedaan jaringan sosial
Pekerjaan Sektor Formal	±65–75%	±35–45%	±15–25%	Dominasi kasta atas di sektor formal
Pekerjaan Sektor Informal	±25–35%	±55–65%	±75–85%	Konsentrasi kasta marginal di sektor rentan
Pendapatan Stabil	±70%	±45%	±20–30%	Ketimpangan ekonomi
Mobilitas Sosial Naik	±60%	±35%	±15–25%	Mobilitas terbatas bagi SC/ST
Mengalami Hambatan Struktural	±10–15%	±30–40%	±60–75%	Tingginya hambatan sosial

Sumber: Diolah dari *Caste-Based Segregation in Indian Schools International Journal of Educational Development* (2025).

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S07380593>

2)

Ketimpangan tersebut pada akhirnya memperkuat akumulasi *social capital* yang tidak merata antar kelompok sosial, karena siswa dari kasta yang lebih dominan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses jaringan sosial, dukungan akademik, serta kesempatan pendidikan lanjutan yang lebih luas dibandingkan siswa dari kelompok yang terpinggirkan. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini menunjukkan bagaimana struktur stratifikasi sosial dapat direproduksi

melalui institusi pendidikan, sehingga sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran formal, tetapi juga sebagai arena reproduksi ketimpangan sosial yang mempengaruhi peluang kehidupan generasi berikutnya (Desai & Dubey, 2019).

Ketidaksetaraan dalam pendidikan kemudian berpengaruh langsung terhadap mobilitas sosial dan struktur pekerjaan antar generasi. Penelitian mengenai mobilitas sosial keluarga *Scheduled Castes* menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan tingkat pendidikan generasi berikutnya, transisi menuju pekerjaan formal berpendapatan tinggi masih relatif terbatas (*Intergenerational Social Mobility among Scheduled Caste Families in Haryana, 2023*). Banyak individu dari kasta bawah tetap terkonsentrasi pada pekerjaan informal, pekerjaan manual, atau sektor dengan perlindungan sosial yang lemah, sementara kelompok kasta atas memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan posisi dalam sektor formal yang stabil dan bergaji tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak secara otomatis menjamin mobilitas vertikal yang signifikan ketika struktur sosial yang lebih luas masih memengaruhi distribusi peluang. Hambatan struktural seperti jaringan sosial eksklusif, diskriminasi terselubung dalam rekrutmen kerja, serta dominasi kelompok tertentu dalam sektor strategis tetap menjadi faktor pembatas mobilitas (Goghari & Kusi, 2023). Dengan demikian, keberlanjutan kasta dalam konteks modern bukan hanya persoalan warisan budaya, melainkan berkaitan dengan mekanisme institusional yang mempertahankan stratifikasi sosial melalui pendidikan dan pekerjaan (*Extent, Patterns, and Geographic Scale of Caste-Based Segregation in Indian Schools, 2025*).

Secara keseluruhan, berbagai kajian empiris mengenai pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial menunjukkan bahwa sistem kasta masih berperan sebagai mekanisme yang mereproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat di India. Walaupun negara telah mengadopsi berbagai kebijakan afirmatif seperti sistem *reservation policy* untuk kelompok *Scheduled Castes* dan *Scheduled Tribes*, serta memperluas akses pendidikan dan kesempatan kerja dalam sektor publik, dampak historis dari stratifikasi kasta masih terlihat dalam distribusi peluang sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Penelitian mengenai mobilitas sosial antargenerasi menunjukkan bahwa keluarga dari kelompok kasta yang secara

historis terpinggirkan masih menghadapi hambatan struktural yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi secara signifikan. Hambatan tersebut tidak hanya terkait dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang stabil, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial seperti stigma, diskriminasi yang tersisa dalam praktik sosial, serta keterbatasan jaringan sosial yang dapat mendukung mobilitas ekonomi jangka panjang.

Studi mengenai mobilitas sosial keluarga *Scheduled Castes* di wilayah Haryana menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam tingkat pendidikan dan partisipasi ekonomi generasi muda, mobilitas sosial yang terjadi seringkali bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya mampu menutup kesenjangan struktural yang telah terbentuk selama periode sejarah yang panjang (*Intergenerational Social Mobility among Scheduled Caste Families in Haryana*, 2023). Dengan demikian, analisis mengenai mobilitas sosial di India tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang lebih luas mengenai keberlanjutan historis sistem kasta serta bagaimana struktur tersebut terus berinteraksi dengan institusi modern seperti pendidikan, pasar tenaga kerja, dan kebijakan negara. Dalam perspektif sosiologi stratifikasi, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat modern tidak selalu secara otomatis menghapus struktur ketimpangan yang telah lama mengakar, melainkan seringkali menghasilkan bentuk-bentuk baru reproduksi ketimpangan yang tetap dipengaruhi oleh identitas sosial berbasis kasta (Desai & Dubey, 2019).

2. Ketimpangan ekonomi berbasis kasta serta diskriminasi sosial dan kebijakan afirmatif (Reservation System)

Ketimpangan ekonomi berbasis kasta di India tetap menjadi salah satu isu sosial-ekonomi paling mendalam, meskipun telah diterapkan berbagai reformasi hukum dan kebijakan afirmatif sejak era pasca kemerdekaan. Meskipun sistem hukum India memberikan perlindungan konstitusional terhadap diskriminasi kasta, perbedaan penghasilan antara kelompok kasta atas dan bawah masih signifikan secara statistik, yang mencerminkan reproduksi ketimpangan struktural yang tertanam dalam mekanisme sosial dan ekonomi. Analisis panel data dari *Indian*

Human Development Survey (IHDS) mengungkap bahwa individu dari kasta yang lebih rendah secara konsisten memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dibandingkan rekan-rekannya dari kasta atas di seluruh negeri, meskipun terdapat tren penurunan dampak langsung kasta terhadap pendapatan seiring meningkatnya status pendidikan dan pendapatan negara bagian (*The Impact of Caste on Income Disparity in India Today*, 2024).

Ketimpangan yang berakar pada struktur sosial ini tidak hanya terlihat dalam penghasilan riil, tetapi juga dalam distribusi kekayaan, akses terhadap aset, dan partisipasi ekonomi. *Caste disparities and affirmative action in India* menunjukkan bahwa celah antara kelompok *Scheduled Castes–Scheduled Tribes (SC–ST)*, *Other Backward Classes (OBCs)*, dan kelompok *upper castes* tetap signifikan pada indikator pendidikan, distribusi pekerjaan, dan kepemilikan aset, meskipun terdapat beberapa perbaikan dalam akses pendidikan tingkat tinggi bagi OBC melalui perluasan kuota pendidikan (Deshpande & Ramachandran, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa hierarki sosial tradisional masih membentuk peluang ekonomi dan akses terhadap sumber daya penting di negara yang secara formal berkomitmen pada prinsip egalitarian dalam konstitusinya.

Dalam rangka upaya mengatasi ketimpangan ini, pemerintah India memperkenalkan kebijakan afirmatif yang dikenal sebagai *reservation system*, yang ditujukan untuk meningkatkan representasi dan partisipasi kelompok yang terpinggirkan dalam pendidikan, pekerjaan publik, dan lembaga legislatif. *Reservation* ini diberikan kepada kelompok SC, ST, dan OBC untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap peluang sosial-ekonomi yang selama ini didominasi oleh kasta atas. Kebijakan ini dibangun atas dasar pengakuan bahwa diskriminasi historis telah menyebabkan eksklusi struktural yang tidak bisa diatasi hanya melalui jaminan hukum formal, tetapi memerlukan campur tangan positif untuk memperkecil kesenjangan yang diwariskan secara turun-temurun (Deshpande & Ramachandran, 2024). *Reservation system* ini telah menunjukkan beberapa hasil positif dalam memperluas akses pendidikan dan peluang kerja bagi kelompok marginal, termasuk peningkatan probabilitas memperoleh pendidikan tingkat tinggi bagi OBC yang menikmati perluasan reservasi di institusi pendidikan,

namun demikian penerapan kebijakan tersebut juga menimbulkan kritik terkait persepsi meritokrasi dan tantangan implementasi yang berbeda antar negara bagian (Deshpande & Ramachandran, 2024). Secara ekonomis, meskipun reservasi telah memberikan ruang bagi pemuda dari kasta marginal untuk naik dalam hirarki sosial formal, dampak struktural terhadap ketimpangan kekayaan dan akses modal tetap kompleks karena faktor-faktor lain seperti hambatan pasar kerja dan akses terhadap kredit serta aset ekonomi yang masih tidak merata (*The Impact of Caste on Income Disparity in India Today*, 2024).

Selain itu, diskriminasi sosial berbasis kasta tidak hanya menghasilkan perbedaan material dalam pendapatan atau aset, tetapi juga menciptakan hambatan pada tingkat sosial budaya yang berdampak pada akses terhadap jaringan sosial, reputasi profesional, dan persepsi kemampuan individu. Meskipun kebijakan afirmatif seperti *reservation system* berupaya meniadakan hambatan struktural, keberlanjutan praktik diskriminatif masih terlihat di banyak sektor informal di mana kelompok *upper castes* memegang dominasi sosial yang memperkuat kesenjangan ekonomi. Perdebatan akademik kontemporer menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif telah berkontribusi terhadap pengurangan sebagian celah, pendekatan yang lebih menyeluruh berupa reformasi pasar kerja, perluasan akses modal, serta perubahan sosial budaya tetap diperlukan untuk menghadapi diskriminasi kasta yang bersifat sistemik (Deshpande & Ramachandran, 2024).

Oleh karena itu, ketimpangan ekonomi berbasis kasta tidak dapat dipahami hanya sebagai peninggalan sejarah sosial, tetapi juga sebagai konsekuensi dari interaksi antara struktur sosial yang tertanam dan mekanisme ekonomi modern. Kebijakan afirmatif (*reservation system*) merupakan salah satu upaya paling jelas untuk mengatasi diskriminasi historis dan membuka pintu pendidikan serta pekerjaan yang lebih adil bagi kelompok marginal, namun tantangan dalam implementasi dan dampaknya yang belum merata menunjukkan bahwa ketimpangan berbasis kasta masih memerlukan pendekatan reformasi yang lebih holistik, baik melalui kebijakan ekonomi, penguatan kelembagaan, maupun perubahan budaya sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara secara struktural.

3. Adaptasi kasta di era modern serta perubahan fungsi kasta di era modernisasi dan urbanisasi

Pada era modern, sistem kasta di India tidak sepenuhnya hilang meskipun mengalami tekanan besar dari proses modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi yang telah mengubah banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian sosiologi kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan industri dan urbanisasi telah melemahkan keterkaitan langsung antara kasta dan pekerjaan tradisional, sehingga individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpindah dari pekerjaan sesuai dengan latar belakang sosialnya dan mendapatkan peluang baru di sektor ekonomi modern. Urbanisasi, khususnya menciptakan ruang sosial di mana interaksi dengan orang dari berbagai latar belakang kasta meningkat karena adanya perbedaan dan kedekatan fisik di kota-kota besar, yang secara bertahap mengurangi praktik diskriminatif formal seperti *untouchability* di ruang umum meskipun masih ada dalam bentuk sosial budaya terselubung (Sinha, 2026).

Namun demikian, transformasi fungsi kasta bukan berarti hilangnya struktur ini secara total melainkan sistem kasta beradaptasi dengan konteks modern dengan mendefinisikan dirinya dalam bentuk yang lebih berkaitan dengan stratifikasi kelas serta peluang politik dan identitas sosial baru. Dalam konteks kota modern India, dinamika hubungan kasta dicampur dengan faktor ekonomi seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan mobilitas sosial yang terus meningkat, meskipun dampaknya tidak merata bagi semua kelompok masyarakat (Ahmad & Chahal, 2025). Urbanisasi memberikan kesempatan bagi kelompok marginal untuk menuntut hak sosial dan ekonomi lebih besar, tetapi masih terdapat hambatan struktural seperti segregasi pemukiman, diskriminasi dalam pasar kerja formal, dan kendala akses terhadap layanan publik yang menunjukkan bahwa perjuangan melampaui batasan caste tetap berjalan (Muni, 2025).

Selain itu, adaptasi modern dari kasta juga terlihat dalam perubahan fungsi identitas sosial dan komunitas dalam kehidupan urban, di mana hubungan sosial yang diwarnai oleh modernisasi dan globalisasi memungkinkan munculnya jaringan solidaritas baru lintas kelompok kasta. Studi tentang dinamika sosial kontemporer mencatat bahwa perubahan struktur masyarakat yang dipicu oleh

pendidikan, kerja profesional, dan media sosial telah menciptakan narasi baru mengenai kesetaraan dan mobilitas, sekaligus memunculkan tantangan baru terhadap stereotip lama yang berkaitan dengan interaksi antar kasta (Ahmad & Chahal, 2025). Di sisi lain, budaya modern juga memperkuat bentuk baru diskriminasi berbasis jaringan sosial dan elitisme sosial yang, meskipun tidak secara eksplisit bersandar pada doktrin tradisional, tetap mencerminkan pola dominasi sosial historis yang telah berakar kuat dalam konteks sosial India.

Dengan demikian, modernisasi dan urbanisasi tidak menghapus sistem kasta, melainkan mengubah bentuk dan fungsinya secara lebih kompleks. Keterkaitan antara kasta dan pekerjaan tradisional semakin melemah akibat industrialisasi dan peningkatan akses pendidikan, namun identitas kasta tetap menguat dalam ranah politik, ekonomi, dan jaringan sosial sebagai sumber modal sosial dan representasi. Kasta pun bertransformasi dari sistem stratifikasi ritual menjadi instrumen strategis yang beririsan dengan kelas, pendidikan, dan mobilitas sosial. Meskipun urbanisasi membuka peluang mobilitas dan interaksi lintas kasta, ia juga mereproduksi bentuk-bentuk ketimpangan baru secara terselubung, seperti dalam pasar kerja dan pola permukiman. Oleh karena itu, kasta tetap menjadi faktor penting dalam membentuk relasi sosial, distribusi ekonomi, dan identitas di India kontemporer.

Selain menunjukkan proses adaptasi, keberlanjutan sistem kasta di India juga tidak dapat dilepaskan dari dampak negatif yang terus ditimbulkan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam ranah sosial, diskriminasi berbasis kasta masih tercermin dalam praktik eksklusi sosial, segregasi permukiman, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik bagi kelompok marginal. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, ketimpangan terlihat dari rendahnya akses kelompok kasta bawah terhadap pekerjaan formal, kepemilikan aset, serta peluang mobilitas ekonomi yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi telah membuka peluang baru, struktur ketimpangan berbasis kasta tetap beroperasi dalam bentuk yang lebih terselubung dan sistemik. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh negara India untuk mengurangi dampak negatif tersebut melalui kebijakan afirmasi, reformasi hukum, serta program pembangunan sosial

yang ditujukan bagi kelompok terpinggirkan.

Salah satu upaya utama yang dilakukan negara India dalam mengurangi ketimpangan berbasis kasta adalah melalui penerapan kebijakan afirmasi dalam bentuk sistem reservasi yang memberikan kuota bagi kelompok *Scheduled Castes* (SC), *Scheduled Tribes* (ST), dan *Other Backward Classes* (OBC) dalam pendidikan, pekerjaan sektor publik, serta representasi politik. Kebijakan ini didukung oleh kerangka hukum yang secara tegas melarang praktik diskriminasi berbasis kasta. Salah satu regulasi penting adalah *Protection of Civil Rights Act* 1955, yang bertujuan menghapus praktik *untouchability* dan menjamin kesetaraan akses terhadap ruang publik. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan *Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act* 1989, yang secara khusus dirancang untuk melindungi kelompok Dalit dan komunitas adat dari kekerasan serta diskriminasi struktural. Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum ini relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam penegakan di tingkat lokal akibat faktor sosial dan institusional (Thorat & Newman, 2020).

Selain pendekatan hukum, pemerintah India juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok marginal dalam menghadapi persaingan ekonomi modern. Dalam bidang pendidikan, program seperti *Post-Matric Scholarship Scheme* dan *Pre-Matric Scholarship* memberikan dukungan finansial bagi siswa dari kelompok SC, ST, dan OBC untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Di sektor pengembangan keterampilan, program *Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana* menyediakan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri, sementara *Stand-Up India Scheme* memberikan akses pembiayaan bagi wirausaha dari kelompok marginal. Penelitian dalam jurnal *World Development* menunjukkan bahwa program-program afirmatif semacam ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi kelompok kasta bawah dalam sektor formal, meskipun dampaknya bervariasi antar wilayah (Kumar & Somanathan, 2019). Selain itu, program perlindungan sosial seperti *Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act* (MGNREGA) memberikan jaminan kerja minimum yang

membantu mengurangi kerentanan ekonomi kelompok marginal di pedesaan (Afridi, Mukhopadhyay, & Sahoo, 2021).

Meskipun berbagai kebijakan dan program tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengurangi ketimpangan kasta, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Studi dalam jurnal *Economic and Political Weekly* menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis kasta masih terjadi dalam pasar kerja, terutama dalam proses rekrutmen dan promosi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan (Thorat & Newman, 2020). Selain itu, keterbatasan kapasitas institusional, kurangnya pengawasan, serta resistensi sosial dari kelompok dominan seringkali menghambat implementasi kebijakan afirmasi secara optimal. Dengan demikian, meskipun kebijakan afirmasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam membuka akses dan peluang, pengurangan ketimpangan kasta secara menyeluruh masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan budaya secara simultan (Deshpande, 2019).

Namun demikian, keberadaan berbagai kebijakan tersebut tidak serta-merta menghapus sistem kasta secara menyeluruh. Salah satu alasan utama mengapa sistem kasta tetap bertahan adalah karena ia telah terinternalisasi dalam struktur sosial, budaya, dan bahkan praktik sehari-hari masyarakat. Kasta tidak hanya berfungsi sebagai sistem stratifikasi, tetapi juga sebagai sumber identitas sosial, jaringan sosial (*social networks*), dan modal sosial yang penting dalam kehidupan individu. Dalam banyak kasus, hubungan sosial seperti pernikahan, relasi kerja, dan jaringan komunitas masih dipengaruhi oleh pertimbangan kasta, sehingga memperkuat keberlanjutan sistem ini dalam kehidupan modern. Dengan kata lain, kasta tidak hanya dipertahankan oleh struktur eksternal, tetapi juga oleh reproduksi internal dalam masyarakat itu sendiri (Jaffrelot, 2021).

Selain faktor kultural, keberlanjutan sistem kasta juga didorong oleh dinamika politik dan ekonomi modern. Dalam konteks demokrasi India, identitas kasta sering dimanfaatkan sebagai basis mobilisasi politik dan strategi elektoral oleh berbagai aktor politik. Hal ini menyebabkan kasta tetap relevan sebagai

kategori sosial yang memiliki nilai strategis dalam perebutan kekuasaan. Di sisi lain, dalam ekonomi modern, jaringan berbasis kasta dapat berfungsi sebagai mekanisme akses terhadap peluang kerja, bisnis, dan sumber daya ekonomi lainnya, sehingga memperkuat posisi kelompok tertentu dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, meskipun modernisasi dan urbanisasi telah mengubah bentuk dan fungsi kasta, sistem ini tetap bertahan karena mampu beradaptasi dengan konteks baru dan terus direproduksi dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di India kontemporer.

BAB III

ANALISIS POLITISASI SISTEM KASTA DI INDIA

Kekuasaan dalam masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami semata sebagai relasi dominasi yang bersifat koersif, melainkan sebagai hasil dari proses hegemonik yang bekerja melalui pembentukan dan internalisasi kesadaran sosial. Dalam kerangka pemikiran Antonio Gramsci, stabilitas suatu tatanan sosial justru ditentukan oleh kemampuan kelompok dominan dalam membangun “*moral and intellectual leadership*” yang diterima sebagai kebenaran umum (*common sense*) oleh masyarakat. Dengan demikian, relasi kekuasaan tidak hanya beroperasi dalam struktur negara (*political society*), tetapi juga secara mendalam dalam ranah masyarakat sipil (*civil society*) melalui institusi-institusi kultural seperti agama, pendidikan, dan tradisi. Dalam konteks tersebut, sistem kasta di India dapat dipahami sebagai produk dari formasi hegemoni yang mengintegrasikan struktur material dengan superstruktur ideologis. Stratifikasi sosial tidak sekadar dipertahankan melalui mekanisme ekonomi atau politik formal, tetapi melalui proses naturalisasi nilai yang menjadikan hierarki tampak sebagai sesuatu yang inheren, sah, dan tidak problematis.

Proses ini berlangsung melalui artikulasi berbagai aparatus kultural yang mereproduksi makna sosial secara terus-menerus, sehingga menghasilkan persetujuan aktif (*consent*) dari kelompok yang didominasi. Dengan kata lain, dominasi dalam sistem kasta bekerja melalui transformasi kepentingan partikular menjadi kepentingan universal yang diterima secara luas dalam kesadaran kolektif masyarakat. Agama tidak hanya diposisikan sebagai sistem keyakinan spiritual, tetapi sebagai aparatus ideologis yang memproduksi dan mereproduksi legitimasi sosial terhadap struktur hierarki. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hegemoni menjadi kunci untuk menjelaskan bagaimana sistem kasta tidak hanya bertahan, tetapi juga terus beradaptasi dan diartikulasikan dalam konfigurasi politik modern di India.

A. Hegemoni Budaya dalam Agama Hindu

Dalam perspektif Antonio Gramsci, dominasi sosial tidak hanya

dipertahankan melalui kekuatan koersif negara, tetapi terutama melalui kemampuan kelompok dominan dalam membentuk dan mengarahkan kesadaran kolektif masyarakat. Proses ini berlangsung melalui institusi-institusi masyarakat sipil yang memproduksi nilai, norma, dan makna sosial yang kemudian diterima sebagai kebenaran umum (*common sense*). Dengan demikian, struktur kekuasaan memperoleh stabilitas bukan karena paksaan semata, melainkan karena keberhasilan membangun persetujuan sosial yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran agama sebagai salah satu aparatus kultural yang paling berpengaruh dalam membentuk tatanan sosial. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai medium simbolik yang menghubungkan nilai moral dengan struktur sosial yang hierarkis. Melalui proses ini, stratifikasi seperti sistem kasta memperoleh legitimasi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ideologis dan transendental.

1. Agama sebagai sumber legitimasi politik

Agama dalam perspektif teori hegemoni dapat dipahami sebagai bagian dari struktur kultural yang berperan dalam membentuk konsensus sosial mengenai legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka pemikiran Antonio Gramsci, stabilitas kekuasaan tidak hanya bergantung pada dominasi yang berbasis kekuatan koersif, tetapi terutama pada kemampuan kelompok dominan membangun persetujuan kolektif melalui institusi masyarakat sipil seperti pendidikan, budaya, dan agama. Hegemoni bekerja melalui proses internalisasi nilai dan norma yang kemudian diterima oleh masyarakat sebagai “akal sehat” (*common sense*) yang tampak alamiah dan tidak dipertanyakan. Dengan demikian, agama tidak sekadar berfungsi sebagai sistem keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang membantu menstrukturkan cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Dalam perspektif ini, legitimasi kekuasaan tidak hanya dihasilkan melalui aparatur negara, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran sosial yang membuat masyarakat menerima struktur sosial sebagai bagian dari keteraturan yang normal (Yang, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa narasi keagamaan dapat berfungsi sebagai perangkat ideologis yang menormalisasi struktur kekuasaan

dengan membingkai nilai-nilai sosial sebagai bagian dari kebenaran moral yang tidak mudah dipersoalkan oleh masyarakat (Hanafi, 2023).

Dalam konteks India, agama Hindu dapat dipahami sebagai salah satu fondasi utama dalam pembentukan hegemoni kultural yang menstrukturkan hubungan antara agama, moralitas, dan tatanan sosial. Konsep-konsep normatif seperti *dharma*, *karma*, dan sistem *varna* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika religius, tetapi juga sebagai kerangka simbolik yang membentuk legitimasi sosial terhadap stratifikasi masyarakat. Melalui ajaran tersebut, posisi sosial individu dipahami sebagai konsekuensi moral dari tindakan di kehidupan sebelumnya, sehingga ketimpangan sosial memperoleh justifikasi religius yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap hierarki yang ada. Dalam kerangka ini, stratifikasi sosial tidak dipersepsikan sebagai ketidakadilan struktural, melainkan sebagai bagian dari keteraturan moral yang sah dan rasional dalam sistem kepercayaan religius.

Sistem kasta dipahami oleh masyarakat bukan sekadar sebagai pembagian sosial, tetapi sebagai sistem nilai yang berakar pada konsep kemurnian (*purity*) dan pencemaran (*pollution*) yang memiliki legitimasi religius. Hierarki kasta diterima sebagai bagian dari tatanan moral yang lebih tinggi, sehingga ketimpangan sosial tidak dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai refleksi dari keteraturan kosmis. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dalam sistem kasta tidak bersifat eksternal atau dipaksakan, tetapi terinternalisasi dalam cara pandang masyarakat itu sendiri (Louis Dumont, 1966).

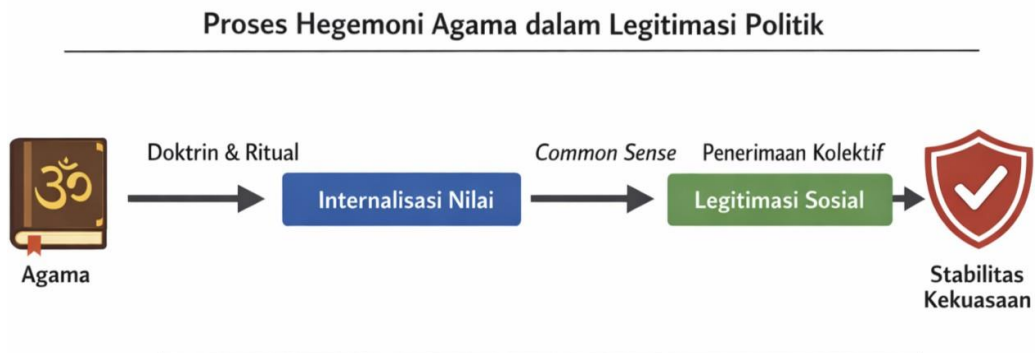
Argumen tersebut dapat diperkuat melalui studi kasus praktik *untouchability* di wilayah pedesaan India selatan, yang secara empiris menunjukkan bagaimana konsep kemurnian (*purity*) dan pencemaran (*pollution*) diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kasta rendah (Dalit) secara sosial dibatasi dalam berbagai aktivitas, seperti tidak diperbolehkan menggunakan sumur yang sama dengan kasta atas, dilarang memasuki kuil, serta harus menjaga jarak fisik dalam interaksi sehari-hari untuk menghindari “*pollution*” simbolik. Praktik ini tidak selalu ditegakkan melalui paksaan langsung, melainkan diterima sebagai norma sosial yang dianggap sah oleh kedua belah pihak, termasuk oleh

kelompok yang terdominasi. Temuan serupa juga dikonfirmasi dalam studi lapangan oleh André Béteille di desa Sripuram, Tamil Nadu, yang menunjukkan bahwa pembagian ruang sosial, pekerjaan, dan relasi interpersonal secara ketat mengikuti hierarki kasta yang dilegitimasi oleh nilai religius. Dalam kedua studi tersebut, hierarki sosial tidak dipersepsikan sebagai ketidakadilan struktural, tetapi sebagai bagian dari keteraturan moral yang *“taken for granted”* dan sesuai dengan tradisi.

Identitas kasta masih berpengaruh signifikan dalam menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan relasi sosial. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar responden masih menerima praktik-praktik seperti perkawinan endogami sebagai sesuatu yang *“common”* dan *“in line with tradition”* yang secara tidak langsung mencerminkan internalisasi nilai-nilai religius dan kultural dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2021 di India menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden Hindu mengaitkan identitas keagamaan dengan identitas sosial dan nasional, serta menunjukkan preferensi terhadap pemisahan sosial berbasis komunitas. Data ini memperlihatkan bahwa legitimasi terhadap struktur sosial yang hierarkis tidak hanya bertahan secara historis, tetapi juga direproduksi dalam kesadaran masyarakat modern (Jodhka, 2016).

Ketika struktur sosial ditafsirkan sebagai manifestasi dari hukum kosmis atau ketertiban moral ilahi, maka hierarki sosial cenderung dipandang sebagai sesuatu yang natural dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam perspektif Antonio Gramsci, kondisi ini menunjukkan bagaimana hegemoni bekerja melalui proses internalisasi nilai budaya yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat, sehingga struktur kekuasaan tidak lagi dipertahankan melalui dominasi terbuka, melainkan melalui persetujuan yang terbentuk secara kultural. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai perangkat ideologis yang menghubungkan keyakinan spiritual dengan legitimasi sosial dan politik, sekaligus memperkuat stabilitas struktur sosial melalui mekanisme konsensus moral yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Slothuus, 2021).

Gambar III.1 Proses Hegemoni Agama dalam Legitimasi Politik



Sumber: Diolah dari Hanafi (2023).
(<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/articl>)

Dalam sejarah politik India, relasi antara agama dan kekuasaan menunjukkan pola hegemoni kultural tersebut. Raja sebagai penjaga dharma memperoleh legitimasi bukan hanya karena kekuatan militer atau warisan dinasti, tetapi karena posisinya dibingkai sebagai bagian dari tatanan kosmik yang sakral. Weber mencatat bahwa sistem religius seperti Hinduisme membentuk orientasi etis yang menopang struktur sosial dan mempengaruhi konfigurasi politik masyarakat India (Max Weber Studies, 2018). Argumen ini dapat diperkuat melalui studi kasus tentang hubungan antara konsep *dharma* dan legitimasi kekuasaan dalam praktik politik India modern, khususnya pada masa pemerintahan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) di bawah kepemimpinan Narendra Modi sejak 2014. Dalam berbagai pidato politik dan kebijakan simbolik, Modi dan elite BJP kerap merepresentasikan kepemimpinan politik sebagai bentuk pengabdian terhadap *dharma* atau kewajiban moral untuk menjaga keteraturan sosial dan kesejahteraan kolektif (Thapar, 2002).

Salah satu contoh konkret terlihat dalam peresmian Ram Mandir di Ayodhya pada tahun 2024, yang tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga dimobilisasi sebagai simbol kebangkitan identitas Hindu dalam ruang publik dan politik nasional. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai religius tidak hanya membentuk orientasi etis individu, tetapi juga digunakan untuk membangun legitimasi politik melalui narasi moral yang berakar pada tradisi keagamaan

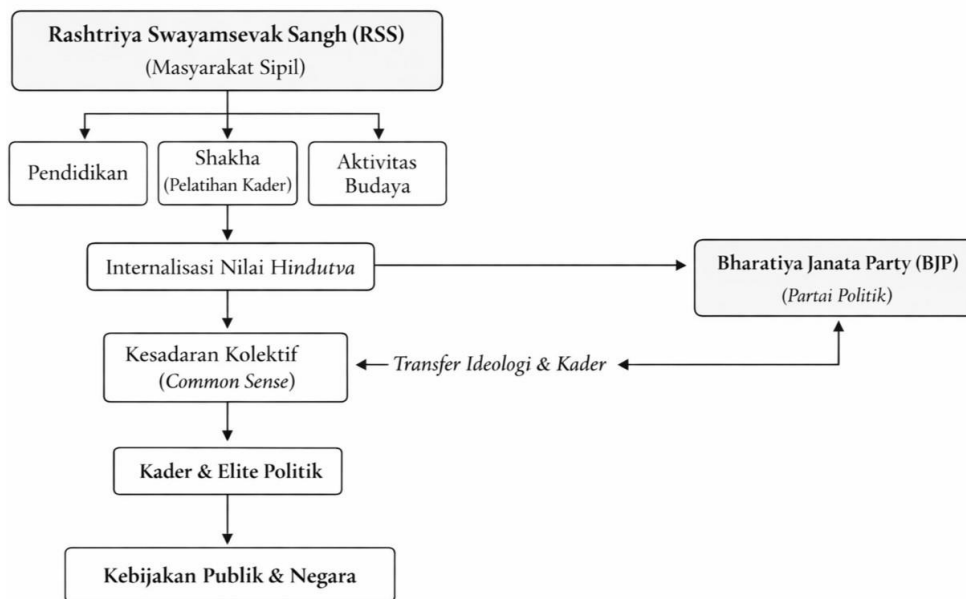
(Thapar, 2002). Praktik tersebut mencerminkan bagaimana etika religius berfungsi sebagai sumber otoritas yang mempengaruhi tindakan sosial dan konfigurasi kekuasaan, di mana kepemimpinan politik memperoleh legitimasi tidak hanya dari prosedur formal demokrasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral yang dianggap sah dalam sistem kepercayaan masyarakat.

Dalam kerangka Gramsci, legitimasi religius ini dapat dipahami sebagai bentuk “kepemimpinan moral dan intelektual” yang membuat kekuasaan diterima sebagai sesuatu yang alami. Transformasi hegemoni religius ini terlihat jelas dalam politik India modern melalui ideologi Hindutva. Hindutva tidak sekadar menghidupkan simbol-simbol keagamaan, tetapi membingkai identitas Hindu sebagai identitas nasional yang dominan. Dalam sistem demokrasi elektoral, legitimasi politik tidak hanya diperoleh melalui mekanisme rasional-legal seperti pemilu, tetapi juga melalui resonansi identitas budaya mayoritas yang dibangun secara sistematis. Penelitian tentang intervensi agama dalam politik India menunjukkan bahwa narasi Hindutva mengintegrasikan simbolisme religius ke dalam proyek nasionalisme modern untuk membangun kohesi mayoritas dan memperluas legitimasi politik (Thomas et al., 2024).

Hal ini dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus kemenangan Narendra Modi dan Bharatiya Janata Party (BJP) pada pemilu 2014 dan 2019. Dalam kampanye tersebut BJP tidak hanya menekankan isu pembangunan ekonomi, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan simbolisme religius Hindu seperti penggunaan narasi peradaban Hindu, retorika kebangkitan nasional (*Hindu resurgence*), serta representasi figur Modi sebagai pemimpin yang dekat dengan nilai-nilai religius mayoritas. Salah satu contoh konkret adalah pembangunan dan politisasi isu Ram Mandir di Ayodhya, yang dijadikan simbol pemulihan identitas Hindu dalam ruang publik sekaligus alat mobilisasi elektoral. Strategi ini merupakan bagian dari proyek ideologis Hindutva yang menggabungkan nasionalisme dengan identitas religius untuk membangun “*majoritarian consensus*” dalam demokrasi (Jaffrelot, 2021). Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa legitimasi politik BJP tidak hanya bersumber dari kemenangan elektoral formal, tetapi juga dari keberhasilan mengartikulasikan

identitas religius sebagai fondasi legitimasi nasional dalam kerangka demokrasi modern. Dalam perspektif Gramsci, strategi ini dapat dipahami sebagai upaya membangun “*historical bloc*” antara elite politik dan basis sosial mayoritas melalui kesatuan ideologis.

Gambar III.2 Relasi Hegemoni Kultural antara RSS, BJP, dan Negara di India



Sumber: Diolah dari Encyclopaedia Britannica (2026). (<https://www.britannica.com/topic/Rashtriya-Swayamsevak-Sangh>)

Peran Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) dalam ranah masyarakat sipil menunjukkan bagaimana hegemoni kultural diproduksi secara sistematis melalui berbagai saluran sosial non-negara. Dalam bidang pendidikan, RSS membangun dan mengelola jaringan sekolah serta lembaga pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai medium penanaman nilai-nilai nasionalisme Hindu sejak usia dini. Kurikulum dan aktivitas pembelajaran seringkali menekankan narasi historis dan kultural yang memposisikan Hindu sebagai inti identitas nasional India. Selain itu, melalui program pelatihan kader seperti *shakha* (pertemuan rutin), RSS membentuk disiplin, loyalitas ideologis, serta solidaritas kolektif di antara anggotanya. Dalam

forum ini, peserta tidak hanya dilatih secara fisik, tetapi juga diberikan pemahaman ideologis mengenai sejarah, budaya, dan peran Hindu dalam kehidupan berbangsa. Di ranah budaya, RSS aktif menyelenggarakan kegiatan sosial, peringatan hari besar, serta kampanye kebudayaan yang bertujuan memperkuat simbolisme Hindu dalam ruang publik. Melalui kombinasi pendidikan, kaderisasi, dan aktivitas budaya tersebut, RSS secara berkelanjutan memproduksi dan mereproduksi narasi tentang India sebagai bangsa Hindu, sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat (Britannica, 2026).

Pengaruh Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) terhadap Bharatiya Janata Party (BJP) memperlihatkan adanya kesinambungan yang kuat antara produksi konsensus kultural di masyarakat sipil dan praktik kekuasaan dalam institusi negara. Banyak elite politik BJP memiliki latar belakang sebagai kader atau anggota RSS, sehingga orientasi ideologis mereka telah terbentuk melalui proses sosialisasi yang panjang dalam kerangka nilai-nilai Hindutva. Hal ini menyebabkan kebijakan dan strategi politik BJP sering kali mencerminkan narasi ideologis yang diproduksi oleh RSS, seperti penekanan pada identitas nasional berbasis Hindu, penggunaan simbol-simbol religius dalam komunikasi politik, serta penguatan wacana mayoritarian dalam ruang publik. Dengan demikian, RSS tidak hanya berperan sebagai organisasi sosial, tetapi juga sebagai "*ideological apparatus*" yang memasok gagasan, nilai, dan kader bagi struktur politik formal. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa hegemoni kultural tidak berhenti pada tahap pembentukan kesadaran masyarakat, tetapi berlanjut hingga mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan arah pemerintahan. Dalam perspektif hegemonik, kondisi ini mencerminkan bagaimana dominasi ideologis dapat dipertahankan melalui integrasi antara masyarakat sipil dan negara, sehingga legitimasi kekuasaan tidak hanya bersandar pada mekanisme elektoral, tetapi juga pada kesesuaian antara kebijakan politik dan nilai-nilai kultural yang telah terinternalisasi dalam masyarakat (Britannica, 2026).

Dalam konteks ini, agama tidak lagi berfungsi semata sebagai sumber legitimasi tradisional yang bersifat simbolik dan spiritual, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen hegemonik yang adaptif dalam dinamika

demokrasi modern. Agama digunakan secara strategis oleh elite politik untuk membangun legitimasi yang tidak hanya bersandar pada prosedur formal seperti pemilu, tetapi juga pada penerimaan kultural yang lebih dalam di tingkat masyarakat (Jaffrelot, 2021). Melalui politik identitas berbasis agama, nilai-nilai religius direpresentasikan sebagai bagian dari kehendak kolektif mayoritas, sehingga kebijakan publik dapat dibingkai sebagai refleksi dari aspirasi kultural dan moral masyarakat luas (Pinatih, 2023). Dalam proses ini, agama berfungsi sebagai medium yang menjembatani antara kepentingan politik elite dengan identitas sosial masyarakat, sehingga legitimasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan emosional.

Strategi ini diwujudkan melalui penggunaan simbol-simbol keagamaan, narasi historis, serta representasi budaya yang dikonstruksi secara sistematis dalam ruang publik, seperti melalui media massa, kampanye politik, dan wacana nasionalisme. Elite politik memanfaatkan memori kolektif tentang kejayaan peradaban masa lalu untuk membangun imajinasi bersama mengenai identitas nasional yang berbasis agama, sehingga solidaritas elektoral dapat diperkuat melalui ikatan emosional dan kultural (Thomas et al., 2024).

Hal ini dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus pembangunan dan inaugurasi Ram Mandir di Ayodhya yang mencapai puncaknya pada tahun 2024 di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Proyek ini tidak hanya diposisikan sebagai pembangunan tempat ibadah, tetapi sebagai simbol kebangkitan peradaban Hindu yang dikaitkan dengan memori kolektif tentang kejayaan masa lalu sekaligus trauma historis terkait penghancuran kuil pada era Mughal. Dalam prosesnya, isu Ayodhya dikonstruksi secara sistematis melalui media massa, kampanye politik, dan wacana nasionalisme oleh *Bharatiya Janata Party* (BJP) serta jaringan organisasi seperti *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS), sehingga menghasilkan resonansi emosional yang kuat di kalangan mayoritas Hindu. Mobilisasi simbol religius seperti Ayodhya merupakan bagian dari strategi Hindutva untuk membangun identitas nasional berbasis agama yang terintegrasi dengan proyek politik modern. Penggunaan narasi sejarah dan simbol budaya Hindu dalam ruang publik berfungsi untuk menciptakan “*emotional community*” yang memperkuat

solidaritas elektoral melalui identifikasi kultural (Reuters, 2024). Dengan demikian, kasus Ram Mandir memperlihatkan bagaimana memori historis, simbolisme religius, dan representasi budaya diproduksi secara sistematis untuk membangun imajinasi kolektif tentang bangsa, yang pada akhirnya berkontribusi pada perluasan legitimasi politik dalam demokrasi elektoral India.

Studi mengenai politik identitas di India menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya bertujuan memenangkan dukungan politik, tetapi juga untuk menanamkan persepsi bahwa dominasi kelompok mayoritas merupakan kondisi yang sah dan wajar dalam kehidupan bernegara (Pinatih, 2023). Dalam perspektif Antonio Gramsci, proses tersebut mencerminkan mekanisme "*naturalization of dominant ideology*", dimana nilai dan kepentingan kelompok dominan berhasil diinternalisasi sebagai common sense yang diterima tanpa resistensi berarti (Gramsci, 1971). Hal ini dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus kebijakan *Citizenship Amendment Act* (CAA) tahun 2019 yang diperkenalkan oleh Bharatiya Janata Party (BJP) di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Secara formal, kebijakan ini direpresentasikan sebagai upaya kemanusiaan untuk memberikan kewarganegaraan kepada kelompok minoritas non-Muslim dari negara-negara tetangga. Namun, dalam praktik diskursifnya, narasi yang dibangun melalui media, pidato politik, dan kampanye publik secara konsisten membingkai kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas dan kepentingan mayoritas Hindu, sekaligus mengasosiasikan kelompok tertentu sebagai "*outsider*" dalam definisi kebangsaan. Akibatnya, struktur kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai hasil konstruksi politik yang dapat diperdebatkan, melainkan sebagai realitas sosial yang tampak alami, sah, dan tidak problematis dalam kesadaran kolektif masyarakat (BBC News, 2019).

Sebagian besar pendukung kebijakan ini memandangnya sebagai langkah yang "*acceptable*" dan sah dalam melindungi identitas nasional, meskipun menuai kritik luas karena dianggap diskriminatif. Meskipun terjadi protes besar-besaran di berbagai kota seperti Delhi dan Aligarh, narasi dominan yang diproduksi oleh pemerintah dan didukung oleh sebagian media berhasil mempertahankan legitimasi kebijakan tersebut di kalangan mayoritas masyarakat (Al Jazeera, 2020). oleh

karena itu, dalam studi kasus ini menunjukkan bagaimana nilai dan kepentingan kelompok dominan tidak lagi dipaksakan secara terbuka, melainkan dinormalisasi melalui proses kultural dan diskursif sehingga diterima sebagai *common sense*. Dengan demikian, apa yang pada awalnya merupakan proyek ideologis tertentu bertransformasi menjadi persepsi sosial yang dianggap alami, sah, dan tidak problematis dalam kesadaran kolektif masyarakat.

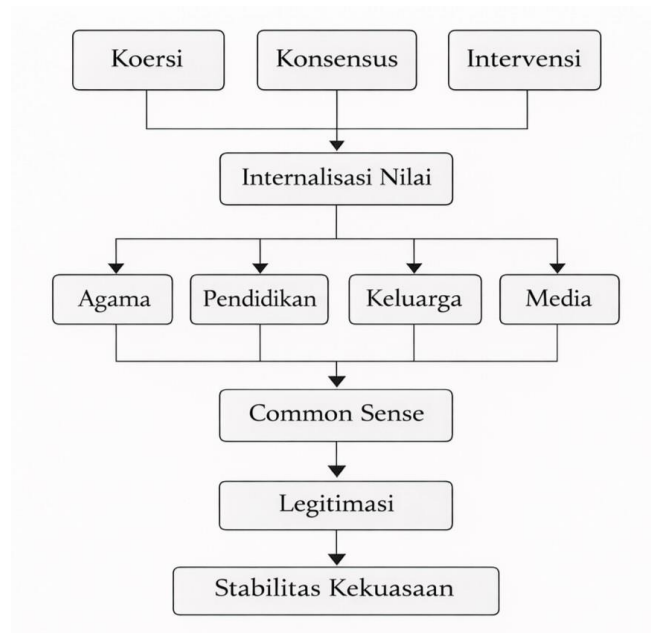
Dengan demikian, analisis hegemoni Gramsci memperlihatkan bahwa legitimasi religius di India tidak hanya beroperasi pada tingkat keyakinan individual, melainkan terutama melalui pembentukan kesadaran kolektif yang menghubungkan agama, budaya, dan nasionalisme dalam satu kerangka makna yang saling memperkuat. Dalam proses ini, agama Hindu tidak sekadar hadir sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai medium simbolik yang memproduksi konsensus sosial mengenai legitimasi politik. Nilai-nilai religius, mitologi, serta konsep moral yang terkandung dalam tradisi Hindu menjadi sumber narasi kultural yang membingkai tatanan sosial dan politik sebagai bagian dari keteraturan yang sah dan wajar. Melalui proses internalisasi nilai tersebut, masyarakat secara gradual menerima hubungan antara identitas religius, struktur sosial, dan legitimasi kekuasaan sebagai sesuatu yang natural dalam kehidupan publik.

2. Produksi konsensus dan nasionalisasi hierarki sosial

Konsep hegemoni Antonio Gramsci memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami bagaimana struktur sosial yang hierarkis dapat bertahan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kekerasan atau paksaan negara. Gramsci membedakan antara *coercion* sebagai bentuk dominasi yang dijalankan melalui aparaturnegara seperti hukum, birokrasi, dan kekuatan militer, serta *consent* sebagai bentuk persetujuan sosial yang dibangun melalui proses kultural dalam masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, stabilitas kekuasaan tidak semata-mata dihasilkan oleh kemampuan negara memaksakan aturan, tetapi oleh keberhasilan kelompok dominan membangun kepemimpinan moral dan intelektual yang diterima secara luas oleh masyarakat. Nilai, norma, dan pandangan dunia yang mendukung

tatanan sosial tertentu kemudian diinternalisasi dan dipersepsikan sebagai “akal sehat” (*common sense*) yang tampak alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut berlangsung melalui berbagai institusi sosial seperti agama, pendidikan, keluarga, dan media yang secara terus-menerus memproduksi serta mereproduksi wacana dominan mengenai keteraturan sosial. Melalui mekanisme ini, struktur sosial yang hierarkis tidak dipandang sebagai bentuk ketimpangan yang perlu dipersoalkan, melainkan sebagai bagian dari tatanan moral dan budaya yang dianggap wajar oleh masyarakat luas (Thomas et al., 2024).

Gambar III.3 Mekanisme Kerja Hegemoni dalam Perspektif Gramsci



Sumber: Diolah dari Gramsci (1971)

https://www.marxists.org/archive/gramsci/prison_notebooks/

Dalam konteks India, representasi hierarki kasta sebagai bagian dari tatanan moral dan kosmis yang sah tidak hanya dibentuk secara abstrak, tetapi diwujudkan secara konkret melalui praktik keagamaan, tradisi sosial, serta sistem pendidikan dan bahasa yang terinstitusionalisasi. Dalam praktik keagamaan, ajaran mengenai dharma (kewajiban moral sesuai peran sosial) dan karma (hukum sebab-akibat) diajarkan melalui ritual, kitab suci, dan otoritas keagamaan sebagai prinsip yang mengatur keteraturan sosial. Individu diyakini memiliki kewajiban moral untuk

menjalankan peran sesuai kasta mereka, sehingga pelanggaran terhadap struktur tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmis. Representasi hierarki kasta sebagai bagian dari tatanan moral dan kosmis yang sah dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus praktik segregasi sosial dan keagamaan di beberapa wilayah pedesaan India, khususnya terkait pembatasan akses kelompok Dalit terhadap ruang-ruang sakral. Misalnya, kasus di negara bagian Gujarat, dimana komunitas Dalit dilarang memasuki kuil Hindu dan bahkan menghadapi kekerasan sosial ketika mencoba berpartisipasi dalam ritual keagamaan yang dianggap “*not aligned*” dengan posisi kasta mereka. Praktik ini menunjukkan bahwa ajaran mengenai *dharma* dan *karma* tidak hanya diajarkan secara normatif melalui kitab suci dan otoritas religius, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial sehari-hari yang mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan tertentu.

Tradisi sosial seperti perkawinan endogami (pernikahan dalam kasta yang sama) juga berfungsi mempertahankan batas-batas sosial antar kelompok, sekaligus mereproduksi struktur hierarki secara turun-temurun. Dalam sistem pendidikan, baik formal maupun informal, nilai-nilai tersebut diperkuat melalui kurikulum, narasi sejarah, serta praktik sosial di lingkungan sekolah yang sering kali mencerminkan stratifikasi sosial yang ada. Bahasa juga memainkan peran penting, misalnya melalui penggunaan istilah-istilah yang secara implisit menandai status sosial atau melalui dominasi bahasa tertentu yang secara historis dikaitkan dengan kelompok kasta tinggi (Desai & Dubey, 2012). Penguatan nilai-nilai hierarki kasta melalui sistem pendidikan dan praktik bahasa dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus diskriminasi terhadap siswa Dalit di lingkungan sekolah India seperti contoh kasus di negara bagian Rajasthan, di mana seorang siswa Dalit diperlakukan berbeda oleh guru dan teman sekelasnya, termasuk dipaksa duduk terpisah dan tidak diizinkan menyentuh fasilitas umum seperti wadah air minum, yang secara tidak langsung merefleksikan internalisasi norma kasta dalam praktik pendidikan sehari-hari. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal sistem pendidikan bersifat inklusif, dalam realitas sosial, interaksi di ruang kelas masih mencerminkan stratifikasi sosial yang lebih luas (The Wire, 2022).

Studi empiris menunjukkan bahwa praktik-praktik ini berkontribusi pada reproduksi stratifikasi sosial, di mana lebih dari 90% pernikahan di India masih bersifat endogami, yang secara langsung memperkuat keberlanjutan sistem kasta dalam kehidupan sosial (Desai & Dubey, 2012). Dengan demikian, integrasi antara agama, tradisi, pendidikan, dan bahasa menciptakan mekanisme kultural yang menjadikan hierarki kasta tampak sebagai sesuatu yang wajar, sah, dan sulit dipertanyakan. Praktik endogami sebagai mekanisme reproduksi stratifikasi sosial dapat diperkuat melalui studi kasus kekerasan terhadap pasangan *inter-caste marriage* di India, yang menunjukkan bagaimana norma sosial tetap ditegakkan secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kasus yang banyak dilaporkan adalah pembunuhan pasangan muda di Tamil Nadu pada 2022, di mana seorang pria dari kasta Dalit dibunuh setelah menikahi perempuan dari kasta yang lebih tinggi, yang dianggap melanggar norma sosial dan kehormatan keluarga. Praktik yang sering disebut sebagai “*honour killing*” ini masih terjadi di berbagai wilayah India sebagai bentuk sanksi sosial terhadap pelanggaran endogami (The Guardian, 2020). Kasus ini memperlihatkan bahwa angka endogami yang tinggi bukan sekadar fenomena statistik, tetapi merupakan hasil dari mekanisme sosial dan kultural yang secara aktif menegakkan batas-batas kasta.

Dominasi sosial dalam sistem kasta juga dipertahankan melalui praktik budaya, wacana identitas, dan institusi sosial yang membingkai hierarki sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat. Dalam praktik budaya, ritual keagamaan, festival, serta kebiasaan sehari-hari sering kali mencerminkan dan memperkuat pembagian kasta, seperti pemisahan peran dalam upacara atau pembatasan interaksi sosial antar kelompok. Hal ini dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus pembatasan partisipasi kelompok Dalit dalam ritual keagamaan dan festival di berbagai wilayah India yang terjadi di negara bagian Karnataka, dimana komunitas Dalit dilarang memasuki kuil dan tidak diperbolehkan mengambil bagian dalam prosesi festival keagamaan lokal, sementara peran-peran ritual utama tetap dijalankan oleh kelompok kasta atas. Dalam kasus tersebut, pembatasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilegitimasi melalui narasi tradisi dan “*social order*” yang dianggap telah berlangsung turun-temurun. Sementara itu beberapa

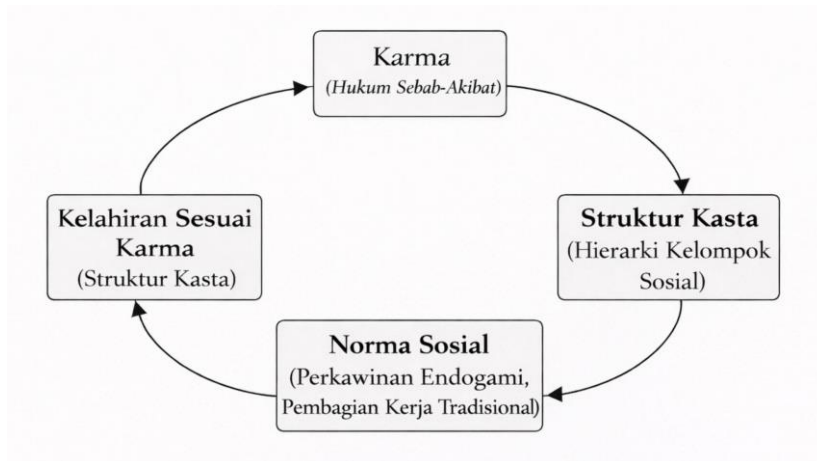
festival desa, pembagian peran ritual seperti siapa yang boleh membawa patung dewa, memimpin doa, atau mengakses ruang suci secara eksplisit ditentukan berdasarkan kasta, sehingga memperkuat batas sosial antar kelompok.

Dalam ranah wacana identitas, identitas kasta tidak hanya dipertahankan, tetapi juga direproduksi melalui narasi sosial, media, dan bahkan politik identitas, di mana individu mengidentifikasi diri mereka berdasarkan afiliasi kasta tertentu sebagai bagian dari identitas sosial yang sah. Institusi sosial seperti keluarga, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan berperan sebagai agen utama dalam mentransmisikan nilai-nilai tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, dalam konteks modern, institusi negara dan politik juga turut memperkuat identitas kasta, misalnya melalui kebijakan afirmasi (*reservation system*) yang secara tidak langsung menginstitutionalisasikan kategori kasta dalam struktur sosial dan politik.

Penelitian menunjukkan bahwa identitas kasta tetap menjadi faktor penting dalam menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan politik di India kontemporer (Jodhka, 2016). Kajian lain juga menegaskan bahwa media dan wacana publik seringkali mereproduksi stereotip kasta yang memperkuat persepsi hierarkis dalam masyarakat (Jeffrey, 2020). Reproduksi stereotip kasta melalui media dan wacana publik dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus representasi karakter Dalit dalam industri film Bollywood. Film populer India kerap menggambarkan karakter dari kasta bawah sebagai pekerja kasar, korban, atau individu yang membutuhkan “*rescue*” oleh tokoh dari kasta atas, sehingga memperkuat imajinasi sosial yang hierarkis, tak hanya itu media digital dan pemberitaan daring juga sering mereproduksi bias kasta melalui pemilihan bahasa, framing berita, serta kurangnya representasi kelompok Dalit dalam posisi sebagai narasumber atau aktor utama dalam diskursus publik. Dengan demikian, stereotip yang terus direproduksi melalui film, berita, dan media digital berkontribusi dalam mempertahankan struktur sosial yang timpang dengan membingkai perbedaan kasta sebagai sesuatu yang “*normalized*” dan tidak dipersoalkan dalam wacana publik.

Dalam kerangka ini, praktik budaya, wacana identitas, dan institusi sosial tidak hanya mencerminkan struktur sosial yang ada, tetapi juga secara aktif membentuk dan mempertahankan hierarki sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat (Ranisha & Dattatreya, 2024). Dengan demikian, hegemoni kasta tidak hanya bertahan melalui kekuatan struktural, tetapi melalui proses kultural yang mendalam yang menjadikan hierarki sebagai bagian dari kesadaran sosial yang diterima secara luas.

Gambar III.4 Siklus Hierarki Reproduksi Kasta



Sumber: Diolah dari *Cultural capital and linguistic hegemony: Journal of Visual and Performing Arts* (Ranisha & Dattatreya, 2024).
(<https://doi.org/10.31763/viperarts.v2i1.582>)

Internalisasi hierarki kasta melalui agama Hindu menjadi salah satu mekanisme utama dalam produksi konsensus sosial yang menopang keberlanjutan stratifikasi masyarakat. Dalam kerangka ini, doktrin religius tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai perangkat simbolik yang membentuk cara masyarakat memahami posisi sosial dan relasi kekuasaan. Konsep *karma* dan *reinkarnasi* memainkan peran penting sebagai penjelasan teologis mengenai asal-usul perbedaan status sosial, di mana kondisi kelahiran seseorang dalam struktur kasta dipahami sebagai konsekuensi moral dari tindakan pada kehidupan sebelumnya (Al Jazeera, 2020).

Hal ini dapat dilihat secara konkret dalam studi kasus di Uttar Pradesh, di mana seorang anak Dalit dipukuli oleh guru setelah dianggap “*transgressing caste*

boundaries” dengan menyentuh wadah air milik siswa dari kasta lebih tinggi. Dalam pembelaannya, sebagian anggota komunitas lokal justru merasionalisasi perlakuan tersebut sebagai sesuatu yang “*consistent with the established social order*” yang telah diwariskan, yang secara implisit berkaitan dengan keyakinan bahwa posisi sosial seseorang merupakan hasil dari karma di kehidupan sebelumnya. di berbagai komunitas pedesaan, keyakinan terhadap reinkarnasi masih digunakan untuk menjelaskan mengapa kelompok tertentu “*birth*” dalam kondisi sosial yang lebih rendah, sehingga ketimpangan sosial tidak dipandang sebagai ketidakadilan struktural, melainkan sebagai konsekuensi moral yang harus diterima (Al Jazeera, 2020).

Studi kasus ini memperlihatkan bahwa konsep karma dan reinkarnasi tidak hanya berfungsi sebagai ajaran teologis, tetapi juga sebagai perangkat ideologis yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap ketimpangan sosial. Dengan demikian, legitimasi terhadap stratifikasi kasta tidak dipaksakan secara eksternal, melainkan diinternalisasi sebagai bagian dari keyakinan moral yang membuat hierarki sosial tampak alami, sah, dan *taken for granted* dalam kesadaran kolektif masyarakat (Al Jazeera, 2020).

Dengan demikian, ketimpangan sosial tidak dimaknai sebagai ketidakadilan struktural yang dihasilkan oleh relasi kekuasaan, melainkan sebagai manifestasi dari hukum kosmis yang dianggap adil dan rasional dalam kerangka spiritual. Integrasi antara ajaran teologis dan praktik sosial ini secara bertahap membentuk struktur makna kolektif yang menempatkan hierarki sosial sebagai bagian dari keteraturan moral yang dianggap sah dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, agama tidak hanya memberikan justifikasi ideologis terhadap stratifikasi sosial, tetapi juga berperan dalam proses internalisasi nilai yang menjadikan hierarki tersebut diterima sebagai kewajiban moral oleh anggota masyarakat, sehingga reproduksi sistem kasta dapat berlangsung secara berkelanjutan melalui kesadaran sosial yang telah terhegemoni (Goghari & Kusi, 2023).

Pembagian kerja tradisional yang melekat pada sistem kasta mengikat individu pada jenis pekerjaan tertentu berdasarkan kelahiran, yang tidak hanya

membatasi peluang ekonomi tetapi juga memperkuat identitas sosial yang bersifat hierarkis. Dalam perspektif hegemonik, praktik-praktik tersebut menciptakan kontinuitas ideologis antara nilai religius dan struktur sosial material, di mana ajaran agama memberikan legitimasi moral terhadap praktik sosial yang sebenarnya bersifat eksklusif dan membatasi. Akibatnya, masyarakat tidak lagi memandang stratifikasi sebagai hasil konstruksi historis yang dapat dipersoalkan, melainkan sebagai bagian dari keteraturan kosmis yang dianggap sah dan tidak perlu dipertanyakan, sehingga relasi kekuasaan yang timpang dapat diterima secara sukarela sebagai bagian dari kesadaran kolektif yang telah terinternalisasi (Goghari & Kusi, 2023).

Institusi sosial modern memainkan peran strategis dalam memperluas dan menyesuaikan produksi konsensus hegemonik dalam konteks India kontemporer melalui berbagai saluran yang lebih sistematis dan terorganisir, seperti pendidikan formal, media massa, dan budaya populer. Dalam bidang pendidikan, kurikulum tidak hanya mentransmisikan pengetahuan akademik, tetapi juga mereproduksi narasi sejarah dan identitas nasional yang menempatkan Hindu sebagai inti peradaban India, sehingga membentuk orientasi kognitif generasi muda terhadap pemahaman kebangsaan. Media massa, baik konvensional maupun digital, turut memperkuat proses ini dengan menyebarkan wacana yang menggunakan simbol religius dengan identitas nasional, misalnya melalui pemberitaan, film, atau kampanye politik yang menonjolkan nilai-nilai mayoritas sebagai representasi "*authentic Indian identity*" dalam ranah budaya populer, representasi identitas Hindu sering kali dikemas secara menarik dan emosional sehingga lebih mudah diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Wacana nasionalisme religius yang berkembang kemudian mengkonstruksi hubungan yang erat antara agama dan negara, di mana identitas Hindu diposisikan sebagai fondasi legitimasi politik dan kebangsaan. Studi mengenai intervensi agama dalam politik India menunjukkan bahwa narasi Hindutva secara aktif membentuk kesadaran kolektif melalui penggunaan simbol, reinterpretasi sejarah, serta retorika politik yang menyatukan agama dengan nasionalisme (Thomas et al., 2024). Akibatnya, terbentuk suatu *common sense* baru dalam masyarakat yang memandang integrasi

antara agama dan politik sebagai sesuatu yang wajar, sah, dan bahkan diperlukan dalam sistem demokrasi, sehingga memperkuat legitimasi dominasi simbolik kelompok mayoritas dalam ruang publik.

Namun demikian, dalam perspektif Antonio Gramsci, dominasi kultural tidak pernah sepenuhnya stabil atau total karena selalu membuka ruang bagi munculnya resistensi dari kelompok yang termarjinalkan. Dalam konteks sistem kasta di India, salah satu bentuk resistensi yang paling signifikan muncul melalui gerakan Dalit serta pemikiran kritis B. R. Ambedkar yang berupaya menantang legitimasi ideologis Brahmanisme. Ambedkarisme memandang sistem kasta bukan sebagai tatanan moral yang berasal dari hukum kosmis atau ketentuan religius, melainkan sebagai konstruksi sosial yang diproduksi secara historis untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, Ambedkar menolak justifikasi religius terhadap stratifikasi sosial dan menegaskan bahwa sistem kasta bertentangan dengan prinsip dasar kesetaraan manusia serta nilai-nilai demokrasi modern (Muni, 2025).

Argumen Ambedkarisme mengenai penolakan terhadap legitimasi religius sistem kasta dapat diperkuat melalui studi kasus gerakan konversi massal ke agama Buddha yang dipimpin oleh B. R. Ambedkar pada tahun 1956 di Nagpur, India, yang hingga kini terus direproduksi sebagai praktik sosial dan politik oleh komunitas Dalit. Dalam peristiwa tersebut, Ambedkar bersama ratusan ribu pengikutnya secara simbolik meninggalkan Hindu sebagai bentuk penolakan terhadap sistem kasta yang dianggap menindas, dan memilih Buddhisme sebagai alternatif yang lebih egaliter. Berlanjut dalam bentuk peringatan tahunan *Dhammachakra Pravartan Day* yang masih diikuti oleh ribuan hingga jutaan orang Dalit sebagai ekspresi identitas politik dan resistensi terhadap dominasi simbolik kasta. Studi kasus ini memperlihatkan bahwa Ambedkarisme tidak hanya bersifat teoritis, tetapi terwujud dalam praktik sosial nyata yang mendekonstruksi legitimasi religius kasta dan membangun kesadaran kolektif alternatif yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan sosial (Al Jazeera, 2023).

Dalam kerangka ini, gerakan Dalit tidak hanya berfokus pada perjuangan sosial dan politik, tetapi juga pada upaya dekonstruksi wacana religius yang selama

berabad-abad digunakan untuk melegitimasi hierarki sosial. Strategi kontra-hegemonik tersebut diwujudkan melalui reinterpretasi ajaran agama, produksi wacana alternatif mengenai keadilan sosial, serta advokasi terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi India. Melalui proses ini, identitas Dalit secara bertahap direkonstruksi sebagai identitas politik yang kritis terhadap dominasi simbolik kasta, terutama dalam konteks masyarakat urban yang memberikan ruang lebih besar bagi mobilisasi sosial dan artikulasi politik. Kajian mengenai dinamika identitas Dalit urban menunjukkan bahwa reinterpretasi nilai-nilai agama yang lebih egaliter, dikombinasikan dengan kesadaran hukum dan hak kewargaan, menjadi strategi penting dalam membangun kesadaran kolektif yang kritis sekaligus membentuk blok sosial alternatif yang berupaya menantang dan merombak struktur hegemoni yang telah lama mendominasi tatanan sosial India (Muni, 2025).

Tabel III.1 Indikator Mobilitas Sosial dan Ketimpangan Kasta di India

Indikator	Kelompok Kasta Bawah (SC/Dalit)	Kelompok Kasta Atas	Keterangan
Partisipasi Pendidikan Tinggi	±23%	±35%	Akses meningkat, tetapi masih timpang
Pekerja di Sektor Informal	±70%	±40%	Menunjukkan ketimpangan ekonomi
Akses Pekerjaan Formal	Rendah	Tinggi	Dipengaruhi diskriminasi sosial
Partisipasi Digital	Meningkat (>60% populasi)	Tinggi	Membuka ruang mobilitas & resistensi

Sumber: Diolah dari Desai & Dubey (2012) dan Jodhka (2016).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18301943>,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3379882/>

Dinamika sosial kontemporer di India menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur ekonomi, urbanisasi yang semakin pesat, serta perluasan akses

terhadap pendidikan dan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi negosiasi identitas sosial yang sebelumnya lebih kaku dalam sistem kasta tradisional. Peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok Dalit (Scheduled Castes), menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam mobilitas sosial, di mana tingkat partisipasi pendidikan tinggi meningkat dari sekitar 8,5% pada awal 2000-an menjadi lebih dari 23% pada dekade terakhir, meskipun masih tertinggal dibandingkan kelompok kasta atas yang mencapai lebih dari 35% (Desai & Dubey, 2012). Dalam sektor ekonomi, meskipun peluang kerja semakin terbuka, sekitar 70% pekerja dari kelompok kasta bawah masih terkonsentrasi di sektor informal, yang menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan posisi strategis (Jodhka, 2016).

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memperlihatkan perubahan signifikan, di mana penetrasi internet di India telah mencapai lebih dari 60% populasi, sehingga memungkinkan kelompok subordinat memanfaatkan ruang digital sebagai medium artikulasi identitas dan resistensi sosial (Ahmad & Chahal, 2025). Meskipun demikian, modernisasi sosial tidak serta-merta menghapus hierarki kasta, melainkan menciptakan kondisi yang memungkinkan munculnya bentuk mobilitas sosial yang lebih fleksibel serta artikulasi identitas yang lebih kompleks di ruang publik. Sejalan dengan perkembangan tersebut, akses terhadap media digital dan jaringan komunikasi modern semakin memperkuat peran ruang publik sebagai arena baru dalam pembentukan dan negosiasi identitas sosial.

Identitas kolektif tidak lagi hanya dibentuk melalui struktur tradisional, tetapi juga melalui ruang digital yang memungkinkan artikulasi kritik, solidaritas, serta mobilitas sosial secara lebih luas. Salah satu studi kasus yang dapat memperkuat argumen tersebut adalah mobilisasi digital komunitas Dalit di India melalui media sosial dalam merespons diskriminasi berbasis kasta. Misalnya, pasca peristiwa bunuh diri mahasiswa Dalit Rohith Vemula pada tahun 2016 di University of Hyderabad, ruang digital seperti Twitter dan Facebook menjadi arena penting bagi aktivisme Dalit untuk mengartikulasikan ketidakadilan struktural yang mereka alami. Tagar seperti #JusticeForRohith dan #DalitLivesMatter tidak hanya menyebarkan kesadaran publik secara nasional, tetapi juga menghubungkan

solidaritas lintas wilayah dan bahkan global. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas Dalit tidak lagi semata-mata dibentuk dalam kerangka sosial tradisional seperti sistem kasta, melainkan dinegosiasikan secara aktif dalam ruang digital yang lebih terbuka dan partisipatif. Melalui media digital, kelompok terpinggirkan mampu membangun narasi tandingan terhadap dominasi wacana elite, sekaligus memperluas akses terhadap peluang mobilitas sosial dan politik (The Guardian, 2020).

Studi mengenai perubahan hierarki sosial di India menunjukkan bahwa meskipun sistem kasta masih memiliki pengaruh kuat dalam menentukan relasi sosial, telah terjadi pergeseran dalam cara hierarki tersebut diekspresikan dan dinegosiasikan, terutama akibat pengaruh modernisasi, peningkatan tingkat pendidikan, serta berkembangnya media digital yang memperluas ruang diskursus publik mengenai kesetaraan dan keadilan sosial (Ahmad & Chahal, 2025). Dalam perspektif Gramscian, kondisi ini mencerminkan adanya pertarungan ideologis yang semakin terbuka di ranah masyarakat sipil, di mana kelompok subordinat berupaya membangun kontra-hegemoni melalui produksi wacana alternatif yang menekankan nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, serta reinterpretasi terhadap norma-norma budaya dan agama yang selama ini digunakan untuk mempertahankan legitimasi hierarki sosial.

Secara keseluruhan, produksi konsensus sosial dan normalisasi hierarki dalam konteks agama Hindu menunjukkan bagaimana hegemoni bekerja melalui proses internalisasi nilai, simbol, dan praktik sosial yang secara bertahap membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Dalam proses ini, stratifikasi sosial tidak lagi dipersepsikan sebagai konstruksi sosial yang dapat diperdebatkan, melainkan sebagai bagian dari tatanan moral yang dianggap wajar dan sah dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai religius, simbol-simbol budaya, serta praktik sosial yang berakar dalam tradisi Hindu berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang membentuk cara masyarakat memahami hubungan antara identitas, status sosial, dan keteraturan sosial. Melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, hierarki sosial kemudian diterima sebagai bagian dari struktur makna kolektif yang mengatur relasi antar kelompok dalam masyarakat.

Pada saat yang sama, institusi sosial modern seperti sistem pendidikan, media massa, dan berbagai organisasi masyarakat sipil turut memperkuat reproduksi identitas mayoritas dengan mengartikulasikan nilai-nilai budaya dominan sebagai representasi dari identitas nasional yang sah.

Meskipun demikian, dinamika sosial kontemporer memperlihatkan bahwa hegemoni tidak pernah sepenuhnya stabil atau final. Munculnya resistensi dari kelompok Dalit serta berbagai gerakan egalitarian menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menantang legitimasi simbolik yang menopang stratifikasi sosial tersebut. Melalui produksi wacana alternatif mengenai kesetaraan, keadilan sosial, serta reinterpretasi terhadap nilai-nilai agama, kelompok subordinat berupaya membangun kesadaran kritis yang mampu menentang dominasi ideologis yang telah lama mengakar. Oleh karena itu, dalam perspektif Gramsci, agama tidak hanya dapat dipahami sebagai aparatus kultural yang membangun persetujuan sosial terhadap struktur hierarki, tetapi juga sebagai arena kontestasi ideologis yang terus-menerus diperebutkan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat India kontemporer.

3. Hindutva sebagai proyek hegemoni dalam demokrasi

Hindutva dalam konteks politik India kontemporer tidak dapat dipahami semata sebagai ekspresi religius, melainkan sebagai proyek ideologis yang secara sistematis berupaya membangun hegemoni kultural dalam kerangka demokrasi elektoral modern. Berbeda dengan Hinduisme sebagai tradisi spiritual yang secara historis bersifat plural, beragam, dan terbuka terhadap berbagai praktik keagamaan, Hindutva muncul sebagai konstruksi politik yang menata ulang identitas Hindu menjadi identitas nasional yang terpusat dan dominan. Dalam kerangka hegemoni Antonio Gramsci, proyek ini dapat dipahami sebagai upaya membangun "*historical bloc*" yang menghubungkan kepentingan elite politik dengan dukungan sosial dari mayoritas masyarakat melalui produksi kepemimpinan moral dan intelektual yang dilembagakan dalam institusi negara maupun masyarakat sipil (Jaffrelot, 2021).

Salah satu studi kasus yang dapat memperkuat argumen tersebut adalah proyek hegemoni politik yang dibangun oleh Narendra Modi bersama Bharatiya

Janata Party sejak kemenangan pemilu 2014. Dalam kerangka Antonio Gramsci, keberhasilan ini dapat dipahami sebagai pembentukan *historical bloc* yang menghubungkan kepentingan elite politik dengan dukungan luas dari masyarakat melalui produksi kepemimpinan moral dan intelektual berbasis ideologi Hindutva. Melalui jaringan organisasi seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh, nilai-nilai nasionalisme Hindu disosialisasikan secara sistematis tidak hanya melalui institusi negara, tetapi juga melalui masyarakat sipil, pendidikan, dan media. Strategi ini diperkuat dengan pemanfaatan media digital dan kampanye komunikasi politik yang efektif, sehingga mampu membangun konsensus sosial lintas kelas, termasuk menarik dukungan dari kelompok OBC dan kelas menengah urban. Dengan demikian, dominasi politik tidak semata-mata bersandar pada kekuasaan koersif, melainkan pada legitimasi kultural yang diproduksi secara terus-menerus. Oleh karena itu, kekuasaan BJP melalui institusi negara dan pengaruh ideologis di ruang publik, menunjukkan bagaimana proyek hegemoni modern dijalankan secara sistematis dalam konteks demokrasi elektoral India (The New York Times, 2020).

Melalui strategi tersebut, identitas religius tidak hanya diposisikan sebagai ekspresi spiritual individu, tetapi sebagai dasar legitimasi kultural bagi pembentukan identitas nasional yang homogen. Narasi kebangsaan kemudian dikonstruksi melalui simbol-simbol religius, memori historis, serta representasi budaya yang menempatkan Hindu sebagai pusat dari definisi keindiaan (*Indianness*). Dalam proses tersebut, hegemoni tidak bertumpu pada penggunaan kekuatan koersif negara semata, melainkan pada kemampuan untuk membentuk dan memelihara persetujuan sosial melalui berbagai institusi dan praktik kultural yang bekerja secara simultan dan berkelanjutan. Arena seperti pendidikan berperan dalam menanamkan nilai, sejarah, dan interpretasi tertentu yang membentuk cara pandang generasi baru terhadap identitas kebangsaan, media massa dan platform komunikasi publik berfungsi memperluas serta memperkuat narasi dominan dengan mereproduksi simbol, bahasa, dan framing yang selaras dengan ideologi yang diusung (Jaffrelot, 2021).

Organisasi sosial menjadi ruang artikulasi dan mobilisasi yang menginternalisasi nilai tersebut dalam praktik keseharian masyarakat, sementara

wacana publik berperan sebagai medan diskursif tempat makna tentang identitas, bangsa, dan legitimasi politik dinegosiasikan dan distandarisasi. Salah satu studi kasus yang dapat memperkuat argumen tersebut adalah peran organisasi sosial *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) dalam membentuk dan menyebarkan ideologi nasionalisme Hindu di India. Sebagai organisasi masyarakat sipil, RSS tidak hanya berfungsi sebagai wadah mobilisasi sosial, tetapi juga sebagai ruang artikulasi nilai yang diinternalisasi melalui praktik keseharian seperti pendidikan kader, kegiatan komunitas, dan disiplin kolektif yang menanamkan identitas kebangsaan berbasis Hindutva. Di sisi lain, wacana publik baik melalui media arus utama maupun platform digital menjadi medan diskursif di mana makna tentang identitas nasional, keagamaan, dan legitimasi politik dinegosiasikan sekaligus distandarisasi. Misalnya, dalam isu kewarganegaraan seperti kebijakan *Citizenship Amendment Act* (CAA), narasi tentang “*nation*” dan “*authentic identity*” diproduksi secara intens melalui pidato politik, kampanye media, dan debat publik, yang pada akhirnya membentuk persepsi kolektif masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana organisasi sosial dan wacana publik bekerja secara sinergis dalam membangun hegemoni kultural (BBC News, 2020).

Melalui interaksi berbagai arena ini, terbentuk proses normalisasi yang perlahan mengaitkan identitas religius dengan nasionalisme politik sehingga hubungan keduanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dipersoalkan. Akibatnya, konsensus kultural yang terbentuk tidak hanya memperkuat posisi kelompok dominan, tetapi juga membuat struktur dominasi tampak sah, natural, dan sejalan dengan aspirasi kolektif masyarakat, sehingga legitimasi kekuasaan tidak lagi bergantung pada paksaan langsung, melainkan pada penerimaan yang terinternalisasi dalam kesadaran sosial sehari-hari (Jaffrelot, 2021).

Secara ideologis, Hindutva memosisikan India sebagai entitas kebangsaan yang berakar pada identitas Hindu, sehingga konsep bangsa tidak dipahami sebagai konstruksi sipil yang sepenuhnya netral terhadap agama, melainkan sebagai refleksi dari warisan historis dan kultural mayoritas yang dianggap merepresentasikan esensi peradaban India. Dalam perspektif ini, identitas nasional

dibangun melalui penyatuan unsur religius, budaya, dan sejarah yang dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait, sehingga batas antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan menjadi kabur. Akibatnya, identitas Hindu tidak hanya berfungsi sebagai identitas spiritual, tetapi juga diartikulasikan sebagai fondasi utama dalam mendefinisikan *Indianness*, yang kemudian memengaruhi cara masyarakat memahami keanggotaan dalam komunitas nasional (Thomas et al., 2024).

Dalam praktik politik demokrasi modern, perspektif tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi artikulasi wacana dan institusional yang menempatkan simbol serta nilai-nilai Hindu sebagai bagian integral dari ruang publik dan narasi kebangsaan. Pada level wacana, retorika politik menekankan kesinambungan historis antara tradisi Hindu dan identitas nasional, sehingga menciptakan legitimasi yang menghubungkan masa lalu kultural dengan proyek politik kontemporer. Pada level kebijakan dan institusi, simbol-simbol religius mayoritas diakomodasi dalam ruang publik melalui perayaan budaya, representasi simbolik negara, serta kebijakan yang memberikan ruang bagi ekspresi identitas tersebut. Selain itu, institusi pendidikan, media, dan komunikasi politik berperan sebagai sarana reproduksi narasi dominan yang secara konsisten memperkuat keterkaitan antara identitas religius dan identitas nasional, sehingga membentuk konsensus kultural yang mengintegrasikan nilai, simbol, dan praktik Hindu ke dalam konstruksi kebangsaan dalam kerangka demokrasi (Thomas et al., 2024).

Penelitian mengenai intervensi agama dalam politik India menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Partai Bharatiya Janata Party (BJP), simbol-simbol religius Hindu dan wacana identitas mayoritas diintegrasikan secara sistematis dalam strategi komunikasi politik guna memperluas legitimasi politik serta mengkonsolidasikan dukungan elektoral dari basis sosial mayoritas. Integrasi tersebut mencerminkan bagaimana ideologi Hindutva berfungsi sebagai perangkat hegemonik yang tidak hanya memobilisasi identitas religius sebagai sumber solidaritas politik, tetapi juga membingkai identitas tersebut sebagai fondasi legitimasi demokratis dalam sistem politik elektoral (Thomas et al., 2024). Melalui proses ini, identitas religius mayoritas secara bertahap dilegitimasi sebagai

representasi dari kepentingan nasional, sehingga hubungan antara agama, nasionalisme, dan legitimasi politik semakin terinstitusionalisasi dalam praktik demokrasi kontemporer di India.

Tabel III.2 Hasil Pemilu dan Konsolidasi Elektoral Bharatiya Janata Party (BJP)

Tahun Pemilu	Persentase Suara Nasional	Jumlah Kursi Lok Sabha	Status Pemerintahan	Implikasi Hegemonik
2014	±31%	282 dari 543	Mayoritas tunggal	Awal konsolidasi kekuasaan berbasis Hindutva
2019	±37%	303 dari 543	Mayoritas diperkuat	Penguatan legitimasi ideologi dalam demokrasi

Sumber: Diolah dari Election Commission of India (2019) (<https://www.indiavotes.com/>)

Data statistik elektoral memberikan dasar empiris yang kuat untuk menunjukkan bagaimana ideologi Hindutva tidak hanya beroperasi pada tataran kultural, tetapi juga berhasil dikonversi menjadi kekuatan politik dalam sistem demokrasi elektoral India. Dalam hal ini, kinerja Bharatiya Janata Party (BJP) dalam pemilihan umum nasional menjadi indikator penting. Pada pemilu 2014, BJP memperoleh sekitar 31% suara nasional dan berhasil mengamankan 282 dari 543 kursi di Lok Sabha, yang menandai kemenangan mayoritas tunggal pertama dalam beberapa dekade. Tren ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga menguat pada pemilu 2019, dimana BJP meningkatkan perolehan suaranya menjadi lebih dari 37% dan memperoleh 303 kursi parlemen. Peningkatan signifikan ini menunjukkan adanya konsolidasi dukungan elektoral dari basis sosial mayoritas yang semakin solid, sekaligus mencerminkan keberhasilan strategi politik yang mengintegrasikan identitas religius dengan narasi kebangsaan (Election Commission of India, 2019).

Secara analitis, capaian elektoral tersebut dapat dipahami sebagai

manifestasi konkret dari keberhasilan proyek hegemonik Hindutva dalam membangun konsensus sosial yang luas. Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, kemenangan berulang dalam pemilu tidak hanya merepresentasikan legitimasi formal yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, tetapi juga menunjukkan adanya legitimasi kultural yang telah tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dengan kata lain, dukungan elektoral terhadap BJP mencerminkan bagaimana identitas Hindu sebagai identitas mayoritas telah berhasil dibingkai sebagai representasi kepentingan nasional yang sah. Oleh karena itu, data statistik elektoral ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kuantitatif atas dominasi politik BJP, tetapi juga sebagai indikator bahwa proses produksi konsensus yang dibangun melalui institusi masyarakat sipil, wacana publik, serta simbolisme religius telah berhasil diterjemahkan ke dalam bentuk dukungan politik yang nyata dalam sistem demokrasi India (Jaffrelot, 2021).

Dalam kerangka hegemoni, demokrasi elektoral tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai ruang strategis yang memungkinkan proyek ideologis mayoritarian memperoleh legitimasi yang bersifat ganda, yakni formal dan kultural. Melalui kemenangan elektoral yang berulang, ideologi Hindutva tidak sekadar mendapatkan pengakuan dalam bentuk legalitas kekuasaan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai representasi kehendak kolektif mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi rasional-legal yang dihasilkan dari proses pemilu berjalan beriringan dengan legitimasi moral yang dibangun melalui internalisasi nilai di ranah masyarakat sipil. Peran *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) menjadi krusial sebagai aparatus ideologis yang beroperasi di luar struktur negara, namun memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk orientasi kultural masyarakat. Melalui jaringan sekolah, pelatihan kader seperti *shakha*, produksi literatur ideologis, serta penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya, RSS secara sistematis menanamkan narasi tentang India sebagai bangsa Hindu yang memiliki kesatuan sejarah, budaya, dan identitas religius. Proses ini mencerminkan fungsi RSS sebagai *ideological apparatus* yang memproduksi dan mereproduksi kesadaran kolektif, sehingga nilai-nilai Hindutva tidak hanya hadir sebagai wacana politik, tetapi juga sebagai

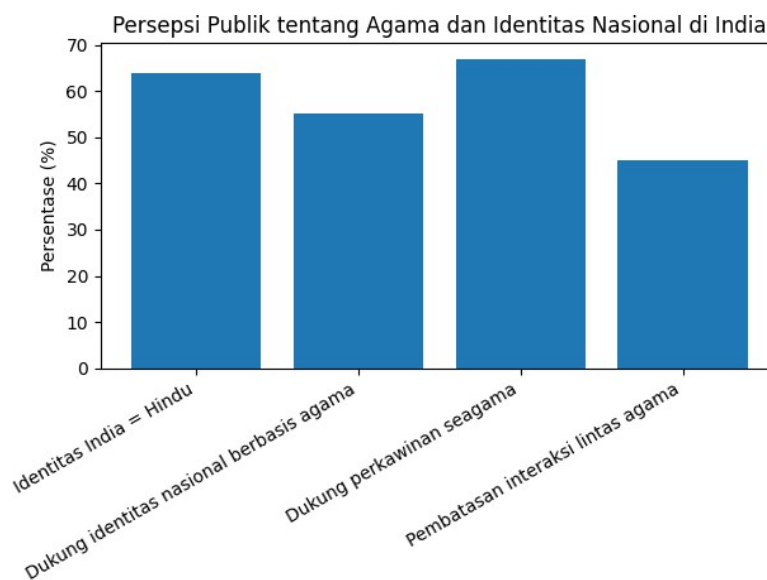
common sense yang diterima secara luas oleh masyarakat. Keterhubungan ideologis antara RSS dan Bharatiya Janata Party (BJP) menunjukkan adanya kesinambungan antara produksi konsensus di masyarakat sipil dan artikulasi kekuasaan di tingkat negara, di mana kader-kader yang telah mengalami proses sosialisasi ideologis dalam RSS kemudian mengisi posisi strategis dalam struktur politik BJP. Dengan demikian, demokrasi tidak meniadakan hegemoni, melainkan justru menjadi medium yang memungkinkan integrasi antara legitimasi elektoral dan dominasi ideologis, sehingga proyek Hindutva dapat beroperasi secara efektif dalam sistem politik modern tanpa harus bergantung pada paksaan koersif secara langsung (Britannica, 2026)

Lebih jauh, Hindutva sebagai proyek hegemoni juga bekerja melalui rekonstruksi sejarah dan memori kolektif. Narasi tentang kejayaan peradaban Hindu dan pengalaman kolonial sering digunakan untuk membangun solidaritas mayoritas serta membingkai politik kontemporer sebagai bagian dari “*national resurgence*” Salah satu studi kasus yang paling jelas untuk memperkuat argumen tersebut adalah sengketa dan pembangunan Kuil Ram di lokasi Ram Janmabhoomi di Ayodhya, yang berpuncak pada peletakan batu pertama tahun 2020 dan peresmian kuil pada 2024 oleh Narendra Modi. Dalam proyek ini, ideologi Hindutva merekonstruksi sejarah melalui narasi bahwa lokasi tersebut merupakan tempat kelahiran dewa Rama yang “*seized*” pada masa kekuasaan Mughal, khususnya dikaitkan dengan Babur, sehingga memori kolektif tentang kejayaan peradaban Hindu dan pengalaman dominasi masa lalu dihidupkan kembali untuk membangun solidaritas mayoritas. Proses ini tidak hanya berlangsung melalui institusi negara, tetapi juga diperkuat oleh organisasi seperti *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) dan jaringan politik Bharatiya Janata Party, yang memproduksi dan menyebarkan narasi “*national resurgence*” sebagai bagian dari politik kontemporer. Dengan demikian, pembangunan kuil tidak sekadar proyek keagamaan, melainkan simbol hegemonik yang menggabungkan sejarah, identitas, dan legitimasi politik dalam satu kerangka ideologis (Reuters, 2024).

Dalam perspektif Gramsci, kontrol atas narasi sejarah merupakan bagian dari perjuangan ideologis untuk menentukan makna realitas sosial. Ketika

interpretasi tertentu atas sejarah menjadi dominan dalam kurikulum pendidikan, media, dan diskursus publik, maka ia membentuk common sense masyarakat tentang siapa yang dianggap otentik sebagai bangsa dan siapa yang berada di luar identitas tersebut. Studi tentang politik identitas di India menegaskan bahwa partai politik memanfaatkan narasi budaya dan simbolisme religius untuk membangun kohesi sosial sekaligus mengkonsolidasikan kekuasaan (Pinatih, 2023).

Gambar III.5 Persepsi Publik tentang Hubungan Agama dan Identitas Nasional di India



Sumber: Diolah dari Pew Research Center (2021)
<https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india>

Hegemoni Hindutva tidak hanya beroperasi pada level elite politik dan institusi, tetapi juga telah mengakar dalam kesadaran sosial masyarakat. Secara empiris, survei nasional dari *Pew Research Center* menunjukkan bahwa sekitar 64% responden Hindu di India menyatakan bahwa menjadi “*truly Indian*” sangat terkait dengan menjadi Hindu, sementara lebih dari separuh responden mendukung keterkaitan antara identitas nasional dan nilai-nilai religius mayoritas (*Pew Research Center*, 2021). Temuan ini mengindikasikan bahwa narasi Hindutva telah melampaui ruang politik formal dan menjadi bagian dari *common sense* yang diterima secara luas. Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, kondisi

tersebut mencerminkan keberhasilan produksi konsensus kultural, di mana ideologi dominan tidak lagi dipaksakan melalui *coercion*, melainkan diterima secara sukarela sebagai kebenaran sosial yang tampak alami.

Lebih lanjut, internalisasi identitas religius sebagai identitas nasional juga tercermin dalam sikap publik terhadap pluralisme dan relasi antar agama. Survei yang sama menunjukkan adanya kecenderungan kuat terhadap segregasi sosial berbasis agama, seperti preferensi terhadap perkawinan endogami dan pembatasan interaksi lintas kelompok, meskipun secara normatif masyarakat tetap menyatakan dukungan terhadap toleransi (Pew Research Center, 2021). Studi lain menegaskan bahwa meningkatnya nasionalisme religius di India turut membentuk orientasi politik dan sosial masyarakat, di mana identitas mayoritas menjadi kerangka utama dalam memahami kewargaan dan kebangsaan (Mehta, 2022). Dengan demikian, terjadi ambivalensi antara nilai demokrasi modern yang menekankan pluralisme dan kecenderungan mayoritarian yang semakin menguat dalam praktik sosial sehari-hari.

Dalam konteks ini, data persepsi publik menjadi bukti empiris bahwa proyek hegemonik Hindutva tidak hanya berhasil dalam arena elektoral, tetapi juga dalam membentuk orientasi kognitif dan afektif masyarakat terhadap identitas nasional. Legitimasi kekuasaan tidak semata-mata diperoleh melalui kemenangan pemilu atau kontrol institusi negara, tetapi juga melalui penerimaan luas masyarakat terhadap narasi ideologis yang menghubungkan agama dengan nasionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni bekerja secara mendalam melalui internalisasi nilai yang direproduksi dalam kehidupan sosial, sehingga batas antara identitas religius dan identitas politik menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, dalam kerangka Gramscian, keberhasilan Hindutva sebagai proyek hegemonik terletak pada kemampuannya mengintegrasikan legitimasi kultural dengan legitimasi demokratis, sehingga dominasi ideologis dapat dipertahankan secara berkelanjutan dalam masyarakat (Jaffrelot, 2021).

Dalam konteks ini, hegemoni bekerja dengan cara menormalisasi integrasi agama dan politik sebagai sesuatu yang sah dan representatif terhadap kehendak rakyat. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa wacana Hindutva membingkai

kebijakan publik sebagai bagian dari perlindungan identitas mayoritas, sehingga kritik terhadapnya sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nasionalisme (Thomas et al., 2024). Strategi ini memperlihatkan bagaimana legitimasi moral dan legitimasi demokratis dapat disatukan dalam satu proyek ideologis yang koheren.

Namun, sebagaimana ditegaskan dalam teori Gramsci, hegemoni selalu bersifat dinamis dan menghadapi potensi resistensi. Kritik terhadap Hindutva muncul dari berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk akademisi, aktivis hak minoritas, dan gerakan sosial yang menekankan pluralisme serta keadilan sosial. Dengan demikian, Hindutva sebagai proyek hegemoni tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan beroperasi dalam medan politik yang kompetitif dan penuh negosiasi. Dengan demikian, hegemoni budaya dalam agama Hindu tidak hanya merupakan warisan tradisional, tetapi juga strategi kontemporer dalam membangun dan mempertahankan dominasi ideologis dalam sistem politik India.

B. Implementasi Kasta dalam Sistem Politik di India

Kasta merupakan salah satu struktur sosial paling mendasar dalam masyarakat India yang secara historis tidak hanya mengatur hubungan sosial dan ekonomi, tetapi juga membentuk distribusi kekuasaan dalam kehidupan publik. Meskipun India telah mengadopsi sistem demokrasi modern pasca kemerdekaan, stratifikasi sosial berbasis kasta tidak serta-merta menghilang, melainkan mengalami transformasi dalam bentuk yang lebih politis. Dalam konteks ini, kasta tetap menjadi kerangka identitas yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama karena keterkaitannya dengan sejarah ketimpangan, akses terhadap sumber daya, serta posisi sosial dalam struktur hierarki tradisional. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi India, kasta tidak lagi hanya berfungsi sebagai kategori sosial, tetapi telah menjadi variabel penting yang mempengaruhi dinamika kekuasaan dan praktik politik kontemporer (Chandra, 2019).

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di India tidak sepenuhnya menghapus stratifikasi sosial, tetapi justru mengintegrasikannya ke dalam mekanisme politik formal. Dalam praktiknya, identitas kasta digunakan sebagai dasar mobilisasi politik, baik oleh partai politik maupun oleh kelompok

masyarakat itu sendiri. Proses ini mencerminkan adanya politisasi identitas, di mana kasta tidak lagi bersifat pasif, melainkan menjadi sumber daya politik yang dapat diaktifkan untuk memperoleh representasi dan akses terhadap kekuasaan (Jaffrelot, 2021). Lebih lanjut, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa kasta berperan sebagai penghubung antara struktur sosial dan praktik politik dalam demokrasi elektoral India. Di satu sisi, kasta mempengaruhi perilaku pemilih melalui identitas kolektif yang membentuk preferensi politik. Di sisi lain, partai politik secara aktif memanfaatkan struktur tersebut dalam merancang strategi mobilisasi dan kompetisi elektoral. Interaksi antara kedua aspek ini menciptakan pola hubungan timbal balik yang menjadikan kasta sebagai variabel sentral dalam memahami politik India kontemporer (Chhibber & Verma, 2018).

Dalam kerangka inilah, analisis mengenai kasta dalam politik tidak dapat dilepaskan dari peran aktor utama yang mengoperasionalkan identitas tersebut, yaitu partai politik. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada bagaimana kasta digunakan secara strategis oleh partai politik sebagai instrumen mobilisasi dan konsolidasi kekuasaan dalam sistem demokrasi India.

1. Penggunaan Kasta dalam Partai Politik

Kasta dalam politik India modern telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar struktur sosial tradisional menjadi instrumen strategis dalam dinamika kekuasaan politik. Dalam konteks demokrasi elektoral, kasta berfungsi sebagai basis identitas kolektif yang memiliki daya mobilitas tinggi, terutama karena keterkaitannya dengan sejarah sosial, struktur hierarki, serta pengalaman marginalisasi yang dialami oleh kelompok tertentu. Identitas ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam praktik politik sehari-hari. Partai politik memanfaatkan keberadaan kasta sebagai sarana untuk mengorganisasi dukungan secara sistematis, sehingga menciptakan hubungan yang erat antara struktur sosial dan perilaku politik. Dengan demikian, kasta tidak lagi berada di luar sistem politik, melainkan telah terintegrasi secara mendalam dalam mekanisme demokrasi India (Chandra, 2019).

Salah satu studi kasus yang relevan dapat dilihat pada keberhasilan

Bharatiya Janata Party dalam Pemilu India 2019 di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Dalam konteks ini, partai tersebut tidak hanya mengandalkan identitas religius melalui ideologi Hindutva, tetapi juga secara sistematis mengintegrasikan berbagai kelompok kasta, khususnya *Other Backward Classes* (OBC) dan *Scheduled Castes* (SC), ke dalam strategi politiknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan komposisi elite dan kandidat, BJP secara aktif meningkatkan representasi OBC dan SC dalam struktur partai serta pencalonan legislatif dengan memperluas rekrutmen kandidat dari kelompok non-upper caste di berbagai negara bagian. Data komposisi kandidat dan anggota parlemen juga menunjukkan kenaikan signifikan proporsi OBC dalam barisan BJP dibanding periode sebelumnya. Ini bukan simbolik semata, tetapi strategi untuk mencocokkan profil kandidat dengan demografi pemilih lokal, sehingga memperbesar peluang.

BJP membentuk dan mengaktifkan jaringan internal berbasis kasta seperti OBC Morcha dan SC Morcha, yang secara khusus bertugas menjangkau, mengorganisasi, dan mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Unit-unit ini tidak hanya berfungsi saat kampanye, tetapi juga bekerja secara berkelanjutan untuk menjaga kedekatan partai dengan komunitas kasta tertentu melalui kegiatan sosial, advokasi lokal, dan komunikasi politik yang terarah. BJP juga menjalankan berbagai program kesejahteraan yang secara de facto banyak menysasar kelompok sosial-ekonomi bawah yang overlap dengan OBC dan SC, seperti program akses gas rumah tangga (*Ujjwala Yojana*), sanitasi (*Swachh Bharat*), dan bantuan perumahan. Meskipun kebijakan ini dikemas sebagai program universal, implementasinya secara empiris memperluas basis dukungan di kalangan kelompok marginal (BBC News, 2019).

Selain itu, BJP secara aktif merekrut kandidat dari berbagai kasta non-dominan dan mendistribusikan program kesejahteraan seperti subsidi energi dan bantuan sosial yang secara signifikan menysasar kelompok marginal. Hal Ini menunjukkan bahwa BJP tidak semata-mata mengandalkan ideologi Hindutva, tetapi mengkombinasikannya dengan strategi integrasi kasta yang sistematis untuk membangun dominasi politik dalam demokrasi India. Modi berhasil membangun dukungan lintas kasta melalui kombinasi narasi identitas dan kebijakan

kesejahteraan dalam Pemilu 2019 (BBC News, 2019). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa identitas sosial tetap menjadi unsur penting dalam politik kontemporer India.

Dalam kerangka tersebut, konsep *vote bank politics* menjadi kunci untuk memahami bagaimana kasta digunakan dalam mobilisasi elektoral. Karena melalui kerangka *vote bank*, partai politik tidak perlu membangun dukungan individu secara terpisah, melainkan cukup menargetkan satu kelompok kasta sebagai satu kesatuan yang cenderung bergerak bersama dalam menentukan pilihan politik. Efektivitas strategi ini terletak pada kuatnya solidaritas sosial antar anggota kasta yang membentuk loyalitas politik jangka panjang (Heath & Tillin, 2018). Selain itu, pengalaman historis ketimpangan sosial memperkuat kesadaran suatu kelompok yang dapat diubah menjadi dukungan politik yang relatif stabil (Jensenius, 2018). Keberadaan jaringan sosial yang terorganisasi secara informal juga mempermudah partai dalam memobilisasi pemilih tanpa harus membangun preferensi politik dari awal. Oleh karena itu, penggunaan kasta dalam konteks ini menunjukkan bahwa partai bertindak rasional dengan memanfaatkan struktur sosial yang telah mengakar untuk memaksimalkan dukungan elektoral (Aiyar, 2020).

Hal ini dapat dilihat pada praktik *vote bank politics* oleh Samajwadi Party di negara bagian Uttar Pradesh, khususnya dalam berbagai kontestasi pemilu legislatif dan regional dalam satu dekade terakhir. Partai ini secara konsisten membangun basis dukungan dari kelompok *Other Backward Classes* (OBC), terutama komunitas Yadav, dengan cara mengkonsolidasikan identitas sosial tersebut sebagai satu kesatuan politik yang relatif solid. Melalui pendekatan ini, partai tidak perlu membangun preferensi politik individu secara terpisah, melainkan cukup memperkuat loyalitas kolektif melalui representasi politik (misalnya pencalonan kandidat dari komunitas Yadav) dan distribusi kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut (BBC News, 2022).

Strategi ini diperkuat oleh jaringan sosial berbasis komunitas yang sudah terbangun secara turun-temurun, sehingga mobilisasi politik dapat dilakukan secara efisien dan berulang dalam setiap siklus pemilu. Fenomena ini

mencerminkan bagaimana solidaritas sosial dan pengalaman historis kelompok dapat diubah menjadi dukungan elektoral yang stabil, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *vote bank* politics. Keberhasilan Samajwadi Party dalam meningkatkan perolehan suara di Uttar Pradesh sangat dipengaruhi oleh konsolidasi suara OBC, terutama Yadav, sebagai basis utama dukungan partai (BBC News, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa strategi aliansi berbasis kasta yang dilakukan partai tersebut berhasil menarik dukungan tambahan dari kelompok non-Yadav OBC, sehingga memperluas *vote bank* tanpa kehilangan basis inti (The Indian Express, 2022). Studi kasus ini menegaskan bahwa konsep *vote bank* politics bukan hanya kerangka teoritis, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik politik konkret, di mana kasta digunakan sebagai unit mobilisasi yang efektif dan berkelanjutan dalam demokrasi elektoral India.

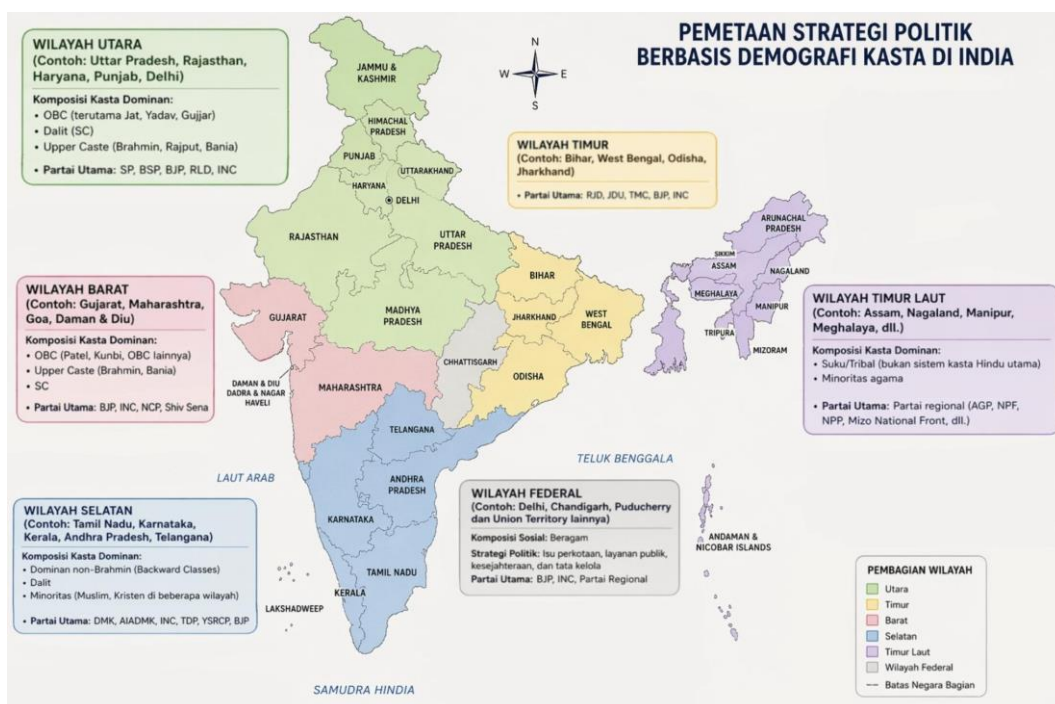
Strategi politik berbasis kasta di India tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dioperasionalkan melalui mekanisme yang sistematis dan terukur oleh partai politik. Salah satu instrumen paling menonjol adalah seleksi kandidat berbasis kasta, yakni praktik di mana partai secara sadar mencalonkan individu dari kelompok kasta yang dominan di suatu daerah pemilihan. Pendekatan ini bertumpu pada asumsi bahwa kesamaan identitas sosial antara kandidat dan pemilih akan meningkatkan legitimasi sosial sekaligus memperkuat kepercayaan politik. Dalam konteks ini, kandidat tidak hanya dipandang sebagai representasi individu, tetapi juga sebagai simbol kolektif dari kelompok sosial tertentu. Struktur sosial lokal dan basis identitas memainkan peran krusial dalam menentukan strategi pencalonan dan keberhasilan elektoral. Dengan demikian, seleksi kandidat berbasis kasta menjadi bentuk rasionalisasi strategi politik yang memadukan kalkulasi elektoral dengan realitas sosiologis masyarakat India yang berlapis (Ziegfeld, 2020).

Di sisi lain, retorika kampanye berfungsi sebagai perangkat penting dalam mengaktivasi dimensi emosional dan historis dari identitas kasta. Dalam masyarakat yang terstruktur secara hierarkis, perilaku pemilih tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan rasional, tetapi juga oleh pengalaman kolektif yang diwariskan, termasuk sejarah marginalisasi dan ketidaksetaraan. Partai politik memanfaatkan kondisi ini melalui narasi yang menekankan keadilan sosial,

pemerataan, dan pengakuan atas hak-hak yang selama ini terabaikan. Penggunaan bahasa seperti *historically neglected rights* atau *equitable access to opportunities* bukan sekadar retorika normatif, melainkan strategi diskursif yang mampu membangkitkan memori kolektif serta memperkuat identifikasi emosional antara pemilih dan partai. Proses ini menciptakan kedekatan psikologis yang signifikan, di mana pemilih merasa bahwa pengalaman dan aspirasi mereka diakui dalam arena politik.

Dengan demikian, mobilisasi berbasis kasta tidak hanya bekerja melalui struktur organisasi dan distribusi kandidat, tetapi juga melalui konstruksi makna yang membentuk persepsi dan preferensi politik secara mendalam. Strategi ini diperkuat dengan pemetaan wilayah berbasis demografi kasta, sehingga setiap daerah memiliki pendekatan politik yang berbeda sesuai komposisi sosial setempat.

Gambar III.6 Pemetaan Strategi Politik Berbasis Demografi Kasta di India



Sumber: Diolah dari Laffrelot, C. (2021) dan Sircar, N. (2022).
<https://www.cambridge.org/core/books/caste-and-politics-in-india/>,
<https://doi.org/10.1017/9781108989929>

Retorika kampanye memainkan peran penting dalam membangun

resonansi emosional Dengan demikian, strategi berbasis kasta bukan sekadar kebiasaan politik lama, tetapi bagian dari kalkulasi politik yang sangat terencana. Peta tersebut menunjukkan bahwa strategi politik di India tidak bersifat seragam secara nasional, melainkan sangat bergantung pada variasi demografi kasta di setiap wilayah, sehingga menghasilkan pendekatan politik yang berbeda-beda. Secara analitis, pemetaan ini menegaskan bahwa kasta berfungsi sebagai variabel struktural yang menentukan bagaimana partai politik merancang strategi mobilisasi, memilih kandidat, serta membangun narasi kampanye. Di wilayah utara seperti Uttar Pradesh dan sekitarnya, dominasi OBC dan Dalit menciptakan politik yang sangat berbasis identitas, di mana partai seperti Samajwadi Party dan Bahujan Samaj Party mengandalkan konsolidasi vote bank berbasis kasta. Hal ini menunjukkan bahwa ketika struktur sosial relatif homogen, strategi politik cenderung langsung menargetkan identitas kolektif sebagai basis mobilisasi utama (Jaffrelot, 2021).

Sebaliknya, di wilayah barat seperti Gujarat, strategi politik yang ditunjukkan dalam peta memperlihatkan kombinasi antara identitas kasta dan isu pembangunan ekonomi. Bharatiya Janata Party mampu membangun koalisi antara kelompok OBC dan upper caste dengan mengintegrasikan narasi nasionalisme dan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa dalam wilayah dengan komposisi kasta yang lebih seimbang, partai cenderung menggunakan pendekatan hibrid, yaitu menggabungkan identitas sosial dengan isu program untuk memperluas basis dukungan (Chandra, 2019). Dengan kata lain, kasta tetap penting, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya variabel.

Di wilayah selatan seperti Tamil Nadu dan Kerala, peta menunjukkan bahwa politik tidak secara eksplisit menonjolkan kasta, melainkan lebih menekankan identitas regional dan ideologi seperti Dravidianisme. Namun demikian, ini bukan berarti kasta tidak relevan, melainkan telah terinternalisasi dalam struktur sosial dan politik yang lebih luas. Partai-partai regional tetap mempertimbangkan komposisi sosial dalam menentukan kandidat dan kebijakan, tetapi tidak menggunakan retorika kasta secara terbuka (Chhibber & Verma, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa bentuk mobilisasi berbasis kasta dapat

bertransformasi sesuai konteks budaya dan sejarah wilayah.

Sementara itu, wilayah timur seperti Bihar dan Odisha menunjukkan pola yang lebih kompleks, di mana tidak ada satu kelompok kasta yang dominan secara absolut. Peta tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, strategi politik cenderung berbentuk koalisi antar sub-kasta, seperti OBC, EBC, dan Dalit. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa fragmentasi sosial justru mendorong partai untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam membangun aliansi politik (Sircar, 2022). Dengan demikian, semakin terfragmentasi struktur kasta suatu wilayah, semakin kompleks pula strategi elektoral yang digunakan.

Wilayah timur laut menunjukkan pengecualian penting, di mana struktur sosial lebih didominasi oleh identitas etnis dan suku dibandingkan sistem kasta Hindu tradisional. Peta tersebut memperlihatkan bahwa strategi politik di wilayah ini lebih berfokus pada isu otonomi, identitas budaya, dan pembangunan wilayah. Hal ini menegaskan bahwa variabel identitas dalam politik India bersifat kontekstual, dan kasta bukan satu-satunya faktor penentu dalam semua wilayah (Tillin, 2019).

Secara keseluruhan, peta ini mendukung argumen bahwa pemetaan strategi berbasis demografi kasta merupakan pendekatan yang rasional dan adaptif dalam sistem demokrasi India. Partai politik tidak hanya merespons struktur sosial yang ada, tetapi juga secara aktif mengolahnya menjadi strategi elektoral yang spesifik untuk setiap wilayah. Dengan demikian, politik India bersifat multi-level dan kontekstual, dimana interaksi antara kasta, wilayah, dan isu politik menghasilkan variasi strategi yang kompleks. Argumen ini memperkuat bahwa kasta bukan sekadar warisan sosial, tetapi telah menjadi instrumen strategis yang fleksibel dalam dinamika politik kontemporer India (Ziegfeld, 2020).

Selain strategi individual, variasi pendekatan antar partai menunjukkan bahwa penggunaan kasta sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem kepartaian di India. Partai berbasis kasta seperti Bahujan Samaj Party (BSP) dan Samajwadi Party (SP) cenderung mengandalkan mobilisasi homogen dengan fokus pada kelompok tertentu seperti Dalit atau Other Backward Classes (OBC). Sebaliknya, partai nasional seperti Narendra Modi's Bharatiya Janata Party dan Indian National

Congress mengembangkan strategi yang lebih kompleks dengan menggabungkan identitas kasta dengan isu nasionalisme dan pembangunan ekonomi (Jaffrelot, 2021). Sementara itu, partai regional sering menargetkan sub-kasta tertentu dengan pendekatan yang sangat spesifik dan lokal (Tillin, 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa fragmentasi sosial berbasis kasta secara langsung membentuk struktur dan strategi sistem kepartaian India.

Di samping mobilisasi identitas, penggunaan kasta dalam politik juga berkaitan erat dengan distribusi sumber daya. Partai politik tidak hanya mengandalkan simbolisme identitas, tetapi juga memberikan insentif material kepada kelompok pendukung melalui kebijakan afirmatif, program kesejahteraan, serta distribusi posisi politik dalam pemerintahan. Hal ini dapat dipahami secara lebih konkret melalui praktik kebijakan dan strategi pemerintahan yang dilakukan oleh Bharatiya Janata Party di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Yang secara aktif menjalankan program kesejahteraan seperti Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (subsidi LPG untuk rumah tangga miskin), PM Awas Yojana (perumahan), dan Swachh Bharat Mission (sanitasi), yang secara empiris banyak menjangkau kelompok sosial-ekonomi bawah yang overlap dengan OBC dan (SC) Scheduled Castes (BBC News, 2019).

Berbagai program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperluas basis dukungan politik BJP di kalangan kelompok marginal karena mereka merasakan manfaat langsung dari kebijakan negara. Kebijakan semacam ini memperlihatkan hubungan timbal balik antara dukungan politik dan imbalan kebijakan. Dalam banyak kasus, kelompok kasta yang menjadi basis dukungan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya negara melalui representasi politik yang lebih luas (Tillin, 2019). Dengan demikian, kasta berfungsi tidak hanya sebagai alat mobilisasi simbolik, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam sistem politik.

Tabel III.3 Strategi Penggunaan Kasta dalam Partai Politik India

Aspek Strategi	Bentuk Implementasi	Tujuan Politik
Mobilisasi vote bank	Konsolidasi pemilih berbasis kasta	Mengamankan dukungan elektoral
Seleksi kandidat	Kandidat dari kasta dominan wilayah	Meningkatkan elektabilitas
Retorika kampanye	Narasi representasi sosial	Membangun kedekatan emosional
Pemetaan wilayah	Strategi sesuai demografi lokal	Efisiensi kampanye
Patronase	Program kesejahteraan dan jabatan	Memperkuat loyalitas politik

Sumber: Diolah dari Chhibber, P., & Verma, R. *Ideology and identity*. Oxford University Press (2018).

(<https://doi.org/10.1093/oso/9780190623906.001.0001>)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kasta oleh partai politik tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional dan terintegrasi dalam berbagai tahapan strategi politik. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kasta berfungsi sebagai sarana penghubung antara identitas sosial dan kepentingan kekuasaan dalam demokrasi India (Chhibber & Verma, 2018).

Namun demikian, penggunaan kasta dalam partai politik memiliki implikasi yang kompleks terhadap demokrasi. Di satu sisi, strategi ini berkontribusi pada peningkatan representasi politik kelompok marginal yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem politik formal. Di sisi lain, ketergantungan terhadap identitas kasta berpotensi memperkuat politik identitas dan menggeser fokus dari politik berbasis program atau kebijakan universal (Chhibber & Verma, 2018). Akibatnya, kompetisi politik sering kali lebih didasarkan pada kemampuan mobilisasi identitas dibandingkan kualitas kebijakan yang ditawarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi India tidak menghapus stratifikasi sosial, tetapi justru mengintegrasikannya ke dalam praktik politik modern (Jaffrelot, 2021).

Salah satu studi kasus yang dapat dilihat pada dinamika pemilu di negara bagian Uttar Pradesh. Dalam pemilu negara bagian pada tahun 2022, perbedaan antara Bharatiya Janata Party dan Samajwadi Party menunjukkan bagaimana mobilisasi identitas kasta menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil politik.

Meskipun isu pembangunan, kesejahteraan, dan kinerja pemerintahan tetap diangkat, kedua partai secara aktif membangun strategi berbasis identitas sosial. BJP berupaya mempertahankan koalisi luas non-Yadav OBC dan kelompok Dalit tertentu, sementara Samajwadi Party mengonsolidasikan dukungan dari komunitas Yadav serta mencoba memperluas basis ke kelompok OBC lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola pemungutan suara di Uttar Pradesh masih sangat dipengaruhi oleh afiliasi kasta, di mana banyak pemilih menentukan pilihan berdasarkan kedekatan identitas dibandingkan evaluasi rinci terhadap program kebijakan (The Indian Express, 2022).

Secara keseluruhan, penggunaan kasta dalam partai politik mencerminkan adaptasi sistem demokrasi India terhadap realitas sosial yang kompleks. Kasta tidak dihapus oleh modernisasi politik, melainkan diintegrasikan sebagai bagian dari strategi kekuasaan yang dinamis. Partai politik secara rasional memanfaatkan struktur sosial tersebut untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sementara pemilih merespons melalui kerangka identitas yang telah mengakar (Chandra, 2019). Dengan demikian, kasta berfungsi sebagai penghubung antara struktur sosial dan praktik politik, sekaligus menjadi salah satu determinan utama dalam memahami dinamika demokrasi India kontemporer.

2. Kasta dalam Pemilu India (2019–2024)

Kasta dalam pemilu India periode 2019–2024 tetap menjadi determinan utama dalam membentuk perilaku pemilih. Dalam perspektif perilaku politik, kasta berfungsi sebagai heuristic cue, yaitu alat kognitif yang membantu pemilih menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam situasi informasi yang kompleks. Hal ini dapat dilihat pada dinamika Pemilu India 2019 di negara bagian Bihar. Banyak pemilih menghadapi kompleksitas informasi terkait program kebijakan, koalisi partai, serta isu nasional seperti pembangunan dan keamanan. Namun, alih-alih mengevaluasi seluruh informasi tersebut secara mendalam, pemilih cenderung menggunakan identitas kasta sebagai alat penyederhanaan dalam menentukan pilihan politik. Misalnya, kelompok OBC dan sub-kasta seperti Yadav secara historis memiliki kecenderungan mendukung partai atau kandidat yang dianggap merepresentasikan kepentingan mereka, seperti yang diasosiasikan

dengan Rashtriya Janata Dal. Preferensi pemilih dipengaruhi oleh identitas kasta yang menunjukkan bahwa pemilih menggunakan kasta sebagai indikator cepat untuk menilai siapa yang paling mungkin memperjuangkan kepentingan mereka (BBC News, 2019).

Distribusi suara dalam pemilu tersebut mengikuti pola sosial berbasis kasta, di mana kelompok tertentu menunjukkan loyalitas yang relatif konsisten terhadap kandidat yang berasal dari latar belakang sosial yang sama. Dalam kondisi ini, kasta berfungsi sebagai shortcut kognitif yang memungkinkan pemilih mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan politik. Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa tidak semua pemilih memiliki akses atau waktu untuk mengevaluasi program kebijakan secara rinci, sehingga identitas sosial menjadi referensi utama. Dengan demikian, studi kasus ini menegaskan bahwa penggunaan kasta sebagai heuristic cue bukan merupakan bentuk irasionalitas, melainkan strategi adaptif dalam menghadapi kompleksitas informasi politik. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam demokrasi India, struktur sosial tidak hanya mempengaruhi pilihan politik, tetapi juga membentuk cara pemilih memproses informasi dan mengambil keputusan secara praktis dan efisien (The Indian Express, 2019).

Dalam masyarakat dengan tingkat literasi politik yang beragam dan akses informasi yang tidak merata, hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat melek huruf di India yang berada kisaran $\pm 77\%$ (sensus terbaru), namun terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah urban ($\pm 87\%$) dan rural ($\pm 73\%$). Kesenjangan ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi politik. Pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa sekitar 40–45% pemilih di pedesaan mengaku tidak secara rutin mengikuti berita politik melalui media formal, dibandingkan dengan sekitar 20–25% di wilayah perkotaan. Selain itu, sekitar 30% pemilih dengan tingkat pendidikan rendah menyatakan bahwa mereka memilih berdasarkan “identitas sosial atau komunitas,” dibandingkan dengan kurang dari 15% pada kelompok berpendidikan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi dan literasi politik mendorong pemilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dalam

menentukan pilihan (Pew Research Center, 2020).

Pemilih cenderung menggunakan identitas sosial yang paling dekat dan mudah dikenali sebagai dasar evaluasi politik. Oleh karena itu, Kasta menjadi indikator praktis untuk menilai apakah seorang kandidat dianggap “mewakili” kepentingan mereka. Kedekatan identitas ini menciptakan persepsi bahwa kandidat dari kasta yang sama lebih memahami kebutuhan komunitasnya, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dan kemungkinan dukungan elektoral. Dengan demikian, preferensi politik tidak sepenuhnya dibangun melalui analisis program atau kebijakan, tetapi melalui mekanisme identifikasi sosial yang telah terbentuk secara historis (Chhibber & Verma, 2018).

Penggunaan kasta sebagai heuristic cue juga menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih dalam konteks India bersifat kontekstual, bukan sepenuhnya irasional. Pemilih tetap bertindak rasional, tetapi dalam kerangka sosial yang membatasi dan membentuk pilihan mereka. Dalam kondisi di mana informasi mengenai kebijakan seringkali kompleks atau tidak merata, identitas kasta menjadi alat yang efisien untuk memprediksi perilaku kandidat dan hasil kebijakan yang mungkin dihasilkan. Selain itu, pengalaman kolektif seperti marginalisasi atau akses terbatas terhadap sumber daya memperkuat kecenderungan pemilih untuk mendukung kandidat yang berasal dari kelompok yang sama. Hal ini menjelaskan mengapa pola voting berbasis kasta tetap bertahan meskipun demokrasi India terus berkembang dan mengalami modernisasi. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di India tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur sosial yang mendasarinya, karena identitas kasta tetap menjadi faktor penting dalam membentuk preferensi politik dan perilaku pemilih (Heath & Tillin, 2018).

Kondisi tersebut kemudian membentuk dasar bagi strategi elektoral yang diterapkan oleh partai politik. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, partai menyesuaikan strategi mereka dengan struktur sosial yang ada, termasuk komposisi kasta di setiap daerah pemilihan. Namun, dalam konteks pemilu, strategi ini bukan hanya inisiatif sepihak dari partai, melainkan respons terhadap perilaku pemilih yang telah terbentuk sebelumnya. Partai mencalonkan kandidat yang

sesuai dengan identitas sosial mayoritas di suatu wilayah dan membangun koalisi berbasis kasta untuk memperluas dukungan elektoral. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara strategi partai dan preferensi pemilih, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam membentuk hasil pemilu (Ziegfeld, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kasta berfungsi sebagai variabel penghubung antara struktur sosial dan dinamika elektoral dalam demokrasi India (Sircar, 2022).

Variasi regional menjadi aspek penting dalam memahami dinamika ini, terutama di negara bagian seperti Uttar Pradesh yang sering dianggap sebagai pusat politik berbasis kasta. Di wilayah ini, kandidat sering dipilih berdasarkan afiliasi komunitas tertentu, sementara koalisi politik dibangun melalui kombinasi kelompok kasta yang memiliki kepentingan serupa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa politik India bersifat multi-level, di mana dinamika nasional tidak selalu mencerminkan realitas politik di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, faktor kasta memiliki pengaruh yang lebih kuat di tingkat regional dibandingkan isu nasional, sehingga menghasilkan variasi hasil pemilu yang signifikan antar wilayah (Tillin, 2019). Dengan demikian, analisis terhadap pemilu India harus mempertimbangkan interaksi antara level nasional dan lokal secara simultan.

Untuk memperjelas dinamika tersebut, berikut disajikan tabel yang merangkum perubahan peran kasta dalam pemilu 2019–2024:

Tabel III.4 Dinamika Peran Kasta dalam Pemilu India (2019–2024)

Aspek	Pemilu 2019	Pemilu 2024	Implikasi
Strategi utama	Integrasi lintas kasta (Hindutva)	Fragmentasi kembali berbasis kasta	Kasta tetap relevan
Basis dukungan	Koalisi luas Hindu	Penguatan OBC & Dalit	Mobilisasi identitas meningkat

Peran partai	Dominasi partai nasional	Kompetisi dengan partai regional	Sistem multi-level
Faktor penentu	Nasionalisme religius	Representasi sosial & kesejahteraan	Interaksi variabel

Sumber: Diolah oleh penulis dari Chhibber dan Verma (2018) dan Jaffrelot (2021).

(<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33659>,
<https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691206806>)

Tabel ini menunjukkan bahwa kasta tidak mengalami penurunan peran, melainkan mengalami transformasi dalam bentuk dan strategi penggunaannya dalam pemilu. Dalam pemilu 2019, dinamika politik menunjukkan adanya upaya integrasi lintas kasta melalui mobilisasi identitas religius, khususnya melalui ideologi Hindutva yang diusung oleh Bharatiya Janata Party. Strategi ini bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok kasta Hindu dalam satu identitas mayoritas yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, partai tersebut juga melakukan pendekatan inklusif terhadap kelompok OBC dan Scheduled Castes melalui representasi politik dan program kesejahteraan. Pendekatan ini tidak menghapus identitas kasta, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kerangka identitas religius yang lebih besar, sehingga mampu mengurangi fragmentasi politik berbasis kasta dalam skala nasional (Jaffrelot, 2021). Dengan demikian, pemilu 2019 menunjukkan bahwa identitas kasta dapat direstrukturisasi dalam bentuk yang lebih luas tanpa kehilangan relevansinya (Chandra, 2019).

Namun, dinamika menjelang dan selama pemilu 2024 menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana fragmentasi berbasis kasta kembali menguat, terutama di tingkat regional. Hal ini diperkuat melalui data distribusi suara dan pergeseran dukungan antar kelompok sosial. Kelompok Dalit yang mencakup sekitar $\pm 17\%$ populasi India menjadi arena kompetisi utama antar partai, dengan berbagai kekuatan politik berupaya merebut dukungan kelompok ini secara intensif (Deccan Chronicle, 2024). Dengan demikian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam preferensi pemilih berbasis kasta, khususnya pada kursi yang

diperuntukkan bagi Scheduled Castes (SC), di mana dukungan terhadap partai oposisi meningkat dari sekitar 16,7% pada 2019 menjadi 20,8% pada 2024 (The Hindu, 2024). Di tingkat regional seperti Uttar Pradesh, fragmentasi ini semakin terlihat melalui pola voting yang terpecah berdasarkan sub-kasta yaitu sekitar 82% pemilih Yadav cenderung mendukung oposisi, sementara kelompok OBC lain seperti Kurmi dan Koiri menunjukkan kecenderungan berbeda dengan sekitar 61% mendukung koalisi pemerintah, serta pemilih Dalit yang juga terdistribusi ke berbagai partai (The Samiksha, 2024). Data ini menunjukkan bahwa tidak lagi terjadi konsolidasi identitas dalam satu blok besar, melainkan fragmentasi yang semakin spesifik pada tingkat sub-kelompok kasta.

Meskipun Bharatiya Janata Party tetap menjadi kekuatan dominan secara nasional, strategi integrasi lintas kasta melalui identitas religius menghadapi keterbatasan dalam mempertahankan dukungan di beberapa wilayah. Kelompok OBC dan Dalit menunjukkan peningkatan mobilisasi politik yang lebih mandiri, sementara partai oposisi mulai mengangkat isu representasi dan distribusi kekuasaan secara lebih eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa identitas kasta memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh narasi politik yang lebih luas (Sircar, 2022). Dengan demikian, pemilu 2024 menegaskan kembali pentingnya kasta sebagai faktor struktural dalam kompetisi elektoral India (Ziegfeld, 2020).

Selain itu, penting untuk memahami bahwa kasta tidak beroperasi secara terpisah dari isu-isu modern, melainkan berinteraksi dengan berbagai variabel lain seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan nasionalisme. Dalam pemilu 2019–2024, partai politik tidak hanya mengandalkan identitas kasta, tetapi juga mengombinasikannya dengan narasi pembangunan dan stabilitas politik. Pemilih pun tidak semata-mata memilih berdasarkan identitas, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi dan kebijakan yang ditawarkan. Interaksi ini menunjukkan bahwa kasta tetap relevan, tetapi beroperasi dalam kerangka yang lebih kompleks dan multidimensional dalam demokrasi kontemporer (Aiyar, 2020). Dengan demikian, analisis politik India tidak dapat hanya berfokus pada satu variabel, melainkan harus melihat hubungan antar faktor secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, dinamika pemilu India periode 2019–2024 menunjukkan bahwa kasta tetap menjadi variabel struktural yang adaptif dalam demokrasi elektoral. Kasta tidak hanya mempengaruhi perilaku pemilih, tetapi juga membentuk strategi partai dan hasil pemilu secara keseluruhan. Di satu sisi, keberadaan kasta memperkuat representasi sosial kelompok marginal dalam sistem politik. Namun, di sisi lain, hal ini juga mempertahankan fragmentasi sosial dan membatasi perkembangan politik berbasis isu universal. Dengan demikian, pemilu India mencerminkan interaksi kompleks antara identitas sosial dan mekanisme demokrasi modern, di mana kasta tetap menjadi elemen kunci dalam memahami dinamika politik kontemporer (Jaffrelot, 2021).

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem kasta di India tidak hanya bertahan sebagai struktur sosial historis, tetapi telah mengalami transformasi signifikan menjadi instrumen politik dalam konteks demokrasi modern, khususnya pada periode 2019–2024. Politisasi sistem kasta bukan merupakan fenomena yang muncul secara alamiah, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara struktur sosial yang telah terlembagakan secara historis dengan strategi rasional elite politik dalam arena kompetisi elektoral.

Secara struktural, sistem kasta memiliki akar yang kuat dalam tradisi sosial, agama, dan budaya masyarakat India. Meskipun secara formal diskriminasi berbasis kasta telah dilarang melalui konstitusi dan berbagai kebijakan afirmatif, realitas empiris menunjukkan bahwa hierarki sosial tersebut masih berfungsi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena sistem kasta mampu mereproduksi dirinya melalui mekanisme ideologis yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Dalam kerangka hegemoni budaya, dominasi tidak hanya dipertahankan melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan sosial (*consent*) yang membuat struktur ketimpangan tampak wajar dan sah. Nilai-nilai religius seperti karma dan dharma, serta praktik sosial yang berulang, berkontribusi pada internalisasi ketimpangan sebagai bagian dari tatanan moral yang tidak dipertanyakan.

Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem kasta tidak cukup dijelaskan hanya melalui dimensi kultural atau historis. Dalam konteks demokrasi elektoral yang kompetitif, sistem kasta justru memperoleh fungsi baru sebagai sumber daya politik yang dapat dimobilisasi secara strategis. Elite politik secara aktif menggunakan identitas kasta untuk membangun basis dukungan elektoral, terutama dalam masyarakat yang memiliki tingkat fragmentasi sosial tinggi. Strategi tersebut diwujudkan melalui distribusi kandidat berbasis

komposisi kasta, penggunaan simbol dan narasi identitas dalam kampanye, serta pembentukan koalisi politik berbasis komunitas sosial tertentu.

Dalam perspektif instrumentalisasi identitas, kasta tidak lagi sekadar identitas sosial yang statis, melainkan telah direkonstruksi sebagai alat politik yang fleksibel dan kontekstual. Elite tidak hanya memanfaatkan identitas yang sudah ada, tetapi juga mengemas dan mengartikulusikannya agar sesuai dengan kebutuhan politik. Dengan demikian, politisasi kasta merupakan hasil dari kalkulasi rasional yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Lebih lanjut, politisasi kasta dapat berlangsung secara efektif karena didukung oleh legitimasi ideologis yang telah mengakar dalam masyarakat. Praktik mobilisasi identitas tidak selalu dipersepsikan sebagai bentuk eksploitasi, melainkan sebagai representasi yang sah dari kepentingan sosial. Ketika masyarakat telah menginternalisasi nilai-nilai yang mendukung hierarki sosial, maka mobilisasi berbasis kasta menjadi bagian yang dianggap normal dalam proses demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak secara otomatis menghapus ketimpangan sosial, tetapi justru dapat menjadi ruang reproduksi bagi struktur hierarki yang telah ada.

Dinamika politik pada periode 2019–2024 juga menunjukkan bahwa politisasi kasta tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan perkembangan politik identitas yang lebih luas, termasuk integrasi antara identitas sosial dan agama dalam strategi kekuasaan. Dalam konteks ini, kasta menjadi bagian dari arsitektur mobilisasi politik yang lebih kompleks, di mana identitas kolektif digunakan sebagai sumber legitimasi dan konsolidasi kekuasaan. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dalam praktik demokrasi, di mana identitas sosial menjadi faktor dominan dalam menentukan perilaku politik dan distribusi kekuasaan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi memiliki sifat ambivalen dalam hubungannya dengan ketimpangan sosial. Di satu sisi, demokrasi menyediakan ruang partisipasi politik yang lebih luas, namun disisi lain juga menciptakan insentif bagi elite untuk memanfaatkan identitas sosial sebagai alat

mobilisasi. Akibatnya, struktur ketimpangan yang telah ada tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat diperkuat melalui mekanisme demokrasi itu sendiri. Politisasi kasta berpotensi meningkatkan fragmentasi sosial, memperdalam polarisasi, serta menghambat terciptanya demokrasi substantif yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan sosial.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif seperti sistem reservasi belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan ketimpangan berbasis kasta. Kebijakan tersebut cenderung berfokus pada distribusi sumber daya, sementara dimensi ideologis dan kultural yang menopang sistem kasta masih tetap bertahan. Tanpa adanya perubahan dalam kesadaran sosial dan struktur nilai masyarakat, kebijakan formal memiliki keterbatasan dalam menghasilkan perubahan yang mendasar.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Yaitu diperlukannya penguatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada afirmasi kuantitatif, tetapi juga pada transformasi kultural. Pemerintah perlu mendorong pendidikan inklusif, reformasi kurikulum yang menekankan nilai kesetaraan, serta kampanye publik untuk mengurangi stigma sosial berbasis kasta. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dan mengurangi legitimasi ideologis terhadap sistem kasta.

Selain itu perlu juga adanya institusi demokrasi yang diperkuat agar mampu membatasi praktik mobilisasi identitas yang eksklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi kampanye politik, peningkatan transparansi dalam proses politik, serta dorongan kepada partai politik untuk mengedepankan program kebijakan dibandingkan eksploitasi identitas sosial. Keterlibatan peran masyarakat sipil dan organisasi sosial juga perlu diperkuat dalam mendorong perubahan sosial. Gerakan sosial yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan perlu terus dikembangkan untuk menantang dominasi ideologis yang menopang sistem kasta. Media juga memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik yang lebih kritis terhadap politisasi identitas.

Oleh karena itu, untuk pengembangan kajian akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih beragam,

termasuk studi empiris lapangan dan analisis kuantitatif, serta melakukan perbandingan dengan konteks negara lain yang memiliki dinamika politik identitas serupa. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa politisasi sistem kasta di India merupakan hasil dari interaksi antara reproduksi hegemonik yang melegitimasi struktur sosial dan strategi instrumentalis elite dalam memanfaatkan identitas tersebut. Kedua faktor ini saling memperkuat dan menjadikan sistem kasta tetap relevan dalam politik modern. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan berbasis kasta tidak cukup dilakukan melalui kebijakan formal semata, tetapi memerlukan transformasi struktural dan kultural yang lebih mendalam.

Dengan demikian, kajian mengenai kasta di India tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan sosial tradisional, melainkan sebagai fenomena politik yang kompleks yang berperan dalam membentuk dinamika demokrasi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, A., & Varshney, A. (2020). Caste and electoral politics in India. *Annual Review of Political Science*, 23, 409–427.
<https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-032757>
- Ahmad, T., & Chahal, D. (2025). Reshaping social hierarchies in India: Exploring the changing dynamics of caste and community. *ResearchGate*.
<https://www.researchgate.net/publication/393750311>
- Aiyar, Y. (2020). *Caste, politics and representation in India*. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33659>
- Banerjee, A. (2023). Inter-caste marriage and social resistance in contemporary India. *Journal of South Asian Studies*, 46(2), 215–232.
<https://www.researchgate.net/publication/366137279>
- Bayly, S. (2008). *Caste, society and politics in India from the eighteenth century to the modern age*. Cambridge University Press.
- Brass, P. R. (1991). *Ethnicity and nationalism: Theory and comparison*. Sage Publications.
- Chandra, K. (2019). *Democratic dynasties*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108630085>
- Chandra, S., & Chong, T. T. L. (2024). *The impact of caste on income disparity in India today: A pan-India panel data approach* (MPRA Paper No. 120639). <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/120639/>
- Chhibber, P., & Verma, R. (2018). *Ideology and identity: The changing party systems of India*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190623906.001.0001>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Deol, R. (2023). Dominant caste elites and caste-based reservation in India. *Potentia: Journal of International and Public Affairs*, 14.
<https://ojs.scholarsportal.info/ottawa/index.php/potentia/article/view/67>

- Desai, S., & Dubey, A. (2012). Caste in 21st century India: Competing narratives. *Economic and Political Weekly*, 47(11), 40–49. <https://www.epw.in/journal/2012/11/special-articles/caste-21st-century-india>
- Deshpande, A. (2020). *The grammar of caste: Economic discrimination in contemporary India*. Oxford University Press.
- Deshpande, A., & Ramachandran, R. (2024). Caste disparities and affirmative action in India. *Oxford Review of Economic Policy*, 40(3), 630–640. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graee033>
- Dirks, N. B. (2001). *Castes of mind: Colonialism and the making of modern India*. Princeton University Press.
- Evolution of reservation system in India. (2025). Evolution of reservation system in India. *International Journal of Social Science Research and Review*, 8(12). <https://ijsrr.com/journal/article/view/3007>
- Extent, patterns, and geographic scale of caste-based segregation in Indian schools. (2025). *International Journal of Educational Development*. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.103347>
- Fuller, C. J. (2019). *The camphor flame: Popular Hinduism and society in India* (Rev. ed.). Princeton University Press.
- Goghari, V. M., & Kusi, M. (2023). An introduction to the basic elements of the caste system of India. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1210577>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Gupta, D. (2024). Democracy and identity politics in contemporary India. *Asian Journal of Political Science*, 32(1), 1–18. <https://lex-localis.org/index.php/LexLocalis/article/view/801168>
- Heath, O., & Tillin, L. (2018). Institutional performance and vote switching in India. *British Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1017/S0007123416000282>
- Heath, O., & Tillin, L. (2022). Institutional performance and political mobilization in India. *Studies in Indian Politics*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/23210230221077309>
- International Journal of Research and Analytical Reviews. (2019). Varna system and social hierarchy in Hindu society. *International Journal of*

- Intergenerational social mobility among Scheduled Caste families in Haryana. (2023). *Indian Journal of Extension Education*.
<https://doi.org/10.48165/IJEE.2023.59314>
- Jaffrelot, C. (2021a). *Caste and politics in India*. Oxford University Press.
- Jaffrelot, C. (2021b). *Modi's India: Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy*. Princeton University Press.
- Jamison, S. W., & Brereton, J. P. (2014). *The Rigveda: The earliest religious poetry of India*. Oxford University Press.
- Jensenius, F. R. (2018). *Social justice through inclusion: The consequences of electoral quotas in India*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198788867.001.0001>
- Kumar, A. (2019). Martial races theory and colonial army recruitment in India. *Journal of Imperial and Commonwealth History*, 47(3), 456–478.
<https://doi.org/10.1080/03086534.2019.1585312>
- Kumar, R., & Shastri, S. (2020). Social inequality and human development in India. *Economic and Political Weekly*, 55(12), 45–53.
- Muni, V. (2025). Urban Dalit identity and caste in Ahmedabad: Ambedkar's vision and its reality. *National Identities*.
<https://doi.org/10.1080/14608944.2025.2496633>
- National Campaign on Dalit Human Rights. (2022). *Annual report on caste-based discrimination in India*. <https://ncdhr.org.in>
- Paraskeva, J. M. (2023). Critical perspectives on the denial of caste in educational debate. *Educational Philosophy and Theory*.
<https://doi.org/10.1080/00131857.2023.2177652>
- Patnaik, A. K. (2024). *Gramsci and South Asia: Common sense, religion and political society*.
https://books.google.co.id/books/about/Gramsci_and_South_Asia.html
- Rao, A. (2020). Grassroots activism and Dalit rights movements in India. *Contemporary South Asia*, 28(3), 310–325.
<https://scholarworks.calstate.edu>
- Roy, S. (2021). Caste, representation and political mobilization in contemporary India. *Studies in Indian Politics*. <https://doi.org/10.1177/232102302110>

- Sagar, D. S., & Matolia, M. (2025). The Indian caste system: Historical change and colonial rigidity. *Advances in Consumer Research*, 2(S2). <https://acr-journal.com>
- Sato, H. (2024). Internalization of caste hierarchy and political consciousness in India. *Journal of Asian Sociology*, 53(1), 77–95. <https://doi.org/10.21588/jas.2024.53.1>
- Sharma, P., & Das, R. (2023). Caste discrimination and mental health outcomes in India. *Social Science & Medicine*, 320, 115–124. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115124>
- Sidanius, J., Cotterill, S., Bhardwaj, A., & Kumar, V. (2014). Ideological support for the Indian caste system. *Journal of Social and Political Psychology*, 2(1). <https://doi.org/10.5964/jspp.v2i1.171>
- Singh, P. (2021). Economic disparities among caste groups in India. *World Development*, 141, 105308. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105308>
- Sircar, N. (2022). Fragmentation and party system change in India. *Studies in Indian Politics*. <https://doi.org/10.1177/23210230221084712>
- Sinha, V. K. (2026). The Indian caste system under the influence of industrialization and urbanization. *ShodhSamajik: Journal of Social Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29121/ShodhSamajik.v3.i1.2026.66>
- Still, J. (2021). Gramsci and the politics of caste in India. *Interventions: International Journal of Postcolonial Studies*, 23(4), 523–540. <https://doi.org/10.1080/1369801X.2021>
- Śruti: Jurnal Agama Hindu. (2024). Konsep karma dan reinkarnasi dalam filsafat Hindu. <https://ekadanta.org>
- Thorat, S. (2022). Caste discrimination and constitutional safeguards in India. *Indian Journal of Human Development*, 16(2), 201–214. <https://idsn.org>
- Thorat, S., & Newman, K. S. (2010). *Blocked by caste: Economic discrimination in modern India*. Oxford University Press.
- Tillin, L. (2019). Federalism and caste politics in India. *Publius*. <https://doi.org/10.1093/publius/pjy051>
- United Nations. (2021). *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD): India review report*. <https://www.ohchr.org>

- Vaid, D. (2020). Caste networks and urban labor market outcomes in India. *Sociological Bulletin*, 69(3), 343–360.
<https://doi.org/10.1177/0038022920928245>
- Varshney, A. (2019). Ethnic democracy and Hindu nationalism in India. *Journal of Democracy*, 30(3), 5–19.
<https://doi.org/10.1353/jod.2019.0040>
- Ziegfeld, A. (2020). Coalition politics in India. *Comparative Political Studies*.
<https://doi.org/10.1177/0010414020912273>

